



LAPORAN BADAN PANGAN NASIONAL PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2024

BADAN PANGAN NASIONAL
JAKARTA, JANUARI TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional, sebagaimana pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didorong untuk memperkuat ranah pemantauan dan evaluasi. Pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan yang hasilnya akan dilaporkan dalam Laporan Bulanan Badan Pangan Nasional.

Hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, bahan dan data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, antara lain berupa instrument evaluasi dan instrument *best practice*, dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan yang akan dipantau dan dievaluasi, bahkan dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Badan Pangan Nasional mendapat alokasi tambahan anggaran untuk bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Sesuai DIPA Badan Pangan Nasional Revisi Ke-22 Nomor: SP DIPA- 125.01.1.690590/2024 tanggal 25 Desember 2024, alokasi anggaran menjadi sebesar Rp. 36.414.810.050.000. Anggaran tersebut perlu dipantau pemanfaatannya selama bulan Desember Tahun 2024 untuk mendorong penggunaan anggaran se-efisien dan se-efektif mungkin.

Untuk itu diperlukan keterlibatan pihak terkait, baik internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan Badan Pangan Nasional periode bulan Desember Tahun 2024 belum sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami ke depan. Semoga laporan Badan Pangan Nasional bulan Desember Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 15 Januari 2025
Plt. Sekretaris Utama,

Sarwo Edhy

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Metodologi Penyusunan Laporan	2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	11
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan.....	11
3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas	23
3.3 Kegiatan Kepala Badan Nasional.....	103
BAB IV PENUTUP.....	124
4.1 Kesimpulan	124
4.2 Permasalahan.....	126
4.3 Rekomendasi	126
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Alokasi Anggaran Sesuai DIPA Revisi ke-22 Badan Pangan Nasional Tahun 2024.....	3
Tabel 2.	Pagu Target Fisik dan Keuangan Bulan Desember sesuai esuai DIPA Revisi 22 Badan Pangan Nasional Tahun 2024	4
Tabel 3.	Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja per 31 Desember Tahun 2024.....	11
Tabel .4	Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember Tahun 2024 Per Output dan Komponen Lingkup Badan Pangan Nasional	12
Tabel 5.	Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Posisi sampai bulan Desember Tahun 2024.....	21
Tabel 6.	Realisasi Keuangan Bulan Desember Tahun 2024 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional.....	21

DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1. Lampiran III DIPA Revisi ke-22 Badan Pangan Nasional TA 2024....	124
Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen posisi Bulan Desember Tahun 2024 Sesuai Aplikasi SAKTI Kemenkeu.....	127



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, amanat ini dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022. Sebagaimana pasal 5 pada perbadan tersebut, Kepala Badan perlu melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara periodik, Kepala Badan menugaskan pimpinan masing-masing unit kerja eselon I (UKE-1) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1) Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi; 3) pemantapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan 4) dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional. Sesuai dengan dinamika perencanaan, kegiatan tersebut dijabarkan dalam 27 (dua puluh tujuh) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan 55 (lima puluh lima) Rincian Output (RO) berdasarkan DIPA revisi 22 Nomor: SP DIPA- 125.01.1.690590/2024 Tanggal 25 Desember 2024 untuk Badan Pangan Nasional (125.01) melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 36.414.810.050.000.- (Tiga Puluh Enam Triliun Empat Ratus Empat Belas Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berkaitan dengan penambahan alokasi anggaran Tahun 2024, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan oleh masing-masing unit kerja eselon II dan unit kerja eselon I secara berjenjang terkait penggunaan dan realisasi anggaran lingkup Badan Pangan Nasional sampai bulan Desember Tahun 2024 sesuai target pada bulan Desember sebesar 27,45% atau sebesar Rp.9.995.865.358.725,-. dari total anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 36.414.810.050.000.- (Tiga Puluh Enam Triliun Empat Ratus Empat Belas Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta



Lima Puluh Ribu Rupiah). Penetapan target berdasarkan lembar ke-III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor SP DIPA-125.01.1.690590/2024 Revisi ke-22 tanggal 25 Desember Tahun 2024.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan output kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Desember Tahun 2024 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Badan Pangan Nasional bulan Desember Tahun 2024. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Desember Tahun 2024 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Badan Pangan Nasional Tahun 2024 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Badan Pangan Nasional pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Badan Pangan Nasional posisi bulan Desember Tahun 2024.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Desember Tahun 2024.

1.3 Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT



Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari kinerja outcome di level Badan Pangan Nasional untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama Tahun 2024. Untuk dapat merealisasikan alokasi ABT Tahun 2024, telah terbit Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2024 Nomor SP DIPA- 125.01.1.690590/2024, Revisi ke-22 Tanggal 25 Desember 2024. Rencana kinerja output pada bulan Desember Tahun 2024 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai halaman III DIPA Revisi ke-22 Tahun 2024. Sebagaimana lembar ke-III DIPA Revisi ke-22 pada bulan Desember ditargetkan realisasi anggaran sebesar Rp.9.995.865.358.725,- atau 27,45 persen dari total pagu sebesar Rp. 36.414.810.050.000,- (Tiga Puluh Enam Triliun Empat Ratus Empat Belas Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan DIPA revisi ke-22 dengan rincian sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel 1
Alokasi Anggaran Sesuai DIPA Revisi ke-22
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Anggaran	Pagu DIPA Revisi 22 (Rp)	Total
HA. 6875 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	36.192.803.866.000	36.192.803.866.000
HA.6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	61.303.053.000	61.303.053.000
HA.6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	42.756.392.000	42.756.392.000
WA.6874 Dukungan Manajemen	117.946.739.000	117.946.739.000
JUMLAH	36.414.810.050.000	36.414.810.050.000

Laporan Badan Pangan Nasional Periode Bulan Desember Tahun 2024 khusus akan melaporkan pencapaian kinerja Satker Pusat (690590) Badan Pangan Nasional dengan target pada periode bulan Desember sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2.
Target Fisik dan Keuangan Bulan Desember sesuai DIPA Revisi 22
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

URAIAN		PAGU DIPA REVISI 22		TARGET DESEMBER (27,45%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA		36.414.810.050.000		9.995.865.358.725	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	36.296.863.311.000		9.963.488.978.870	
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	36.192.803.866.000		9.934.924.661.217	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.388.938.000	18 rekomendasi kebijakan	1.204.763.481	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.214.718.000	1 rekomendasi kebijakan	333.440.091	1
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.184.220.000	12 rekomendasi kebijakan	325.068.390	1
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	1.990.000.000	5 rekomendasi kebijakan	546.255.000	1
AEA	Koordinasi	17.408.923.000	3 Kegiatan	4.778.749.364	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	786.750.000	1 Kegiatan	215.962.875	1
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi	7.817.323.000	1 Kegiatan	2.145.855.164	1
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	8.804.850.000	1 Kegiatan	2.416.931.325	1

URAIAN		PAGU DIPA REVISI 22		TARGET DESEMBER (27,45%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.903.375.000	26 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	796.976.438	
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	501.375.000	6 NSPK	137.627.438	1
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.302.000.000	9 NSPK	357.399.000	2
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.100.000.000	11 NSPK	301.950.000	2
BEC	Bantuan Produk	36.123.470.353.000	125.601.122 Paket	9.915.892.611.899	
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pemerintah	36.123.470.353.000	283.642.980 Paket	9.915.892.611.899	
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.500.000.000	75 kelompok masyarakat	411.750.000	
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.500.000.000	75 kelompok masyarakat	411.750.000	10
QMA	Data dan Informasi Publik dan Informasi Publik	24.682.277.000	13 layanan, dokumen, publikasi, wilayah, peta, data dan lokasi	6.775.285.037	
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	7.199.647.000	3 Data	1.976.303.102	1
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.900.550.000	9 Data	4.364.700.975	1
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.582.080.000	1 Data	434.280.960	1
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.450.000.000	17 Unit	5.064.525.000	
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	16.450.000.000	12 Unit	4.515.525.000	0
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.000.000.000	5 Unit	549.000.000	0

URAIAN		PAGU DIPA REVISI 22		TARGET DESEMBER (27,45%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	61.303.053.000		16.827.688.049	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	7.761.197.000	13 rekomendasi kebijakan, kajian	2.130.448.577	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.123.000.000	1 rekomendasi kebijakan	857.263.500	1
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4.638.197.000	12 rekomendasi kebijakan	1.273.185.077	1
AEA	Koordinasi	32.808.181.000	3 Kegiatan	9.005.845.685	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	5.111.197.000	1 Kegiatan	1.403.023.577	1
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	27.696.984.000	2 Kegiatan	7.602.822.108	1
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	789.525.000	4 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman dan Standar	216.724.613	
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	4 NSPK	109.800.000	1
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	389.525.000	5 NSPK	106.924.613	1
QEA	Bantuan Masyarakat	17.653.550.000	180.001 orang	4.845.899.475	
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	13.567.000.000	180.000 orang	3.724.141.500	1
QEA.002	Bantuan Pangan Masyarakat dalam	4.086.550.000	1 orang	1.121.757.975	1

URAIAN		PAGU DIPA REVISI 22		TARGET DESEMBER (27,45%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
	rangka kewaspadaan pangan dan gizi				
QMA	Data dan Informasi Publik	2.290.600.000	2 layanan, dokumen, publikasi, wilayah, peta, data dan lokasi	628.769.700	
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.035.000.000	1 Data	284.107.500	1
QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.255.600.000	1 Data	344.662.200	1
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	42.756.392.000		11.736.629.604	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.063.900.000	11 rekomendasi kebijakan, kajian	566.540.550	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	115.500.000	3 rekomendasi kebijakan	31.704.750	1
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.948.400.000	8 rekomendasi kebijakan	534.835.800	1
AEA	Koordinasi	22.683.553.000	20 Kegiatan	6.226.635.299	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.853.109.000	11 Kegiatan	2.155.678.421	1
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar	10.521.222.000	8 Kegiatan	2.888.075.439	1

URAIAN		PAGU DIPA REVISI 22		TARGET DESEMBER (27,45%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
	Keamanan dan Mutu Pangan				
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.309.222.000	1 Kegiatan	1.182.881.439	1
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	1.506.900.000	13 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	413.644.050	
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	158.000.000	4 NSPK	43.371.000	1
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.200.000.000	7 NSPK	329.400.000	1
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	148.900.000	2 NSPK	40.873.050	1
PCA	Perizinan Produk	1.492.865.000	400 Produk, Keputusan	409.791.443	
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	1.492.865.000	400 Produk	409.791.443	
PEH	Promosi	4.037.257.000	1 Promosi, Kegiatan	1.108.227.047	
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	4.037.257.000	1 Kegiatan	1.108.227.047	1
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.795.427.000	7 kelompok Masyarakat	492.844.712	
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	1.795.427.000	7 kelompok Masyarakat	492.844.712	1

URAIAN		PAGU DIPA REVISI 22		TARGET DESEMBER (27,45%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.472.805.000	1 Produk, Laporan, Keputusan	678.784.973	
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.472.805.000	1 Laporan	678.784.973	1
QMA	Data dan Informasi Publik	643.185.000	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, 1 Peta, Data, Lokasi	176.554.283	
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	643.185.000	1 Data	176.554.283	1
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.060.500.000	7 Unit	1.663.607.250	
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	6.060.500.000	7 Unit	1.663.607.250	1
125.01. WA	Program Dukungan Manajemen	117.946.739.000		32.376.379.856	
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	117.946.739.000		30.080.610.360	
AEC	Kerjasama	2.392.119.000	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	656.636.666	
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	2.392.119.000	1 Dokumen	656.636.666	1
BMA	Data dan Informasi	6.187.277.000	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.698.407.537	
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	6.187.277.000	1 Layanan	1.698.407.537	1
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	88.881.955.000	19 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	24.398.096.648	



URAIAN		PAGU DIPA REVISI 22		TARGET DESEMBER (27,45%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
EBA.956	Layanan BMN	722.000.000	6 Layanan	198.189.000	1
EBA.957	Layanan Hukum	1.591.900.000	1 Layanan	436.976.550	1
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.822.000.000	8 Layanan	1.049.139.000	1
EBA.959	Layanan Protokoler	921.000.000	1 Layanan	252.814.500	1
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	950.000.000	1 Layanan	260.775.000	1
EBA.962	Layanan Umum	12.956.853.000	1 Layanan	3.556.656.149	1
EBA.994	Layanan Perkantoran	67.918.202.000	1 Layanan	18.643.546.449	1
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	871.700.000	34 Unit, m2, Paket	239.281.650	
EBB.951	Layanan Sarana Internal	871.700.000	34 Unit	239.281.650	2
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.816.005.000	342 orang, Layanan, Rekomendasi	1.047.493.373	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.816.005.000	342 orang	1.047.493.373	342
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15.797.683.000	30 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.336.463.984	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.328.583.000	12 Dokumen	1.737.196.034	1
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.100.000.000	5 Dokumen	301.950.000	1
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2.066.000.000	1 Dokumen	567.117.000	1
EBD.965	Layanan Audit Internal	6.303.100.000	12 Laporan	1.730.200.950	1



BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Badan Pangan Nasional akan melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 55 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.722.461.932.000,-. Alokasi anggaran tambahan melalui DIPA Revisi ke-8 Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2024 tanggal 30 Mei 2024, Badan Pangan Nasional mendapat alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp. 9.050.253.080.000,- (Sembilan Triliun Lima Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), sehingga total alokasi anggaran di Badan Pangan Nasional menjadi Rp.15.722.491.932.000,- untuk pelaksanaan 55 output/RO lingkup Badan Pangan Nasional. Pelaksanaan output/rincian output untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Sesuai dengan DIPA Revisi ke-22 Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2024 tanggal 25 Desember 2024, Anggaran Badan Pangan Nasional menjadi Rp. 36.414.810.050.000,- (Tiga Puluh Enam Triliun Empat Ratus Empat Belas Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk bantuan pangan Tahap II dan III (Oktober-Desember 2024). Realisasi keuangan pada bulan Desember Tahun 2024 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan per belanja dan realisasi fisik bulan Desember tahun 2024 per output lingkup Badan Pangan Nasional disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut:

Tabel 3
Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja per 31 Desember Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	52.742.755.000	52.254.692.521	99,07%
2.	Belanja Barang	36.479.959.289.000	36.306.877.758.712	99,53%
3.	Belanja Modal	33.369.957.000	33.205.192.349	99,51%
TOTAL		36.566.072.001.000	36.392.337.643.582	99,52%



Tabel 4
Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember Tahun 2024
Per Output dan Komponen Lingkup Badan Pangan Nasional

URAIAN		TARGET DESEMBER		REALISASI DESEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA		9.995.865.358.725		9.839.516.382.771	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	9.963.488.978.870		9.823.589.362.071	
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	9.934.924.661.217		9.810.085.288.351	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.204.763.481	18 rekomendasi kebijakan	105.262.890	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	333.440.091	1 rekomendasi kebijakan	62.172.890	1
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	325.068.390	12 rekomendasi kebijakan	2.200.000	1
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	546.255.000	5 rekomendasi kebijakan	40.890.000	1
AEA	Koordinasi	4.778.749.364	3 Kegiatan	1.851.453.819	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	215.962.875	1 Kegiatan	290.741.806	1
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi	2.145.855.164	1 Kegiatan	899.703.121	1
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi	2.416.931.325	1 Kegiatan	661.008.892	1

URAIAN		TARGET DESEMBER		REALISASI DESEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
	dan Cadangan Pangan				
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	796.976.438	26 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	148.220.277	
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	137.627.438	6 NSPK	0	1
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	357.399.000	9 NSPK	9.500.000	2
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	301.950.000	11 NSPK	138.720.277	2
BEC	Bantuan Produk	9.915.892.611.899	125.601.122 Paket	9.803.511.313.650	
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pemerintah	9.915.892.611.899	283.642.980 Paket	9.803.511.313.650	
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	411.750.000	75 kelompok masyarakat	161.029.950	
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	411.750.000	75 kelompok masyarakat	161.029.950	10
QMA	Data dan Informasi Publik dan Informasi Publik	6.775.285.037	13 layanan, dokumen, publikasi, wilayah, peta, data dan lokasi	2.175.488.608	
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	1.976.303.102	3 Data	728.823.098	1
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	4.364.700.975	9 Data	1.409.465.510	1
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	434.280.960	1 Data	37.200.000	1
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.064.525.000	17 Unit	2.132.519.157	
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	4.515.525.000	12 Unit	147.019.157	12

URAIAN		TARGET DESEMBER		REALISASI DESEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	549.000.000	5 Unit	1.985.500.000	5
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	16.827.688.049		10.952.791.698	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.130.448.577	13 rekomendasi kebijakan, kajian	248.362.332	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	857.263.500	1 rekomendasi kebijakan	162.648.144	1
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.273.185.077	12 rekomendasi kebijakan	85.714.188	12
AEA	Koordinasi	9.005.845.685	3 Kegiatan	9.933.450.708	3
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.403.023.577	1 Kegiatan	400.205.015	1
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	7.602.822.108	2 Kegiatan	9.533.245.693	2
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	216.724.613	9 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman dan Standar	131.590.254	
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	109.800.000	4 NSPK	32.547.754	4
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	106.924.613	5 NSPK	99.042.500	5
QEA	Bantuan Masyarakat	4.845.899.475	180.001 orang	355.420.170	
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	3.724.141.500	180.000 orang	50.219.500	180.000

URAIAN		TARGET DESEMBER		REALISASI DESEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
QEA.002	Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	1.121.757.975	1 orang	305.200.670	1
QMA	Data dan Informasi Publik	628.769.700	2 layanan, dokumen, publikasi, wilayah, peta, data dan lokasi	283.968.234	
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	284.107.500	1 Data	52.661.800	1
QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	344.662.200	1 Data	231.306.434	1
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	11.736.629.604		2.551.282.022	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	566.540.550	11 rekomendasi kebijakan, kajian	109.205.271	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	31.704.750	3 rekomendasi kebijakan	0	3
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	534.835.800	8 rekomendasi kebijakan	109.205.271	8
AEA	Koordinasi	6.226.635.299	20 Kegiatan	1.104.878.969	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2.155.678.421	11 Kegiatan	331.801.582	11
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	2.888.075.439	8 Kegiatan	405.788.307	8



URAIAN		TARGET DESEMBER		REALISASI DESEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1.182.881.439	1 Kegiatan	367.289.080	1
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	413.644.050	13 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	83.435.341	
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	43.371.000	4 NSPK	0	4
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	329.400.000	7 NSPK	81.435.341	7
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	40.873.050	2 NSPK	2.000.000	2
PCA	Perizinan Produk	409.791.443	400 Produk, Keputusan	216.113.675	
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	409.791.443	400 Produk	216.113.675	
PEH	Promosi	1.108.227.047	1 Promosi, Kegiatan	475.952.100	
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	1.108.227.047	1 Kegiatan	475.952.100	1
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	492.844.712	7 kelompok Masyarakat	279.276.742	
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	492.844.712	7 kelompok Masyarakat	279.276.742	7
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	678.784.973	1 Produk, Laporan, Keputusan	135.994.828	

URAIAN		TARGET DESEMBER		REALISASI DESEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	678.784.973	1 Laporan	135.994.828	1
QMA	Data dan Informasi Publik	176.554.283	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, 1 Peta, Data, Lokasi	146.425.096	
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	176.554.283	1 Data	146.425.096	1
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.663.607.250	7 Unit	0	
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	1.663.607.250	7 Unit	0	7
125.01. WA	Program Dukungan Manajemen	32.376.379.856		15.927.020.700	
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	32.376.379.856		15.927.020.700	
AEC	Kerjasama	656.636.666	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	274.747.235	
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	656.636.666	1 Dokumen	274.747.235	
BMA	Data dan Informasi	1.698.407.537	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.027.643.446	1
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	1.698.407.537	1 Layanan	2.027.643.446	1
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.398.096.648	19 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	9.905.802.431	
EBA.956	Layanan BMN	198.189.000	6 Layanan	11.151.716	6
EBA.957	Layanan Hukum	436.976.550	1 Layanan	155.079.122	1
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.049.139.000	8 Layanan	690.421.706	8
EBA.959	Layanan Protokoler	252.814.500	1 Layanan	73.068.258	1



URAIAN		TARGET DESEMBER		REALISASI DESEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	260.775.000	1 Layanan	91.342.714	1
EBA.962	Layanan Umum	3.556.656.149	1 Layanan	1.096.343.593	1
EBA.994	Layanan Perkantoran	18.643.546.449	1 Layanan	7.788.395.322	1
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	239.281.650	34 Unit, m2, Paket	188.279.408	
EBB.951	Layanan Sarana Internal	239.281.650	34 Unit	188.279.408	34
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.047.493.373	342 orang, Layanan, Rekomendasi	530.813.671	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.047.493.373	342 orang	530.813.671	342
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.336.463.984	30 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.999.734.509	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.737.196.034	12 Dokumen	1.561.523.949	12
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	301.950.000	5 Dokumen	204.811.114	5
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	567.117.000	1 Dokumen	99.069.206	1
EBD.965	Layanan Audit Internal	1.730.200.950	12 Laporan	1.134.330.240	12

Sebagaimana tabel 4 di atas, RO yang ter-realisis pada bulan Desember Tahun 2024 yaitu:

- a) **Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dengan realisasi anggaran pada bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 36.187.376.553.000, dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:
 - a) **Direktorat Ketersediaan Pangan,** RO yang terealisasi : 1) ABR Rekom Kebijakan Ketersediaan Pangan : Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah, 2) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan

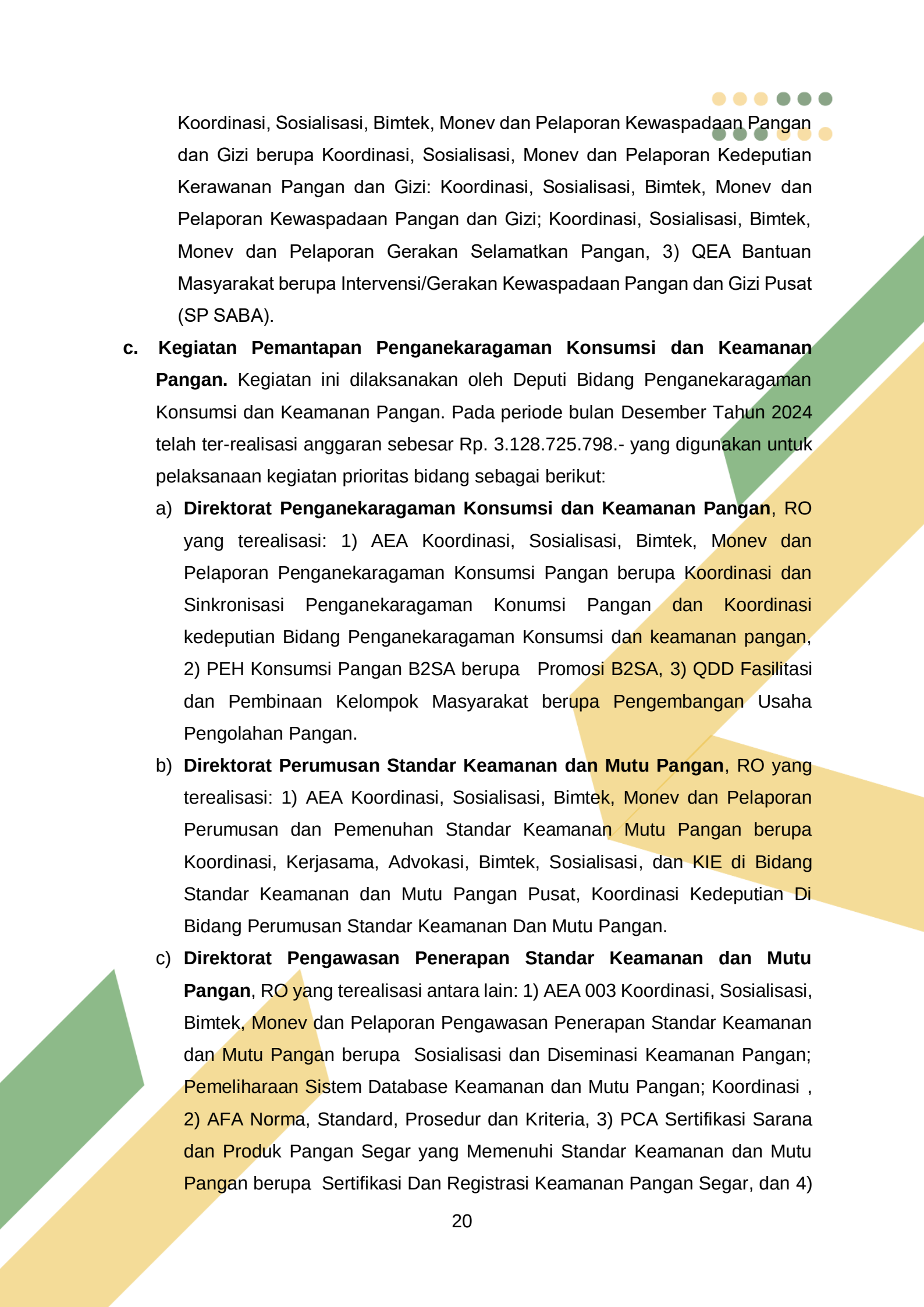


Pelaporan Ketersediaan Pangan : Koordinasi, bimtek, pelaporan ketersediaan pangan, 3) AFA Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan : Penyusunan NSPK Survei Stok Akhir Tahun dan 4) QMA Data dan Informasi Ketersediaan Pangan : Penguatan Data dan Informasi Ketersediaan Pangan.

- b) **Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**, RO yang terealisasi antara lain : 1) ABR Rekom Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan berupa Pengawasan implementasi regulasi harga pangan HPP, HET, HAP dan kebijakan lainnya, 2) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan : Koordinasi pemantapan stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan 3) AFA Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan: NSPK Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan, QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, dan QMA Data dan Informasi Publik
- c) **Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan**, RO yang terealisasi antara lain: 1) ABR Rekom Kebijakan Distribusi dan Pangan : Penguatan Cadangan Pangan dan Penguatan Distribusi Pangan, 2) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan : Review Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan Pemerintah, AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, dan QMA Data dan Informasi Publik.

b. **Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Pada periode bulan Desember Tahun 2024 telah ter-realisasi anggaran sebesar Rp 3.981.674.962.- yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

- a) **Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan** RO yang terealisasi: 1) ABR Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan : Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dan Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pusat, 2) AFA Koordinasi, 3) QEA Bantuan Pangan Dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Intervensi pengendalian kerawanan pangan, dan 4) QMA Data dan Informasi Publik.
- b) **Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi**, RO yang terealisasi antara lain: 1) ABR Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi berupa Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, 2) AEA



Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi berupa Koordinasi, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan Kedeputan Kerawanan Pangan dan Gizi: Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi; Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Gerakan Selamatkan Pangan, 3) QEA Bantuan Masyarakat berupa Intervensi/Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pusat (SP SABA).

c. **Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pada periode bulan Desember Tahun 2024 telah ter-realisasi anggaran sebesar Rp. 3.128.725.798.- yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

- a) **Direktorat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, RO** yang terealisasi: 1) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berupa Koordinasi dan Sinkronisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Koordinasi kedeputan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan keamanan pangan, 2) PEH Konsumsi Pangan B2SA berupa Promosi B2SA, 3) QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat berupa Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan.
- b) **Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, RO** yang terealisasi: 1) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan Mutu Pangan berupa Koordinasi, Kerjasama, Advokasi, Bimtek, Sosialisasi, dan KIE di Bidang Standar Keamanan dan Mutu Pangan Pusat, Koordinasi Kedeputan Di Bidang Perumusan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan.
- c) **Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, RO** yang terealisasi antara lain: 1) AEA 003 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan berupa Sosialisasi dan Diseminasi Keamanan Pangan; Pemeliharaan Sistem Database Keamanan dan Mutu Pangan; Koordinasi , 2) AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, 3) PCA Sertifikasi Sarana dan Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan berupa Sertifikasi Dan Registrasi Keamanan Pangan Segar, dan 4)



QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk berupa Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan.

d. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama pada periode bulan Desember Tahun 2024 telah ter-realisasi anggaran sebesar Rp. 15.927.020.700,- dengan prioritas kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a) **Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas**, RO yang terealisasi: 1) AEC Kerjasama Bidang Pangan, 2) EBA958 Layanan Hubungan Masyarakat, 3) EBD952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran berupa DIPA 19, 20, 21 dan 22 dan 4) EBD953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi berupa Laporan Kinerja Badan pangan Nasional Tahun 2024.
- b) **Pusat Data dan Informasi**, RO yang terealisasi: 1) BMA Data dan Informasi Publik berupa 1) penyusunan draf format resmi Kerangka Acuan Kerja clearance Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) Badan Pangan Nasional. 2) Telah dilakukan penyusunan draf format resmi dokumen Software Requirement System dalam pengembangan aplikasi SPBE. 3) Telah dilakukan penyusunan draf Surat Keputusan (SK) Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Badan Pangan Nasional. 4). Arsitektur : Telah dilaksanakan sosialisasi implementasi Arsitektur SPBE untuk evaluasi anggaran belanja TIK SPBE pada tanggal 3 Desember 2024. Pada pertemuan ini disampaikan mengenai integrasi aplikasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE sebagai aplikasi Ega untuk clearance sehingga harus segera dilakukan perbaikan dan penyempurnaan arsitektur SPBE di SIA SPBE. 5) Telah dilaksanakan reviu Peta Rencana Arsitektur SPBE untuk disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja yang menghasilkan matriks Gap Pengembangan Aplikasi Badan Pangan, sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi implementasi Arsitektur SPBE pada tanggal 3 Desember 2024. Hasil reviu berupa perbaikan lampiran pada SK Arsitektur SPBE. 6) Telah dilakukan penguatan dan pendalaman domain keamanan dan infrastruktur SPBE di aplikasi SIA SPBE dan pencatatan di SK Arsitektur SPBE. .
- c) **Biro Keuangan Pengadaan dan Umum** RO yang terealisasi antara lain: 1) EBA956 Layanan BMN, 2) EBA959 Layanan Protokoler, 3) EBA962 Layanan

Umum, 4) EBB951 Layanan Sarana Internal, dan 5) EBD955 Layanan Manajemen Keuangan.

- d) **Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Hukum**, RO yang terealisasi: 1) EBA957 Layanan Hukum, 2) EBA960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, dan 3) EBC954 Layanan Manajemen SDM.
- e) **Inspektorat** RO yang terealisasi: 1) EBD965 Layanan Audit Internal.

Realisasi anggaran Badan Pangan Nasional berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sampai bulan Desember mencapai Rp 36.239.428.171.705,- atau 99,56% dari alokasi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2024 sebesar Rp. 36.401.349.789.000,-. Jika dibandingkan dengan target bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 9.995.865.358.725,- realisasi sebesar 99,44% atau setara Rp. 9.839.516.382.771,-. Rincian per kegiatan sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional
Posisi sampai bulan Desember Tahun 2024

URAIAN		PAGU		REALISASI		
		DIPA	REVISI	SP2D	% DIPA	% REVISI
JUMLAH SELURUHNYA		36.414.810.050.000	36.401.349.789.000	36.239.428.171.705	99,92%	99,56 %
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	36.296.863.311.000	36.284.859.504.000	36.125.600.133.551	99,53%	99,56 %
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	36.192.803.866.000	36.187.376.553.000	36.033.520.832.879	99,56%	99,57%
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	61.303.053.000	55.844.543.000	51.647.236.175	84,25%	92,48%
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	42.756.392.000	41.638.408.000	40.432.064.497	94,56%	97,10%
WA	Program Dukungan Manajemen	117.946.739.000	116.490.285.000	113.828.038.154	96,51%	97,71%
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	117.946.739.000	116.490.285.000	113.828.038.154	96,51%	97,71%

Jika dibandingkan antara target anggaran bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 9.995.865.358.725,- dengan realisasi anggaran sebesar 99,44 % atau setara Rp. 9.839.516.382.771,-. Rincian per kegiatan sebagaimana Tabel 6 berikut :

Tabel 6
Realisasi Keuangan Bulan Desember Tahun 2024 Per Kegiatan
Lingkup Badan Pangan Nasional

Program dan Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pangan Nasional	9.995.865.358.725	9.839.516.382.771	98,44
6875. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	9.934.924.661.217	9.810.085.288.351	98,74
6876. Pemantapan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	16.827.688.049	10.952.791.698	65,09
6877. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	11.736.629.604	2.551.282.022	21,74
WA6874. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	32.376.379.856	15.927.020.700	49,19

Dari Tabel 6 di atas, realisasi keuangan tertinggi pada kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan capaian 98,74 %. Hal ini disebabkan karena realisasi pembayaran belanja pegawai dan belanja operasional lainnya, sedangkan pada kegiatan lainnya secara realisasi keuangan sudah berjalan terutama untuk persiapan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan serapan paling rendah adalah pada kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebesar 21,74%. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan Sebagian besar telah dilaksanakan pada periode bulan sebelumnya, sehingga anggaran yang teralisasi hanya sisa dari pagu anggaran.

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan Desember Tahun 2024 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana tabel 4, kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah :

- 1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dengan realisasi anggaran pada bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 9.810.085.288.351, dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

a. **Direktorat Ketersediaan Pangan**, melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Kebutuhan pada Proyeksi Neraca Pangan

Rapat Koordinasi Pembahasan Kebutuhan pada Proyeksi Neraca Pangan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 di R.R.Nusantara II Lantai 4 Kantor Badan Pangan Nasional. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi saat ini terkait sumber data yang digunakan untuk menghitung kebutuhan non-rumah tangga yang selama ini digunakan pada proyeksi neraca pangan yaitu Bapok 2017 dirasa membutuhkan pemutakhiran survey untuk dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan BAPANAS, serta dihadiri oleh perwakilan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan perwakilan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, BPS. Poin-poin hasil pertemuan: a. Survey Bapok terakhir yang dilakukan oleh BPS adalah Bapok 2019, namun untuk perhitungan proyeksi neraca pangan, BPS menyarankan untuk menggunakan Bapok 2017 dikarenakan survey Bapok yang resmi dilakukan pada tahun 2017. b. Dalam penyusunan proyeksi neraca pangan, data Bapok 2017 digunakan untuk menghitung angka konsumsi/kebutuhan non-rumah tangga. Namun dirasa data Bapok 2017 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini (Tahun 2024). c. BPS menyampaikan asal usul survey kebutuhan non-rumah tangga dilakukan berdasarkan arahan dari pimpinan yang mempertanyakan kebutuhan di level non-rumah tangga dengan menggunakan anggaran dari BKP pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2014 dan 2017 menggunakan anggaran dari BPS dan survey khusus Bapok untuk tahun 2019 dan 2021 tidak ada karena anggaran tidak mencukupi. d. Survey Bahan Pokok saat ini sudah menjadi tuisi di Bapanas, sehingga BPS menyerahkan kepada Bapanas untuk dapat melakukan survey dan BPS akan mengawal metode survey yang digunakan. e. Institusi-institusi yang masuk pada survey Bapok diantaranya UMKM dan hotel, asrama, lapas, panti asuhan, dan data rumah tangga dari Susenas.

Rencana Tindak Lanjut:

Bapanas perlu melakukan survei kebutuhan yang terbaru karena saat ini kewenangan untuk menghitung kebutuhan pangan.



2. Pertemuan FGD (Focus Group Discussion) Sistem Informasi Monitoring Stok Pangan (Simonstok)

Pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 di Ruang Rapat Badan Pangan Nasional. Pertemuan FGD Evaluasi Sistem Monitoring Stok Pangan (Simonstok) bertujuan untuk mendapatkan justifikasi dari para ahli terkait hasil Simonstok dari sudut pandang peneliti dan langkah yang perlu dilakukan untuk perbaikan kualitas data Simonstok. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh para peneliti, antara lain : Prof. Achmad Suryana (PSEKP), Prof. Benny Rachman (BRIN), Prof. Bustanul Arifin (UNILA), dan Dr. Farit A Effendy (IPB) serta Fungsional AKP lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan. Point hasil pertemuan sebagai berikut:

- a. Isu kritikal pada SIMONSTOK yaitu sampel pada komoditas belum ideal dan sebaran sampel yang belum merata di seluruh wilayah di Indonesia, hasil Simonstok belum dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena survey Simonstok yang dilakukan pada level nasional serta perhitungan untuk kontribusi provinsi belum sampai ke kabupaten/kota.
- b. Menurut pendapat para ahli bahwa metode yang digunakan pada Simonstok telah progresif dan sesuai kebutuhan SIMONSTOK dengan metode stratified random sampling (teknik pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa strata atau kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu) yang lebih representatif, akurat dan efisien.
- c. Metode yang direkomendasikan oleh para ahli untuk menggambarkan situasi stok nasional yaitu perpaduan antara pelaporan dan metode sampel (stratified random sampling). Metode sampel ini dilakukan pada stok yang berada di masyarakat seperti penggilingan dan pedagang.
- d. Solusi yang dilakukan agar tingkat eror pada Simonstok tidak terlalu tinggi, maka perlu dilakukan pelatihan manajemen survey kepada petugas enumerator dan pemilihan sampel yang tepat sesuai target.
- e. Upaya peningkatan kualitas data SIMONSTOK melalui penambahan sampel pada komoditas yang masih kurang dan pemberian insentif/imbalance bagi para responden yang memberikan informasi.

3. Laporan Laporan FGD Ketahanan Stok Pangan Komoditas Pangan Strategis dalam Proyeksi Neraca Pangan.



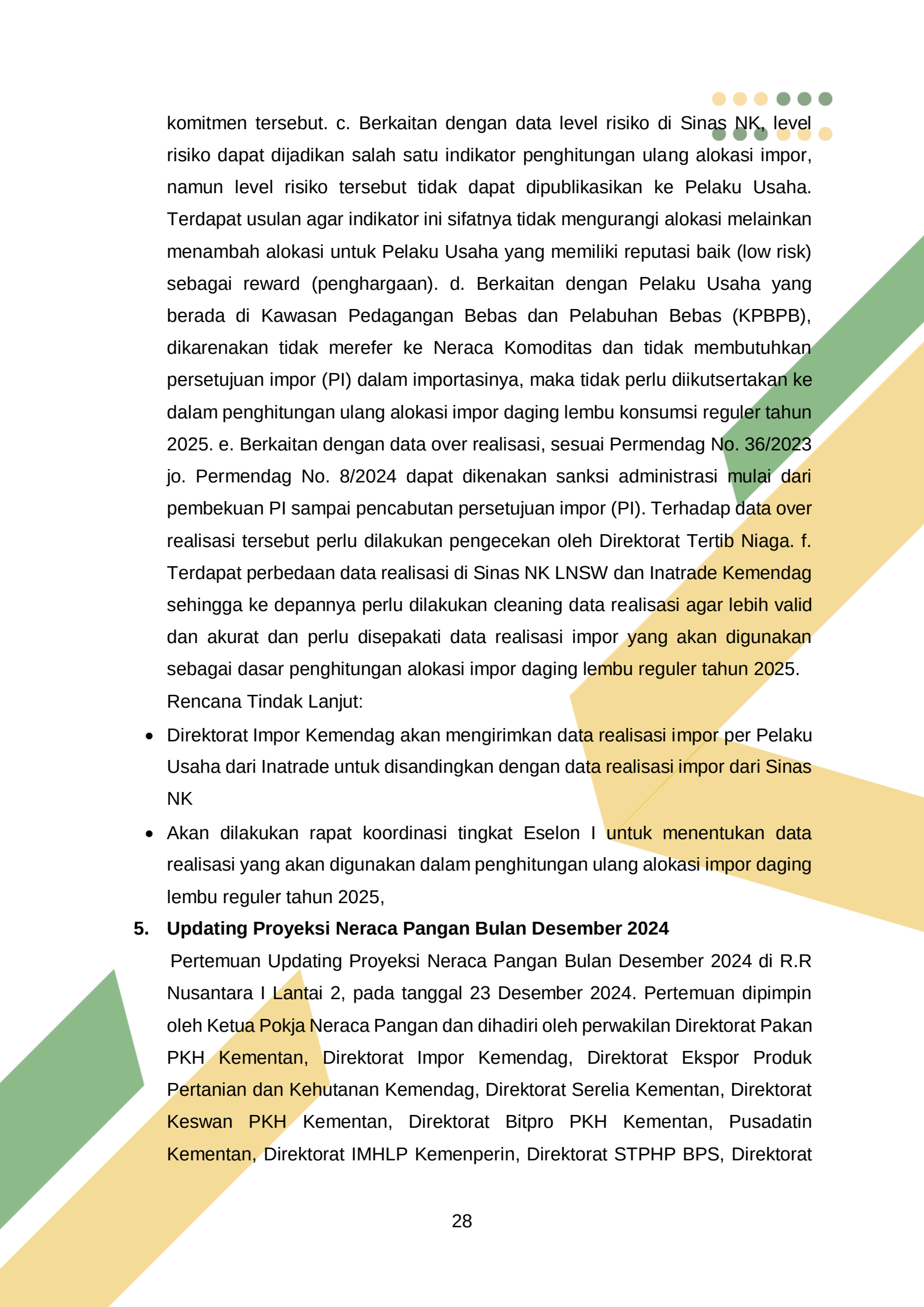
Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 di R.R.Nusantara II Lantai 4, Kantor BAPANAS. Pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun masukan terkait range ketahanan stok dikatakan aman, waspada dan rentan dan evaluasi proyeksi neraca pangan wilayah terkait perhitungan ketersediaan pangan dari perdagangan antar wilayah. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan BAPANAS, serta dihadiri oleh Prof. Dr. Benny Rachman, M.Si (Peneliti Bidang Sosial Ekonomi Pertanian BRIN), Prof.Dr.Ir.Achmad Suryana, MS perwakilan (perwakilan PSEKP Kementan), Prof.Dr.Ir.Bustanul Arifin, M.Sc (Guru Besar Fakultas Pertanian UNILA), Dr.Rasidin Karo Karo S, S.P., M.Si (Dosen IPB), Direktur SPHP BAPANAS dan pegawai lingkup BAPANAS. Poin-poin hasil pertemuan: a. Penentuan indikator ketahanan stok pangan dikatakan aman, waspada, dan rentan sampai saat ini belum ditetapkan, sehingga perlu dilakukan kajian sebagai dasar penetapan batasan range ketahanan stok pangan strategis. 9 Direktorat Ketersediaan Pangan b. Perhitungan ketersediaan pangan dari perdagangan antarwilayah relatif sulit dilakukan. Untuk itu perlu adanya kajian pendekatan data perdagangan antarwilayah agar penyusunan neraca pangan menjadi lebih akurat c. Berdasarkan data harga dan pasokan dapat disimpulkan bahwa peningkatan harga tidak selalu berkorelasi dengan kurangnya stok di pasaran, tetapi dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain di hulu, seperti pasokan yang telat didistribusikan, peningkatan harga di produsen, dll. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalam penyusunan perhitungan proyeksi neraca pangan diharapkan mempertimbangkan faktor-faktor lain di lapangan sebagai variabel koreksi. d. Prof. Dr. Benny Rachman, M.Si mengusulkan estimasi stok pangan dengan pendekatan dari perspektif kuantum dan durasi. Pendekatan dilakukan dengan menganalisis neraca pangan dan kuantum CPP bulanan dalam 3- 5 tahun terakhir serta menghitung rata-rata shortage pada saat HBKN. Perhitungan kuantum perbulan untuk mengestimasi durasi ketahanan cadangan pangan dan menghitung nilai koefisien neraca pangan per komoditas dengan mempertimbangkan bulan-bulan shortage. e. Prof.Dr.Ir.Achmad Suryana, MS menyampaikan, perlu melakukan kajian per daerah melalui universitas setempat dengan bekerja sama dengan Lembaga penelitian/BRIN atau meminta bantuan BI terkait pasokan dan stok yang aman untuk suatu komoditas di pasar-pasar induk setempat untuk mengetahui food strategic



reserved (stok aman minimal yang perlu dimiliki oleh pemerintah) serta rice buffer stock (stok ideal yang dimiliki pemerintah). f. Prof.Dr.Ir.Bustanul Arifin, M.Sc menyampaikan perlu mendorong daerah untuk melakukan survey stok di masyarakat, kajian di wilayah masingmasing, dan perencanaan CPPD. Selain itu, Akademisi daerah perlu dilibatkan sebagai Tim yang bekerja sama untuk membina terhadap daerahnya untuk melakukan perhitungan proyeksi neraca pangan wilayah. g. Dr.Rasidin Karo Karo S, S.P., M.Si menyampaikan perlu pendekatan deterministik dan stokastik. Kelemahan stokastik adalah berbasis data, sehingga datanya harus lengkap. Sehingga pergerakan harga dapat digunakan untuk menduga, namun tetap perlu melihat data barang keluar masuk. 10 Direktorat Ketersediaan Pangan Rencana Tindak Lanjut: Hasil rapat akan menjadi landasan untuk melakukan kajian Ketahanan stok pangan dan melakukan kajian pemodelan perdagangan antar wilayah (Pangan masuk dan pangan keluar)

4. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penetapan Neraca Komoditas Daging Lembu Tahun 2025

Rapat dilaksanakan tanggal 19 Desember 2024 di Ruang Rapat Nusantara II Bapanas secara daring dan luring. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi dan solusi terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan penghitungan ulang alokasi impor daging lembu konsumsi reguler tahun 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas dan di hadir oleh Asdep Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kemenko Pangan, Direktur Kesmavet Kementan, Perwakilan Direktorat Impor Kemendag, Perwakilan Direktorat Tertib Niaga, Perwakilan Direktorat PPLDK LNSW, Perwakilan Kepala Satgas Pangan. Poin-poin Hasil Pertemuan: a. Berkaitan dengan komitmen pelaku usaha, Ditjen PKH Kementan telah meminta komitmen Pelaku Usaha untuk mengimpor sapi perah/sapi indukan bakalan dan berharap agar komitmen tersebut dapat dijadikan salah satu indikator dalam penghitungan ulang alokasi impor tahun 2025. Pelaku usaha yang menyampaikan komitmen dapat diberikan tambahan alokasi sebagai reward (penghargaan). b. Informasi dari Direktorat Kesmavet Kementan, saat ini sudah terdapat 68 Pelaku Usaha yang menyampaikan surat komitmen dan perlu dilakukan konfirmasi/sosialisasi kembali kepada Pelaku Usaha yang belum menyampaikan komitmen atau belum mendapatkan informasi mengenai



komitmen tersebut. c. Berkaitan dengan data level risiko di Sinas NK, level risiko dapat dijadikan salah satu indikator penghitungan ulang alokasi impor, namun level risiko tersebut tidak dapat dipublikasikan ke Pelaku Usaha. Terdapat usulan agar indikator ini sifatnya tidak mengurangi alokasi melainkan menambah alokasi untuk Pelaku Usaha yang memiliki reputasi baik (low risk) sebagai reward (penghargaan). d. Berkaitan dengan Pelaku Usaha yang berada di Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dikarenakan tidak merefer ke Neraca Komoditas dan tidak membutuhkan persetujuan impor (PI) dalam importasinya, maka tidak perlu diikutsertakan ke dalam penghitungan ulang alokasi impor daging lembu konsumsi reguler tahun 2025. e. Berkaitan dengan data over realisasi, sesuai Permendag No. 36/2023 jo. Permendag No. 8/2024 dapat dikenakan sanksi administrasi mulai dari pembekuan PI sampai pencabutan persetujuan impor (PI). Terhadap data over realisasi tersebut perlu dilakukan pengecekan oleh Direktorat Tertib Niaga. f. Terdapat perbedaan data realisasi di Sinas NK LNSW dan Inatrade Kemendag sehingga ke depannya perlu dilakukan cleaning data realisasi agar lebih valid dan akurat dan perlu disepakati data realisasi impor yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan alokasi impor daging lembu reguler tahun 2025.

Rencana Tindak Lanjut:

- Direktorat Impor Kemendag akan mengirimkan data realisasi impor per Pelaku Usaha dari Inatrade untuk disandingkan dengan data realisasi impor dari Sinas NK
- Akan dilakukan rapat koordinasi tingkat Eselon I untuk menentukan data realisasi yang akan digunakan dalam penghitungan ulang alokasi impor daging lembu reguler tahun 2025,

5. Updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan Desember 2024

Pertemuan Updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan Desember 2024 di R.R Nusantara I Lantai 2, pada tanggal 23 Desember 2024. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Pokja Neraca Pangan dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pakan PKH Kementan, Direktorat Impor Kemendag, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag, Direktorat Serelia Kementan, Direktorat Keswan PKH Kementan, Direktorat Bitpro PKH Kementan, Pusadatin Kementan, Direktorat IMHLP Kemenperin, Direktorat STPHP BPS, Direktorat



Statistik Distribusi BPS, Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kelautan BPS, Direktorat Kesejahteraan Rakyat BPS, Supply chain dan pelayanan publik Perum BULOG, serta observer dari perwakilan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, perwakilan Kemenko Pangan, Dinas Pangan Wilayah Prov. NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, serta Lingkup fungsional Direktorat Ketersediaan Pangan. Poin-poin hasil pertemuan: a. Berdasarkan hasil updating proyeksi neraca pangan bulan Desember 2024, secara keseluruhan diperkirakan neraca/stok sampai dengan bulan Desember 2024 aman untuk semua komoditas. b. Perkiraan impor CBP Perum BULOG yang masuk di bulan desember sebesar 512.392 Ton sehingga total impor CBP sampai akhir tahun 2024 sebesar 3.777.477 Ton, hal ini menurun dari target sebelumnya yaitu 4.048.410 Ton. c. Produksi beras dan jagung tahun 2024 yang bersumber dari KSA BPS merupakan angka sementara dan akan menjadi angka tetap pada bulan Maret 2025 d. PKH Kementan mengusulkan untuk menambah data produksi daging sapi/kerbau lokal dari pemotongan tidak tercatat (selain data RPH/TPH dan luar RPH/TPH) namun demikian jika ditambahkan data tersebut, neraca/stok akhir terlalu besar sehingga perlu dicek kembali dengan data stok riil daging di importir. e. Kebutuhan rumah tangga menggunakan susenas TW I tahun 2024, sehingga dilakukan penyesuaian angka kebutuhan tahun 2024 pada proyeksi neraca pangan. Rencana Tindak Lanjut : Bapanas akan mengirimkan hasil updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan Desember 2024 kepada Kementerian/Lembaga terkait.

6. Rapat Evaluasi Proyeksi Neraca Pangan Wilay

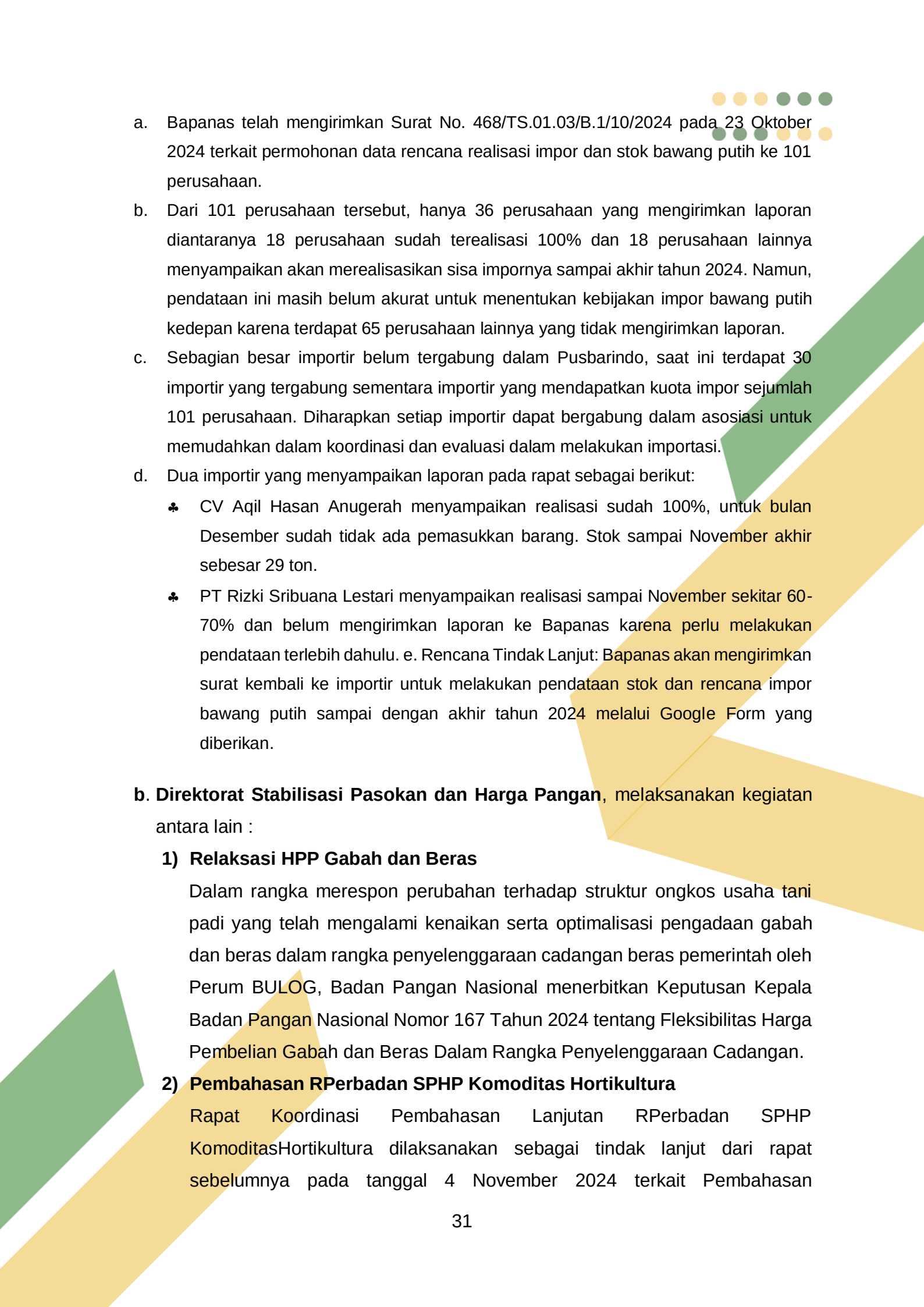
Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2024 yang dilakukan di R.R. Nusantara II Gedung E Bapanas. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi metode tatacara penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah yang sudah ada dan mencari solusi terkait pemodelan perhitungan perdagangan antar wilayah. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan BAPANAS, serta dihadiri oleh narasumber yaitu Bapak Rasidin (tenaga ahli dan dosen statistik IPB) dan Bapak Ikin Sodikin (Direktorat DCP Bapanas), serta pegawai lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas. Poin-poin hasil pertemuan: a. Metode untuk menghitung ketersediaan pangan yaitu dengan menjumlahkan Stok Awal ditambah Produksi ditambah barang



masuk dan dikurangi barang keluar (perdagangan antar wilayah). Namun sampai dengan saat ini, di tingkat Provinsi dan Kab/Kota masih terkendala dalam mendapatkan data perdagangan antar wilayah. Sehingga hasil akhir perhitungan neraca menjadi kurang masuk akal/wajar. b. Selain itu, evaluasi dari penyusunan proyeksi neraca pangan yang telah dilakukan selama ini yaitu hasil perhitungan neraca yang tidak sesuai dengan stok yang tersedia di lapangan. c. Sebelumnya, Direktur DCP Bapanas yaitu Ibu Rahmi sudah pernah membuat aplikasi yang bernama Propangan. Aplikasi ini berfungsi untuk menghitung proyeksi neraca pangan satu tahun kedepan berdasarkan historis data series yang diinput dan kemudian ditemukan pemodelan proyeksi neraca pangan. d. Berdasarkan hasil diskusi, dikarenakan ketidak-adaannya data barang masuk dan barang keluar antar wilayah sehingga diperlukan pemodelan awal dengan mengunci data neraca akhir selama 1 tahun ke depan dengan menggunakan estimasi stok yang bisa dikatakan aman untuk suatu wilayah dan menggunakan pendekatan harga sebagai variable untuk menganalisis ketersediaan stok. e. Setelah didapatkan pemodelan perhitungan perdagangan antar wilayah, untuk tahun selanjutnya perhitungan perdagangan antar wilayah ini dapat menggunakan proksi perkembangan harga bulanan untuk mendapatkan angka neraca akhir setiap bulan. f. Saran dari narasumber, harapannya Direktorat Ketersediaan Pangan dapat menjalin koordinasi dengan K/L terkait yang mengampu pengumpulan data perdagangan antar wilayah dan harapannya jembatan timbang dapat difungsikan kembali agar dapat membantu dalam mendukung ketersediaan data perdangan antar wilayah. Rencana Tindak Lanjut: Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas akan mengidentifikasi kebutuhan data yang akan digunakan untuk dilakukan pemodelan perhitungan perdagangan antar wilayah

7. Rapat Evaluasi Ketersediaan Stok Bawang Putih Akhir Tahun 2024

Rapat dilaksanakan pada Kamis, 28 November 2024. Rapat ini bertujuan untuk melakukan pendataan stok dan rencana impor bawang putih sampai akhir tahun 2024 dari importir dan asosiasi. Rapat dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas dan dihadiri oleh Ketua Umum Pusbarindo serta pelaku usaha/importir bawang putih. Poin-Poin Hasil Pertemuan:

- 
- a. Bapanas telah mengirimkan Surat No. 468/TS.01.03/B.1/10/2024 pada 23 Oktober 2024 terkait permohonan data rencana realisasi impor dan stok bawang putih ke 101 perusahaan.
- b. Dari 101 perusahaan tersebut, hanya 36 perusahaan yang mengirimkan laporan diantaranya 18 perusahaan sudah terealisasi 100% dan 18 perusahaan lainnya menyampaikan akan merealisasikan sisa impornya sampai akhir tahun 2024. Namun, pendataan ini masih belum akurat untuk menentukan kebijakan impor bawang putih kedepan karena terdapat 65 perusahaan lainnya yang tidak mengirimkan laporan.
- c. Sebagian besar importir belum tergabung dalam Pusbarindo, saat ini terdapat 30 importir yang tergabung sementara importir yang mendapatkan kuota impor sejumlah 101 perusahaan. Diharapkan setiap importir dapat bergabung dalam asosiasi untuk memudahkan dalam koordinasi dan evaluasi dalam melakukan importasi.
- d. Dua importir yang menyampaikan laporan pada rapat sebagai berikut:
- ♣ CV Aqil Hasan Anugerah menyampaikan realisasi sudah 100%, untuk bulan Desember sudah tidak ada pemasukkan barang. Stok sampai November akhir sebesar 29 ton.
 - ♣ PT Rizki Sribuana Lestari menyampaikan realisasi sampai November sekitar 60-70% dan belum mengirimkan laporan ke Bapanas karena perlu melakukan pendataan terlebih dahulu.

b. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, melaksanakan kegiatan antara lain :

1) Relaksasi HPP Gabah dan Beras

Dalam rangka merespon perubahan terhadap struktur ongkos usaha tani padi yang telah mengalami kenaikan serta optimalisasi pengadaan gabah dan beras dalam rangka penyelenggaraan cadangan beras pemerintah oleh Perum BULOG, Badan Pangan Nasional menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan.

2) Pembahasan RPerbadan SPHP Komoditas Hortikultura

Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan RPerbadan SPHP Komoditas Hortikultura dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada tanggal 4 November 2024 terkait Pembahasan



RPerbadan SPHP Komoditas Hortikultura. Hasil Rapat Koordinasi sebagai berikut:

- a. Seluruh peserta rapat mendukung penyusunan RPerbadan SPHP Komoditas Hortikultura, karena dianggap menjadi instrumen yang sudah lama ditunggu untuk melindungi petani serta intervensi ketika terjadi gejolak harga (anjlok) di Tingkat Produsen.
- b. Perwakilan ID FOOD menyatakan perlu memisahkan antara produk lokal dan impor (bawang putih dengan komoditas lokal lain seperti bawang merah dan cabai). Perlu mengetahui kebutuhan market seperti apa serta perlu mengatur regulasi importasi pasar cabai dari India agar tidak merugikan. Selain itu perlu adanya pola-pola yang lain dari supply chain pasar yang ada, serta memperhatikan kebutuhan dari horeka-horeka yang ada, terkait channel saluran selain sebagai CPP. Hal ini dapat diintegrasikan dalam pola-pola pengadaan dan penyaluran dalam pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Produsen dan di Tingkat Konsumen oleh Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.
- c. Perwakilan Perum BULOG menyatakan butuh aturan yang fleksibel dan memastikan terkait mekanisme penyerapan di produsen (pengadaan), apakah dari asosiasi atau dari yang lain. Terkait konsumen lebih dibuat umum, karena kebutuhan hortikultura tidak hanya di konsumen akhir tetapi ada di UMKM. Selain itu terkait indikator gejolak Harga Produsen, perlu dilakukan upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Produsen dalam rangka pencegahan gejolak harga, sehingga momentum intervensi tepat dan tidak terlambat.
- d. Perwakilan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian mendukung penyusunan RPerbadan ini karena dapat menjadi instrumen yang bersifat permanen dalam melakukan intervensi anjloknya harga di Tingkat Produsen serta intervensi pada saat harga di Tingkat Konsumen melonjak tinggi.
- e. Beberapa usulan revisi dan tambahan pasal sebagai berikut:
 1. Koreksi terhadap definisi konsumen;
 2. Penambahan Pasal 5 ayat 2 terkait pengadaan di Tingkat Konsumen;
 3. Penambahan Pasal 5 ayat 4 tentang pengadaan bawang putih dalam pelaksanaan SPHP sudah termasuk dalam rumusan “pengadaan”



dari Produsen. Produsen telah didefinisikan dalam ketentuan umum yaitu petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/importir/pelaku usaha pangan yang memproduksi dan/atau menyediakan komoditas pangan;

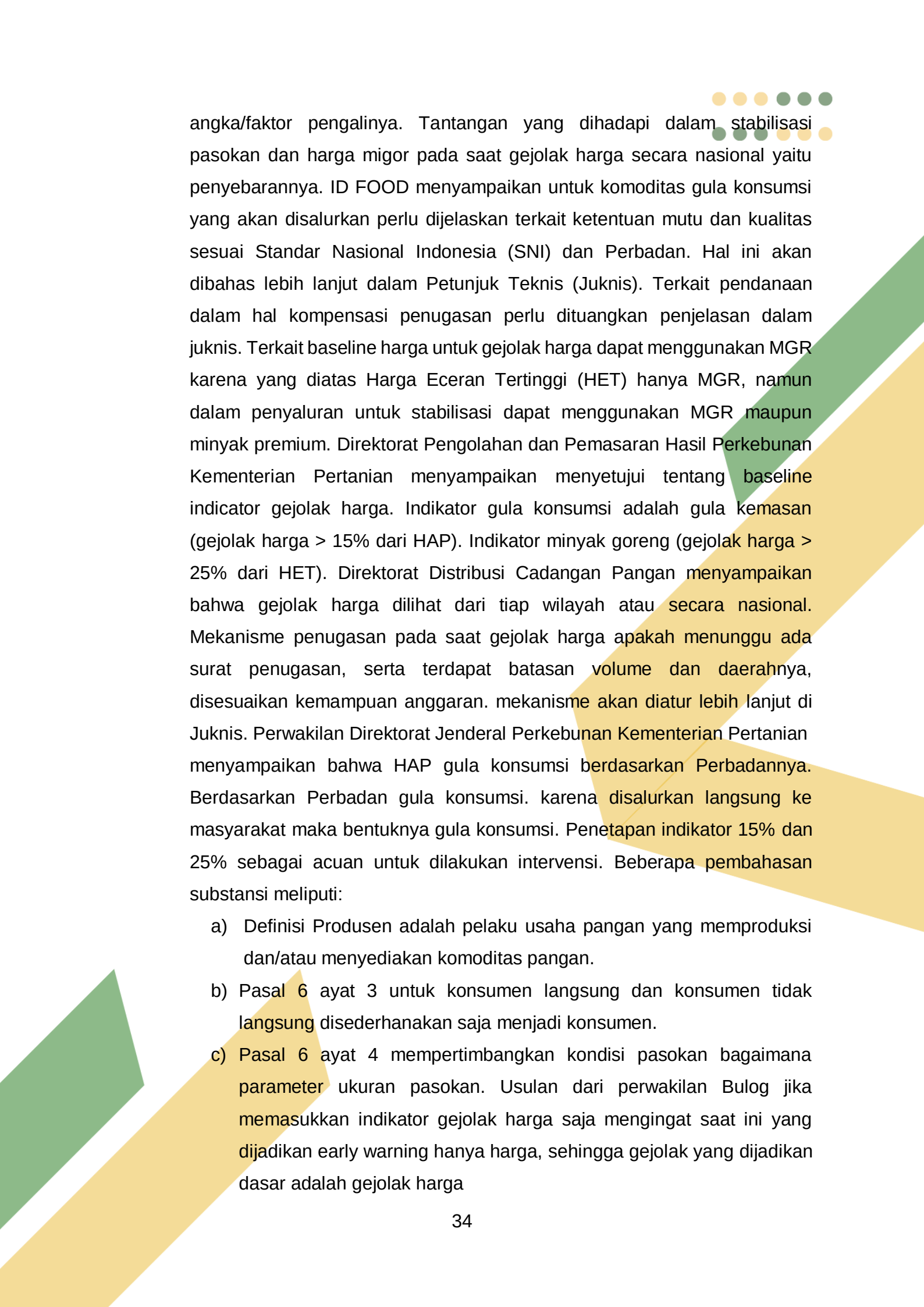
4. Penambahan kata jenis pada Pasal 6 ayat 1;
5. Penetapan nomenklatur konsumen pada Pasal 7 ayat 3;
6. Penambahan produk setengah jadi pada Pasal 7 ayat 5; dan
7. Penambahan pelaku usaha pangan serta pengurangan pada Pasal 9 ayat 2.

f. Tindak Lanjut:

1. Perlu adanya usulan terkait pasal khusus yang membahas pengadaan gejolak di Tingkat Konsumen serta mekanisme pelepasannya sehingga dirumuskan secara terpisah terkait pengadaan dan penyaluran untuk stabilisasi pasokan dan harga di Tingkat Produsen dan di Tingkat Konsumen.
2. Berdasarkan masukan dan usulan dalam Rapat Koordinasi, akan dilakukan revisi draft RPerbadan, dan selanjutnya disampaikan ke Biro OSH untuk direviu atau dikoreksi dandiproses lebih lanjut.

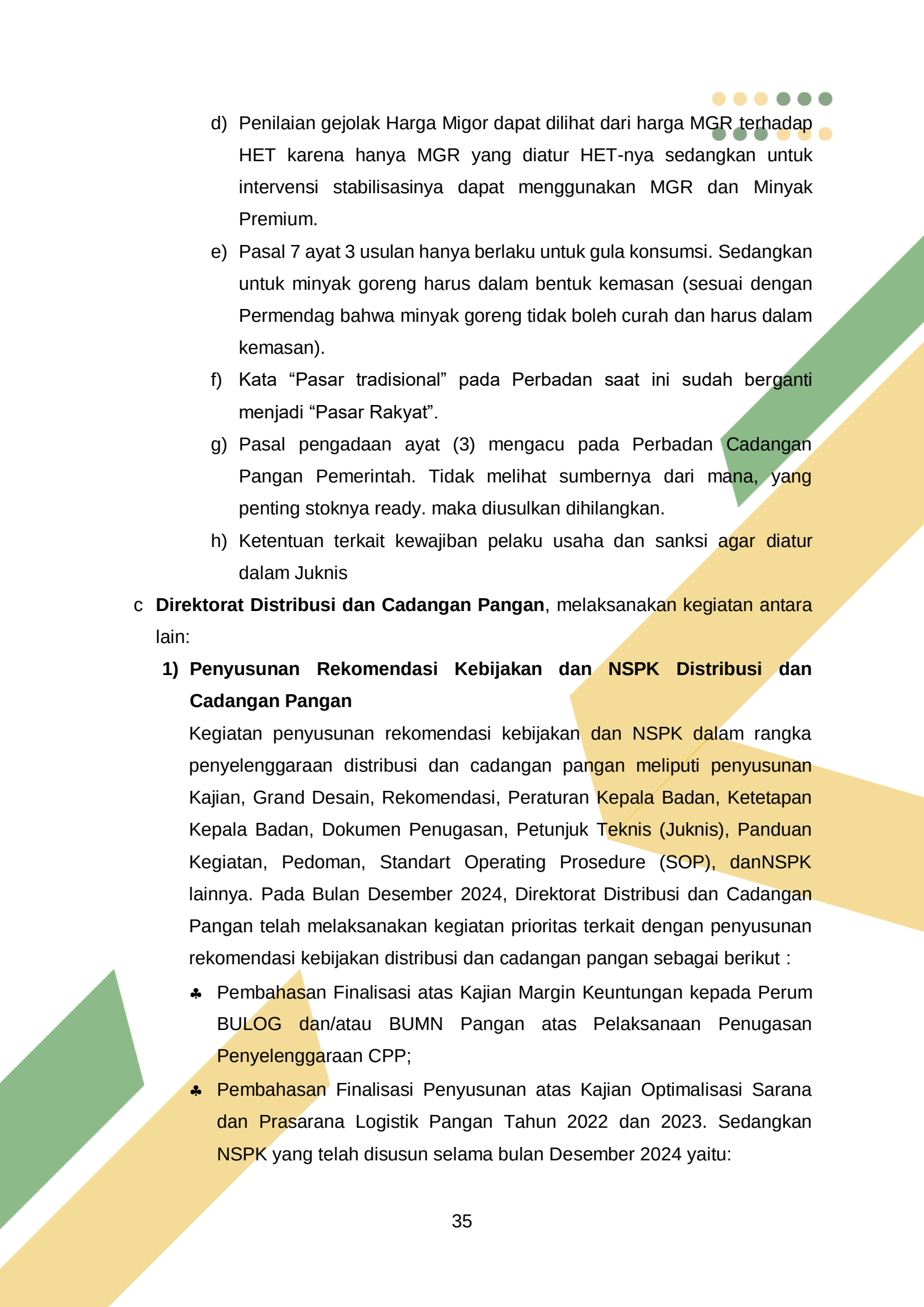
3) Pembahasan RPerbadan SPHP Komoditas Perkebunan

Rakor Tindak Lanjut RPerbadan Komoditas Perkebunan dilaksanakan pada Kamis tanggal 21 November 2024. Rapat dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat Deputi I Bapanas, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Stabilisasi Harga Pangan Badan Pangan Nasional dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian, perwakilan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, perwakilan Bulog (POPP dan legal), perwakilan ID FOOD, perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan, Direktorat Distribusi Cadangan Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas. Tujuan rakor sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya terkait pembahasan RPerbadan SPHP Komoditas Perkebunan untuk dilakukan finalisasi draft. Perum BULOG menyampaikan untuk migor perlu diperjelas apakah untuk MGR (Minyak Goreng Rakyat) atau minyak secara umum. Mengingat penyebaran DMO (Domestic Market Obligation) ke seluruh Indonesia berbeda antar provinsi, yang membedakan berdasarkan



angka/faktor pengalinya. Tantangan yang dihadapi dalam stabilisasi pasokan dan harga migor pada saat gejolak harga secara nasional yaitu penyebarannya. ID FOOD menyampaikan untuk komoditas gula konsumsi yang akan disalurkan perlu dijelaskan terkait ketentuan mutu dan kualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Perbadan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis (Juknis). Terkait pendanaan dalam hal kompensasi penugasan perlu dituangkan penjelasan dalam juknis. Terkait baseline harga untuk gejolak harga dapat menggunakan MGR karena yang diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya MGR, namun dalam penyaluran untuk stabilisasi dapat menggunakan MGR maupun minyak premium. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian menyampaikan menyetujui tentang baseline indicator gejolak harga. Indikator gula konsumsi adalah gula kemasan (gejolak harga > 15% dari HAP). Indikator minyak goreng (gejolak harga > 25% dari HET). Direktorat Distribusi Cadangan Pangan menyampaikan bahwa gejolak harga dilihat dari tiap wilayah atau secara nasional. Mekanisme penugasan pada saat gejolak harga apakah menunggu ada surat penugasan, serta terdapat batasan volume dan daerahnya, disesuaikan kemampuan anggaran. mekanisme akan diatur lebih lanjut di Juknis. Perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa HAP gula konsumsi berdasarkan Perbadannya. Berdasarkan Perbadan gula konsumsi. karena disalurkan langsung ke masyarakat maka bentuknya gula konsumsi. Penetapan indikator 15% dan 25% sebagai acuan untuk dilakukan intervensi. Beberapa pembahasan substansi meliputi:

- a) Definisi Produsen adalah pelaku usaha pangan yang memproduksi dan/atau menyediakan komoditas pangan.
- b) Pasal 6 ayat 3 untuk konsumen langsung dan konsumen tidak langsung disederhanakan saja menjadi konsumen.
- c) Pasal 6 ayat 4 mempertimbangkan kondisi pasokan bagaimana parameter ukuran pasokan. Usulan dari perwakilan Bulog jika memasukkan indikator gejolak harga saja mengingat saat ini yang dijadikan early warning hanya harga, sehingga gejolak yang dijadikan dasar adalah gejolak harga

- 
- d) Penilaian gejolak Harga Migor dapat dilihat dari harga MGR terhadap HET karena hanya MGR yang diatur HET-nya sedangkan untuk intervensi stabilisasinya dapat menggunakan MGR dan Minyak Premium.
 - e) Pasal 7 ayat 3 usulan hanya berlaku untuk gula konsumsi. Sedangkan untuk minyak goreng harus dalam bentuk kemasan (sesuai dengan Permendag bahwa minyak goreng tidak boleh curah dan harus dalam kemasan).
 - f) Kata “Pasar tradisional” pada Perbadan saat ini sudah berganti menjadi “Pasar Rakyat”.
 - g) Pasal pengadaan ayat (3) mengacu pada Perbadan Cadangan Pangan Pemerintah. Tidak melihat sumbernya dari mana, yang penting stoknya ready. maka diusulkan dihilangkan.
 - h) Ketentuan terkait kewajiban pelaku usaha dan sanksi agar diatur dalam Juknis

c **Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan**, melaksanakan kegiatan antara lain:

1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan NSPK dalam rangka penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan meliputi penyusunan Kajian, Grand Desain, Rekomendasi, Peraturan Kepala Badan, Ketetapan Kepala Badan, Dokumen Penugasan, Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Kegiatan, Pedoman, Standart Operating Prosedure (SOP), dan NSPK lainnya. Pada Bulan Desember 2024, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaksanakan kegiatan prioritas terkait dengan penyusunan rekomendasi kebijakan distribusi dan cadangan pangan sebagai berikut :

- ♣ Pembahasan Finalisasi atas Kajian Margin Keuntungan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan atas Pelaksanaan Penugasan Penyelenggaraan CPP;
- ♣ Pembahasan Finalisasi Penyusunan atas Kajian Optimalisasi Sarana dan Prasarana Logistik Pangan Tahun 2022 dan 2023. Sedangkan NSPK yang telah disusun selama bulan Desember 2024 yaitu:

- ♣ Keputusan Kepala Badan No. 569.1 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Pangan pengganti dalam Rangka Penyaluran CPP untuk Pemberian Banpang Beras Tahap Pertama dan Tahap Kedua Tahun 2024;
- ♣ Keputusan Kepala Badan No. 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan CPP Tahun 2025;
- ♣ Keputusan Kepala Badan No. 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;
- ♣ Rancangan Keputusan Kepala Badan Tentang Perubahan atas Kepbadan no 507.1 Tentang Harga Pembelian Beras untuk Penyelenggaraan CBP Tahun 2024;
- ♣ Rancangan Keputusan Kepala Badan tentang Harga Pembelian Daging Ayam Ras Beku dan Harga Harga Pembelian Telur Ayam Ras dalam Rangka Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan;
- ♣ Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2025;
- ♣ Rancangan Peraturan Kepala Badan tentang Juknis DAK Non Fisik TA 2025.

2) **Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan**

Rapat dilaksanakan secara online zoom meeting pada tanggal 3 Desember 2024. Rapat dipimpin oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan serta dihadiri oleh perwakilan dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Inspektorat Badan Pangan Nasional, Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas, Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum, Direktur Ketersediaan Pangan selaku PPK Cadangan Pangan Pemerintah; dan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapat masukan dari Kementerian Keuangan dan Internal Badan Pangan Nasional terkait Harga Daging Ayam



dan Telur Ayam untuk Bantuan Pangan Tahun 2024. Beberapa poin catatan hasil pertemuan sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Nomor LHR308.1/PW.02.02/A.4/11/2024 tanggal 22 November 2024 atas komponen struktur biaya harga karkas daging ayam ras, telur ayam ras dan goodie bag dapat disimpulkan bahwa:
 - Harga karkas daging ayam ras beku yang dapat ditagihkan oleh ID Food kepada Pemerintah adalah sebesar Rp41.783/ekor dari usulan ID FOOD sebelumnya sebesar Rp43.102/ekor. Terdapat penyesuaian/koreksi nilai pada harga karkas daging ayam ras yaitu koreksi tambah Rp14/ekor pada komponen biaya movement; biaya manajemen Rp25/ekor dan biaya bunga dan administrasi bank Rp23/ekor. Besaran margin yang disetujui 13% atau sebesar Rp4.807/ekor.
 - Harga telur ayam ras yang dapat ditagihkan oleh ID Food kepada Pemerintah adalah sebesar Rp27.772/tray mika isi 10 butir dari usulan ID FOOD sebelumnya sebesar Rp28.484/tray mika. Terdapat koreksi pengurangan nilai pada komponen biaya movement Rp35/tray mika dan biaya bunga dan administrasi bank Rp3/tray mika serta penambahan nilai pada komponen biaya manajemen Rp23/traymika. Besaran margin yang disetujui 13% atau sebesar Rp3.195/tray mika.
 - Harga goodie bag yang dapat ditagihkan oleh ID Food kepada Pemerintah adalah sebesar Rp4.542/pcs dari usulan ID FOOD sebelumnya sebesar Rp5.043/pcs. Terdapat koreksi pengurangan nilai pada komponen biaya manajemen Rp122/pcs dikarenakan beberapa dokumen pendukung yang disampaikan tidak diterima; biaya satuan bunga dan administrasi bank juga berkurang Rp18/pcs. Besaran margin yang disetujui 7% atau sebesar Rp297/pcs.
- DJA Ekontim menyampaikan bahwa penetapan harga pembelian daging ayam ras beku, telur ayam ras serta goodie bag dapat mengikuti sesuai hasil reviu yang telah dilakukan Inspektorat Bapanas.
- DJA Ekontim menyampaikan bahwa perlu penelaahan lebih lanjut dan BKF menilai besaran margin yang ditagihkan atas penugasan penyelenggaraan CPP pada komoditas Daging Ayam Ras beku dan Telur Ayam terlalu besar.



Inspektorat Bapanas menyampaikan bahwa pertimbangan penetapan besaran margin yaitu : Kedua komoditas bersifat perishable/mudah rusak atau memiliki umur simpan yang singkat, sehingga resiko kerusakan cukup tinggi. Jika memang terjadi kerusakan pun, pergantian barang tidak ditagihkan kembali oleh ID FOOD.

- Karena belum ada landasan hukum yang menetapkan besaran margin atas penugasan penyelenggaraan CPP, maka Inspektorat merujuk Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, besaran margin dan biaya overhead sebesar maksimal 15% yang dinilai wajar.
 - Biro PKH menyampaikan bahwa proses pembayaran akan dilakukan jika proses reviu sudah dilaksanakan dan sudah ada penetapan Kepbadan Harga Pembelian Daging Ayam Ras Beku dan Telur Ayam Ras Tahun 2024.
 - Mengingat anggaran juga sudah ada di DIPA Bapanas, proses penyelesaian pembayaran diharapkan bisa dilakukan maksimal sebelum tanggal 15 Desember 2024.
- Tindak lanjut:
- Penyusunan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Daging Ayam Ras Beku dan Telur Ayam Ras Tahun 2024 agar diproses dan segera ditetapkan untuk mempercepat proses pembayaran.

2) Rapat Koordinasi Penyiapan Lokpri Jangka Menengah DAK Bidang Pangan Dan Pertanian 2026-2029

Rapat Koordinasi dilaksanakan secara offline di Hotel Avenzel Bekasi pada tanggal 19 Desember 2024. Rapat dipimpin oleh Subdit PP Bappenas dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Perencanaan Kementan dan Bapanas. Rapat diselenggarakan untuk membahas usulan lokpri dak jangka menengah bidang pangan dan pertanian. Beberapa poin-poin Evaluasi Bantuan Pangan Beras Tahun 2024:

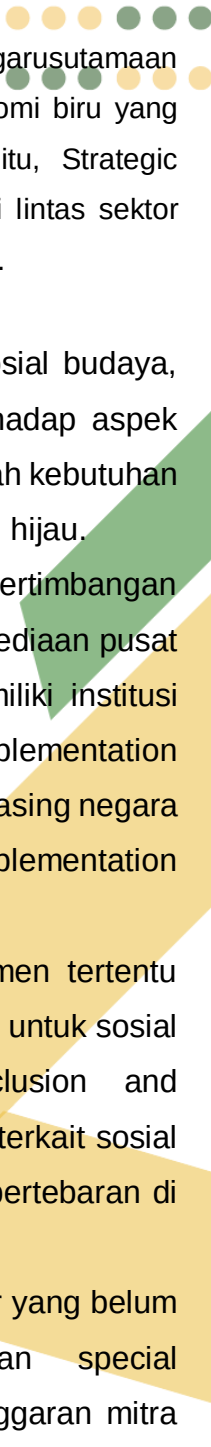
- DCP telah menyampaikan file usulan lokpri sementara berdasarkan lokpri kementan dan sudah melakukan irisan lokpri kabkota

- Sebagian besar (sekitar 80%) sudah beririsan dgn lokpri kementan, dari total 290 lokpri kementan, 260-270an kab memiliki LPM (Data terlampir)
- DCP diminta untuk menyusun master data 514 kabkota serta menyusun prioritasnya untuk melihat kemungkinan lokpri dapat dipilih sendiri tanpa harus diiriskan dengan lokpri kementan.
- DCP akan kembali menyisir lokasi kabkota yg memiliki LPM dan blm tersedia pada lokpri kementan
- Kaitannya dengan keberlanjutan pada setiap tahunnya, KL dapat mengidentifikasi masing2, apakah kegiatanny ditujukan u pengembangan kawasan, atau dak hanya sebagai dana stimulus yg idealny pembangunan dilanjutkan melalui APBD.
- Prioritasi dapat melibatkan sebanyak mungkin pertimbangan semisal FSVA (1-3), dan variabel lainnya sesuai kegiatan dimasing2 KL.

3) Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Strategic Discussion on Mainstreaming ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Building a Future-Ready ASEAN through Sub Regional Cooperation and the Blue Economy

Rapat Koordinasi diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2024 secara hybrid, dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri dan dihadiri oleh perwakilan seluruh K/L instansi penjuror organisasi internasional. Beberapa poin catatan hasil rapat sebagai berikut :

- ❖ Sebagaimana diketahui, ASEAN Leaders' Declaration on the Indo-Pacific (AOIP): Strengthening a Future-Ready ASEAN and Regional Architecture telah disepakati pada KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN di Laos. Deklarasi tersebut bertujuan untuk menjaga momentum agar AOIP tetap menjadi panduan dalam pembangunan Komunitas ASEAN dan arsitektur kawasan ke depan, serta menggarisbawahi pentingnya penggunaan pendekatan komprehensif dalam menjawab perubahan geopolitik dan geoekonomi kawasan.
- ❖ Deklarasi tersebut memandatkan ASEAN untuk terus mendorong, mengimplementasikan, serta mengarusutamakan AOIP pada ASEAN-led mechanisms untuk mendukung ASEAN Community Vision 2045. Pengarusutamaan dilaksanakan melalui proyek dan aktivitas konkret, termasuk pembentukan ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy (ACTF- BE). Selain itu, pengarusutamaan AOIP juga didorong pada penyusunan kerangka kerja sama sub-regional.

- 
- ❖ Kegiatan dilaksanakan rangka mendiskusikan upaya pengarusutamaan AOIP dalam kerangka kerja sama sub-regional dan ekonomi biru yang sejalan dengan Visi Komunitas ASEAN 2045. Selain itu, Strategic Discussion juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, think tank, dan pelaku usaha.
 - ❖ Poin-poin pembahasan pada pertemuan meliputi:
 - Bagaimana keterkaitan Blue ekonomi terhadap sosial budaya, karena bisa saja ekonomi memiliki resistensi terhadap aspek sosial budaya. Apakah ada blue economy job, adakah kebutuhan ketersediaan tenaga kerja sebagaimana di ekonomi hijau.
 - Beda donor beda kepentingan, untuk itu perlu pertimbangan institusi yang bisa diajak kerja sama seperti ketersediaan pusat riset dan instrumen pendukung lainnya yang dimiliki institusi tersebut. Perlu dilihat kejelasan strategic dan implementation plan yang mereka miliki. Perlu identifikasi masing-masing negara karena beda kondisi, sehingga perlu penyusunan implementation plan yang spesifik untuk masing-masing negara.
 - Blue ekonomi areanya luas, perlu didorong segmen tertentu seperti fisheries dan climate change. Area didorong untuk sosial budaya bisa value creation, disamping inclusion and sustainability. Underwater heritage protection juga terkait sosial budaya, belum dikelola dengan baik dan banyak bertebaran di perairan ASEAN.
 - Task Force akan mengidentifikasi area lintas sektor yang belum digarap, misalnya ocean accounting, ocean special management, serta sektor lainnya. Terkadang anggaran mitra tersedia, hanya ide-ide perlu dikembangkan.
 - Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber baru, salah satunya penguatan SDM. Menyediakan technical operational training, untuk skill yang compatible agar dapat berkompetisi dan meningkatkan produktivitas di sektor blue ekonomi.
 - Perlu mereview kembali inisiatif-inisiatif yang sebelumnya pernah diajukan, seperti misalnya ASEAN Maritim Forum, untuk menghidupkan kembali semangat kontribusi Indonesia di



regional ASEAN, dengan tetap mengacu pada semangat AOIP, ASEAN Maritim Outlook, dan ASEAN Maritim Forum.

- Perlu memperhatikan postur penganggaran di daerah, untuk mendukung inovasi daerah mendukung ekonomi biru sebagai sumber inovasi. Karena banyak daerah yang bersentuhan langsung dengan negara-negara lain, dan kemudian dimanfaatkan melalui penganggaran luar, karena ketiadaan penganggaran daerah untuk riset dan inovasi. Implementasi blue ekonomi ada di daerah-daerah, agar mendapat perhatian, khususnya wilayah timur Indonesia.

4) Rapat Pendalaman Program Bantuan Pangan melalui Sistem Aplikasi

Rapat diselenggarakan pada tanggal 31 Desember 2024 secara offline di Ruang Rapat Nusantara II lantai 4. Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Ketersediaan dan dihadiri perwakilan Dit. DCP, Dit. SPHP, Pusdatin dan Inspektorat. Beberapa poin hasil rapat sebagai berikut:

- ❖ PPK CPP menyampaikan bahwa saat ini Bapanas perlu mempunyai sistem aplikasi yang dapat diakses secara real time sebagai fungsi pemantauan untuk kegiatan penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP. Untuk bantuan pangan, sistem minimal dapat menggambarkan realisasi penyaluran sampai titik bagi/kelurahan, untuk SPHP minimal dapat menggambarkan distribusi sampai RPK.
- ❖ Dit DCP menyampaikan bahwa saat ini Bulog sudah memiliki aplikasi yang sudah diintegrasikan dengan transporter namun belum diberikan akses secara langsung pada aplikasi maupun dashboard penyaluran banpang. Saat ini pelaporan dikirim secara manual per hari oleh Bulog. Dit SPHP menyampaikan bahwa saat ini Bulog sudah memiliki aplikasi KLIK SPHP namun belum diberikan akses secara langsung.
- ❖ Pusdatin menyampaikan bahwa saat ini sistem bantuan pangan yang telah dibangun pusdatin terkendala akses dari bulog yang belum diizinkan untuk diintegrasikan dengan sistem pusdatin.
- ❖ Tindak lanjut: Peserta rapat sepakat akan membahas lebih lanjut kendala tersebut dengan Bulog yang akan dilaksanakan pada rapat pekan depan.



5) **Rapat Koordinasi FGD Ketahanan Stok Pangan dalam Proyeksi Neraca Pangan dan Evaluasi Proyeksi Neraca Pangan Wilayah**

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2024. Rapat dipimpin oleh Direktur Ketersediaan dan dihadiri oleh Direktur SPHP, akademisi Universitas Lampung (Prof Bustanul Arifin) dan IPB (Dr Rasidin), Perwakilan BRIN, Perwakilan Kementan dan fungsional lingkup Badan Pangan Nasional. Beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- ❖ Prof Benny menyatakan bahwa neraca pangan wilayah didekati dengan perumusan dengan memperhatikan shortage pada saat hari besar keagamaan nasional.
- ❖ Prof Achmad menyampaikan bahwa Penyusunan neraca pangan harus memperhatikan angka penyusutan di tiap komoditas. Neraca daerah berbiaya tinggi dengan kualitas data yang tidak terlalu baik sehingga tidak disarankan dilaksanakan. Akan lebih baik untuk menggunakan instrumen pasokan dan harga di Pasar induk dalam pengambilan kebijakan
- ❖ Prof bustanul, Bapanas perlu menggandeng akademisi untuk mengadakan studi mengenai neraca pangan wilayah khususnya mengenai perdagangan antar wilayah. Untuk Kebutuhan Non Rumah Tangga dapat didekati dari kebutuhan nasional.
- ❖ Direktorat Ketersediaan akan melakukan bimtek dengan universitas dan dinas pangan provinsi.

6) **Rapat Koordinasi Workshop Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja SPBE**

Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada hari tanggal 2 Desember 2024 secara offline di Gedung Badan Pangan Nasional, dipimpin oleh ketua tim kerja biro PKH, dan dihadiri oleh narasumber dr SDI Bappenas, komdigi, & panrb serta dihadiri perwakilan seluruh unit kerja Bapanas. Beberapa poin hasil rapat koordinasi sebagai berikut:

- ❖ Tujuan rapat diadakan dlm rangka persiapan penyusunan dokumen pendukung (KAK/TOR) pemberian rekomendasi (clearance) belanja data dan TIK Bapanas TA 2025.
- ❖ Komdigi: checklist kriteria KAK & Dok. pendukung: harus memuat/memperhatikan kesesuaian strategi pemerintah (aturan:



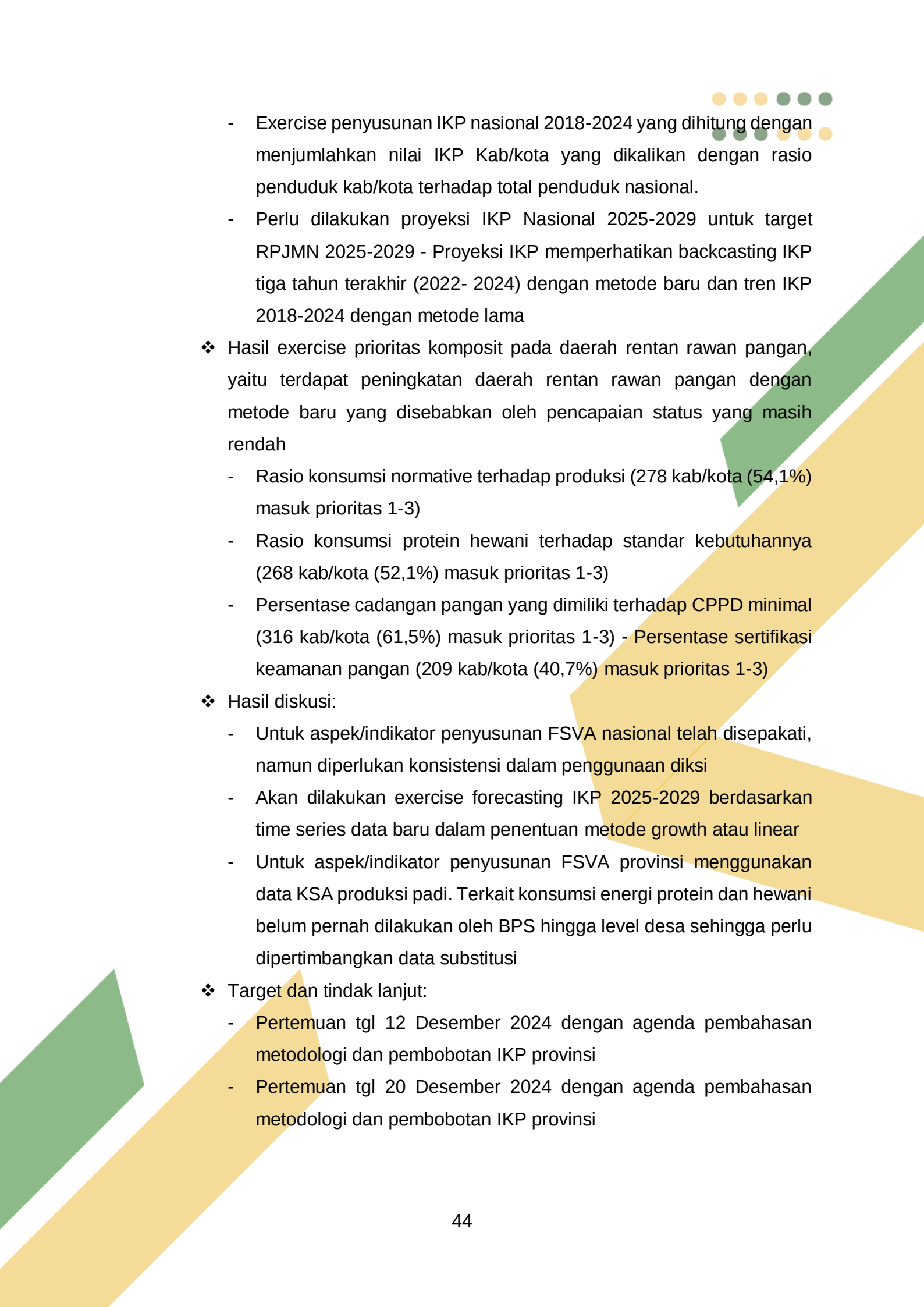
perpres dst), proses bisnis dgn K/L lain yg sejenis, urgensi belanja, ketersediaan di PDN

- ❖ SDI/Bappenas: Urgensi SDI utk clearance belanja SPBE adalah upaya utk memperbaiki tata kelola data trmsk data yg dihasilkan melalui pengembangan aplikasi. Audit aplikasi SPBE dibutuhkan utk memastikan aplikasi yg dikembangkan memiliki rancangan dan dokumentasi domain datin dlm arsitektur SPBE, sumber data dan data yg dihasilkan sesuai dgn SDI.
- ❖ PANRB : sesuai amanat perpres 95/2018 dan perpres 132/2022, proses bisnis pd dokumen atau KAK yg di usulkan harus memenuhi prinsip SDI terkait data yg diproduksi dan dikelola dari aplikasi SPBE yg dibangun dan/atau dikembangkan instansi pusat.
- ❖ Terkait dgn kegiatan DCP TA 2025, KAK clearance aplikasi SICPN 2025 yg telah dibuat/diusulkan harus di perbaiki dan sesuaikan dgn format KAK SPBE, arahan biro PKH deadline perbaikan max mggu ke-3 des 2024.

7) Rapat Koordinasi FGD Pembahasan Metode Baru FSVA Provinsi Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pada 6 Des 2024 di Hotel Borobudur Jakarta. Rapat dipimpin oleh Direktur Kerawanan Pangan dan dihadiri oleh para Pakar Tim Penyusun FSVA, perwakilan dari Bappenas, Kementan, Kemendesa Tertinggal dan Transmigrasi, BPS, Kemen PU, Setwapres, TNP2K, Dit SPHP, Dit Penganekaragaman Konsumen Pangan, Dit Penerapan Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dan Dit DCP. Beberapa poin dapat disampaikan sebagai berikut:

- ❖ Metode FSVA lama (2018-2024) pada tingkat provinsi, kabupaten/kota mempertimbangkan 9 (Sembilan) aspek dan indikator: ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Pada tahun ini dilakukan updating metodologi dengan mempertimbangkan 3 aspek dan 12 indikator
- ❖ Tim Pakar Penyusun FSVA telah melakukan exercise penghitungan Indeks Ketahanan Pangan lama dan baru, dengan hasil sebagai berikut:
 - IKP belum pernah dihitung dan dipublikasikan sebelumnya

- 
- Exercise penyusunan IKP nasional 2018-2024 yang dihitung dengan menjumlahkan nilai IKP Kab/kota yang dikalikan dengan rasio penduduk kab/kota terhadap total penduduk nasional.
 - Perlu dilakukan proyeksi IKP Nasional 2025-2029 untuk target RPJMN 2025-2029 - Proyeksi IKP memperhatikan backcasting IKP tiga tahun terakhir (2022- 2024) dengan metode baru dan tren IKP 2018-2024 dengan metode lama
 - ❖ Hasil exercise prioritas komposit pada daerah rentan rawan pangan, yaitu terdapat peningkatan daerah rentan rawan pangan dengan metode baru yang disebabkan oleh pencapaian status yang masih rendah
 - Rasio konsumsi normative terhadap produksi (278 kab/kota (54,1%) masuk prioritas 1-3)
 - Rasio konsumsi protein hewani terhadap standar kebutuhannya (268 kab/kota (52,1%) masuk prioritas 1-3)
 - Persentase cadangan pangan yang dimiliki terhadap CPPD minimal (316 kab/kota (61,5%) masuk prioritas 1-3) - Persentase sertifikasi keamanan pangan (209 kab/kota (40,7%) masuk prioritas 1-3)
 - ❖ Hasil diskusi:
 - Untuk aspek/indikator penyusunan FSVA nasional telah disepakati, namun diperlukan konsistensi dalam penggunaan diksi
 - Akan dilakukan exercise forecasting IKP 2025-2029 berdasarkan time series data baru dalam penentuan metode growth atau linear
 - Untuk aspek/indikator penyusunan FSVA provinsi menggunakan data KSA produksi padi. Terkait konsumsi energi protein dan hewani belum pernah dilakukan oleh BPS hingga level desa sehingga perlu dipertimbangkan data substitusi
 - ❖ Target dan tindak lanjut:
 - Pertemuan tgl 12 Desember 2024 dengan agenda pembahasan metodologi dan pembobotan IKP provinsi
 - Pertemuan tgl 20 Desember 2024 dengan agenda pembahasan metodologi dan pembobotan IKP provinsi

- 
2. **Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Pada periode bulan Desember Tahun 2024 telah ter-realisasi anggaran sebesar Rp 10.952.791.698,- yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

a **Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan** dengan kegiatan antara lain:

1) Finalisasi Penyusunan buku FSVA Nasional Tahun 2024

Proses penyusunan buku FSVA Nasional 2024 dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap akhir penyelesaian dilakukan editing narasi hasil analisis dan layout tata letak konten buku FSVA, sehingga lebih menarik untuk dibaca

2) Pertemuan Launching dan Publikasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 Provinsi Banten yang dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, dengan tujuan untuk mensosialisasikan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 yang disusun sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pembangunan ketahanan pangan. Pertemuan dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (Dr. Agus Supriyadi) dengan narasumber dari Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Bappeda Provinsi Banten, BPS Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dan Praktisi Profesi Ahli Gizi (Dr. Yayuk Farida). Pertemuan dihadiri oleh Tim FSVA Provinsi Banten, OPD Provinsi Banten yang Terkait dengan Ketahanan Pangan; dan OPD Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten yang Menangani Ketahanan Pangan; Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menegaskan FSVA Provinsi Banten diharapkan dapat menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk 2 secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberi dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Wilayah Provinsi Banten. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan menyampaikan terkait: (1) peran strategis FSVA, (2) situasi ketahanan dan kerentanan Kabupaten/Kota di Banten berdasarkan



hasil FSVA Nasional, (3) Rekomendasi Kebijakan Penguatan Ketahanan Pangan Lintas Sektor di Provinsi Banten, (4) Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Kerawanan Pangan, (5) Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan, (6) Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi di Banten, (6) Dukungan APBD dalam Penyusunan FSVA dan Intervensi Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2025. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyampaikan FSVA Provinsi Banten Tahun 2024 mencakup 155 kecamatan di 4 Kabupaten dan 4 Kota yang disusun berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dengan menggunakan sembilan indikator yang menjadi produk dari partisipasi aktif dari instansi lintas sektor di Provinsi Banten di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Berdasarkan hasil analisis terdapat 21 kecamatan dari total 155 kecamatan (13,55%) yang masuk kategori rentan rawan pangan (Prioritas 1-3), yang tersebar di Kabupaten Lebak (7 kecamatan), Tangerang (6 kecamatan), Pandeglang (5 kecamatan), dan Serang (3 Kecamatan). Karakteristik daerah rentan rawan pangan di Provinsi Banten: (1) rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, (2) presentasi penduduk di bawah garis kemiskinan tinggi, (3) persentase rumah tangga tanpa akses air bersih tinggi, (4) rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun rendah, dan (5) angka kesakitan tinggi. Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan yang ditinjau dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Upaya pengentasan kerentanan pangan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat. Upaya tersebut dilakukan agar program pengentasan daerah rentan rawan pangan dapat dilakukan secara masif dan terarah serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya. Tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu:

1. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten akan mengajukan SK Penetapan FSVA Provinsi Banten kepada PJ. Gubernur
2. Dinas Ketahanan Pangan akan mensosialisasikan hasil FSVA Tahun 2024 secara masif kepada stakeholder terkait dan menjadikan FSVA



sebagai instrumen untuk intervensi penanganan kerawanan pangan lintas sektor

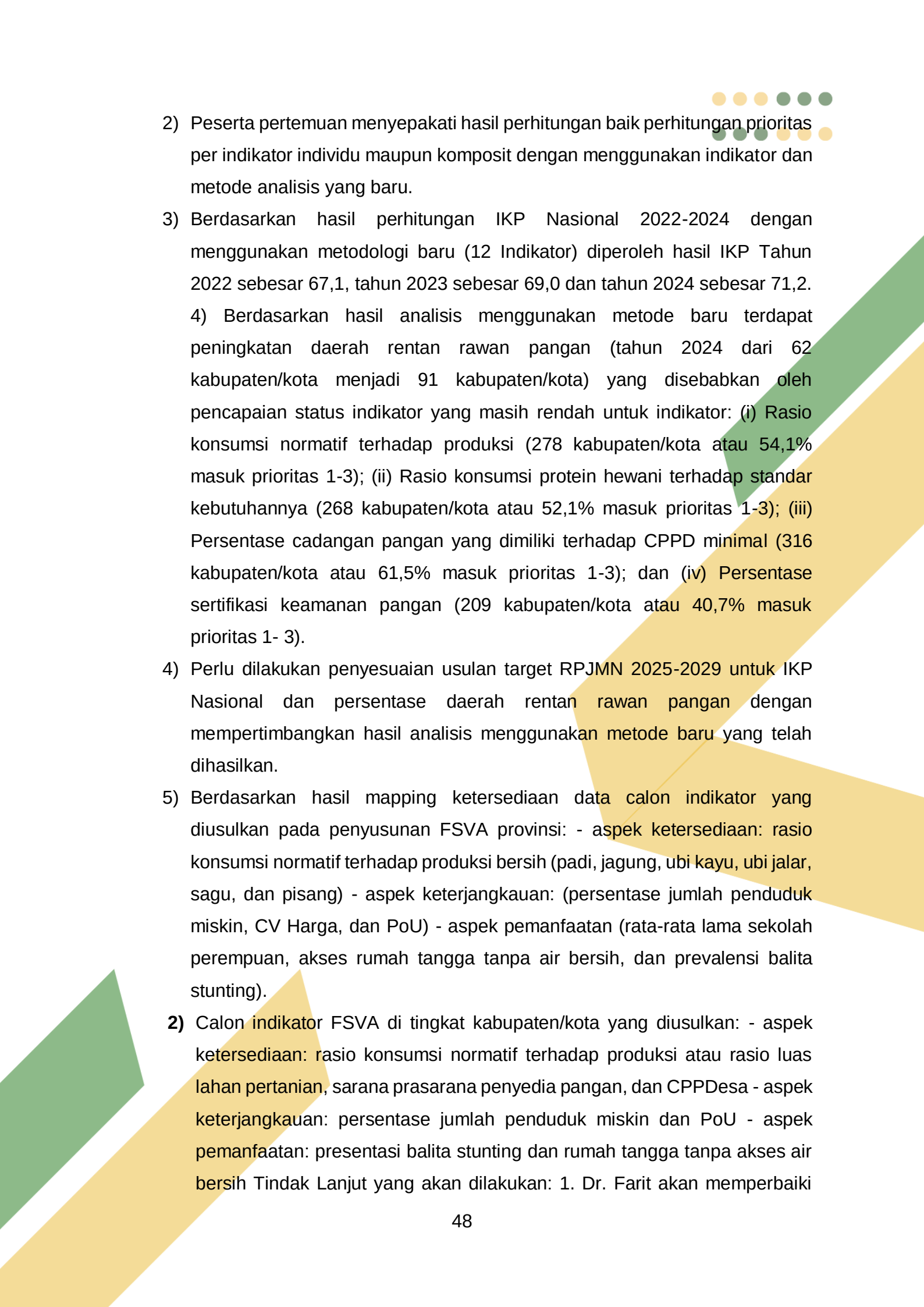
3) FGD Pembahasan Metode Baru FSVA 2025

FGD merupakan kerjasama Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dengan World Food Programme (WFP) yang dilaksanakan pada hari Jumat, 6 Desember 2024 di Hotel Borobudur Jakarta. FGD bertujuan untuk:

- a. Membahas hasil exercise metodologi baru FSVA Nasional; dan
- b. Membahas indikator baru yang akan digunakan dalam analisis FSVA Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun 2025. Pertemuan dibuka oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan, dan dihadiri oleh Tim Pakar (Prof. Dr. Ir. Drajat Martianto, Prof. dr. Endang L. Achadi, MPH, Dr.PH, Dr. Farit M. Afendi, dan Ir. Mewa Ariani, M.S.), Konsultan WFP (Prof. Stephen Hasler dan Dr. Aaron Wise), Tim Penyusun FSVA dari lintas K/L (Bappenas, Kementan, Kemendes PDTT, Kemenkes dan Bapanas). Pejabat Pelaksana Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan menyampaikan: (1) urgensi penyusunan FSVA yang menjadi target RPJMN 2025-2029 dan target pembangunan pangan di daerah, (2) indikator dan metode analisis berdasarkan hasil kesepakatan pakar, (3) hasil exercise metode baru (prioritas per indikator, nilai indeks komposit ketahanan pangan), (4) hasil proyeksi sementara IKP Nasional dan daerah rentan rawan pangan 2025-2029. Selain itu disampaikan pula calon indikator dan ketersediaan data indikator FSVA provinsi dan FSVA Kabupaten/Kota.

Dalam diskusi disepakati beberapa hal:

- 1) Peserta pertemuan menyepakati 12 indikator dan metode analisis pembobotan yang telah dihasilkan dari serangkain diskusi dengan para pakar. Namun terdapat perbaikan penggunaan istilah pada aspek ketersediaan dari rasio konsumsi energi dan rasio konsumsi protein hewani menjadi rasio ketersediaan energi dan rasio ketersediaan protein hewani untuk konsistensi dengan aspek yang dianalisis.

- 
- 2) Peserta pertemuan menyepakati hasil perhitungan baik perhitungan prioritas per indikator individu maupun komposit dengan menggunakan indikator dan metode analisis yang baru.
- 3) Berdasarkan hasil perhitungan IKP Nasional 2022-2024 dengan menggunakan metodologi baru (12 Indikator) diperoleh hasil IKP Tahun 2022 sebesar 67,1, tahun 2023 sebesar 69,0 dan tahun 2024 sebesar 71,2.
- 4) Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode baru terdapat peningkatan daerah rentan rawan pangan (tahun 2024 dari 62 kabupaten/kota menjadi 91 kabupaten/kota) yang disebabkan oleh pencapaian status indikator yang masih rendah untuk indikator: (i) Rasio konsumsi normatif terhadap produksi (278 kabupaten/kota atau 54,1% masuk prioritas 1-3); (ii) Rasio konsumsi protein hewani terhadap standar kebutuhannya (268 kabupaten/kota atau 52,1% masuk prioritas 1-3); (iii) Persentase cadangan pangan yang dimiliki terhadap CPPD minimal (316 kabupaten/kota atau 61,5% masuk prioritas 1-3); dan (iv) Persentase sertifikasi keamanan pangan (209 kabupaten/kota atau 40,7% masuk prioritas 1-3).
- 4) Perlu dilakukan penyesuaian usulan target RPJMN 2025-2029 untuk IKP Nasional dan persentase daerah rentan rawan pangan dengan mempertimbangkan hasil analisis menggunakan metode baru yang telah dihasilkan.
- 5) Berdasarkan hasil mapping ketersediaan data calon indikator yang diusulkan pada penyusunan FSVA provinsi: - aspek ketersediaan: rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang) - aspek keterjangkauan: (persentase jumlah penduduk miskin, CV Harga, dan PoU) - aspek pemanfaatan (rata-rata lama sekolah perempuan, akses rumah tangga tanpa air bersih, dan prevalensi balita stunting).
- 2) Calon indikator FSVA di tingkat kabupaten/kota yang diusulkan: - aspek ketersediaan: rasio konsumsi normatif terhadap produksi atau rasio luas lahan pertanian, sarana prasarana penyedia pangan, dan CPPDesa - aspek keterjangkauan: persentase jumlah penduduk miskin dan PoU - aspek pemanfaatan: presentasi balita stunting dan rumah tangga tanpa akses air bersih Tindak Lanjut yang akan dilakukan: 1. Dr. Farit akan memperbaiki

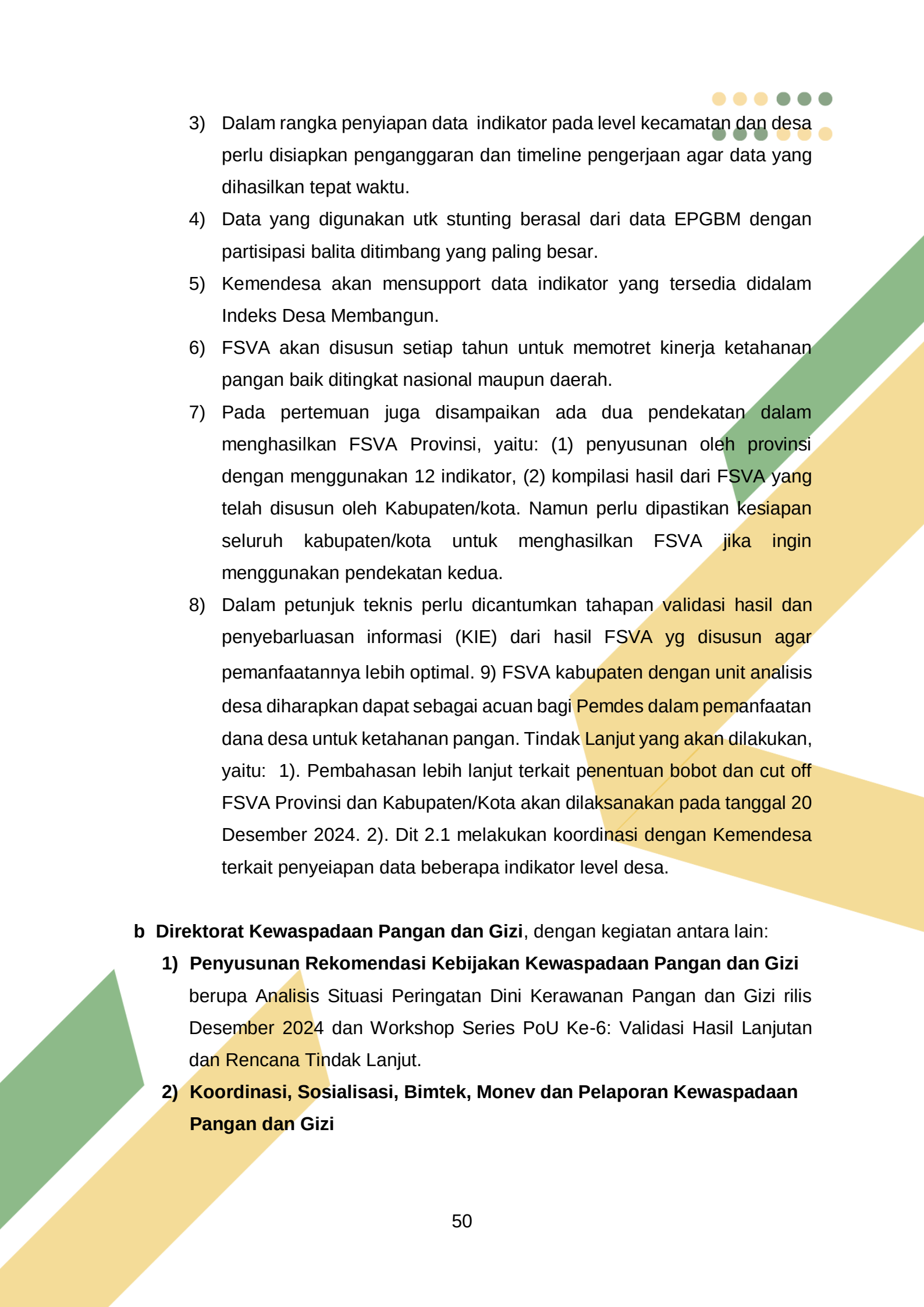


angka proyeksi IKP nasional dan angka proyeksi daerah rentan rawan pangan untuk selanjutnya akan menjadi usulan target RPJMN 2025-2029

4) FGD Finalisasi Indikator dan Pembobotan FSVA Provinsi Tahun 2025

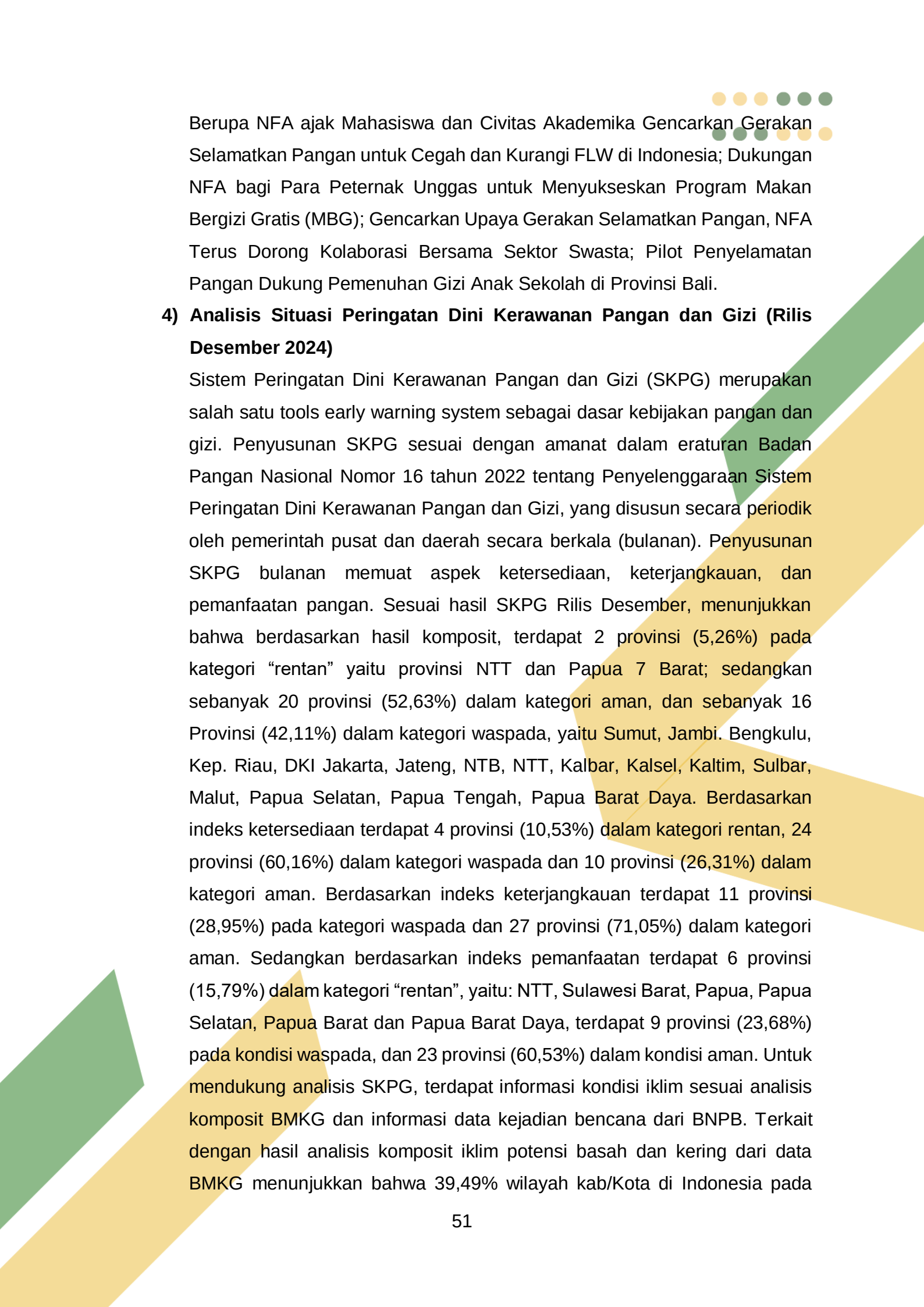
FGD merupakan Kerjasama Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dengan World Food Programme (WFP) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2024 di Hotel Borobudur Jakarta. FGD bertujuan untuk membahas finalisasi calon indikator FSVA Provinsi dan membahas indikator FSVA Kabupaten/Kota. Pertemuan dibuka oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan, dan dihadiri oleh Tim Pakar (Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS., Dr. Farit M. Afendi, Dr. Azka Ubaidillah, S.ST., M.Si., Ir. Mewa Ariani, MS. dan Mahmud Fauzi, S.KM., M.KM.), Konsultan WFP (Aaron Wise dan Catherine), Tim Penyusun FSVA dari lintas K/L (BPS, Bappenas, dan Kemendes PDTT), OPD Pangan Provinsi (Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku Utara). Pejabat Pelaksana Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan menyampaikan penyusunan FSVA dan IKP menjadi hal yang krusial, karena akan dijadikan sebagai referensi kebijakan pembangunan. Selain dalam pencapaian target nasional (RPJMN 6 2025-2029) penyusunan FSVA/IKP Provinsi dan Kabupaten/Kota juga diperlukan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan pangan di daerah. Oleh karena itu pemutakhiran metodologi FSVA Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan utk memotret kondisi ketahanan pangan yg lebih akurat. Pada pertemuan tersebut disampaikan juga calon indikator di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta hasil mapping ketersediaan data. Dalam diskusi disepakati beberapa hal:

- 1) Peserta pertemuan menyepakati indikator yang digunakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sama dengan indikator yang digunakan di tingkat nasional, yaitu 12 indikator, sehingga angka yang dihasilkan akan lebih sejalan pada setiap tingkatan analisis.
- 2) Penyediaan data 8 indikator yang bersumber data susenas akan dilakukan dengan pendekatan small area estimation unit level yang akan didukung oleh Badan Pangan, BPS, STIS, IPB dan WFP. Sementara data indikator akan disediakan oleh Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/kota dan data terkait keamanan pangan akan disiapkan oleh Badan Pangan dengan pendekatan angka kabupaten.

- 
- 3) Dalam rangka penyiapan data indikator pada level kecamatan dan desa perlu disiapkan penganggaran dan timeline pengerjaan agar data yang dihasilkan tepat waktu.
 - 4) Data yang digunakan utk stunting berasal dari data EPGBM dengan partisipasi balita ditimbang yang paling besar.
 - 5) Kemendesa akan mensupport data indikator yang tersedia didalam Indeks Desa Membangun.
 - 6) FSVA akan disusun setiap tahun untuk memotret kinerja ketahanan pangan baik ditingkat nasional maupun daerah.
 - 7) Pada pertemuan juga disampaikan ada dua pendekatan dalam menghasilkan FSVA Provinsi, yaitu: (1) penyusunan oleh provinsi dengan menggunakan 12 indikator, (2) kompilasi hasil dari FSVA yang telah disusun oleh Kabupaten/kota. Namun perlu dipastikan kesiapan seluruh kabupaten/kota untuk menghasilkan FSVA jika ingin menggunakan pendekatan kedua.
 - 8) Dalam petunjuk teknis perlu dicantumkan tahapan validasi hasil dan penyebarluasan informasi (KIE) dari hasil FSVA yg disusun agar pemanfaatannya lebih optimal.
 - 9) FSVA kabupaten dengan unit analisis desa diharapkan dapat sebagai acuan bagi Pemdес dalam pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan. Tindak Lanjut yang akan dilakukan, yaitu: 1). Pembahasan lebih lanjut terkait penentuan bobot dan cut off FSVA Provinsi dan Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024. 2). Dit 2.1 melakukan koordinasi dengan Kemendesa terkait penyiapan data beberapa indikator level desa.

b Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi** berupa Analisis Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi rilis Desember 2024 dan Workshop Series PoU Ke-6: Validasi Hasil Lanjutan dan Rencana Tindak Lanjut.
- 2) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi**



Berupa NFA ajak Mahasiswa dan Civitas Akademika Gencarkan Gerakan Selamatkan Pangan untuk Cegah dan Kurangi FLW di Indonesia; Dukungan NFA bagi Para Peternak Unggas untuk Menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Gencarkan Upaya Gerakan Selamatkan Pangan, NFA Terus Dorong Kolaborasi Bersama Sektor Swasta; Pilot Penyelamatan Pangan Dukung Pemenuhan Gizi Anak Sekolah di Provinsi Bali.

4) Analisis Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (Rilis Desember 2024)

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu tools early warning system sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan). Penyusunan SKPG bulanan memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG Rilis Desember, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 2 provinsi (5,26%) pada kategori “rentan” yaitu provinsi NTT dan Papua Barat; sedangkan sebanyak 20 provinsi (52,63%) dalam kategori aman, dan sebanyak 16 Provinsi (42,11%) dalam kategori waspada, yaitu Sumut, Jambi, Bengkulu, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jateng, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulbar, Maluku, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya. Berdasarkan indeks ketersediaan terdapat 4 provinsi (10,53%) dalam kategori rentan, 24 provinsi (60,16%) dalam kategori waspada dan 10 provinsi (26,31%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 11 provinsi (28,95%) pada kategori waspada dan 27 provinsi (71,05%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 6 provinsi (15,79%) dalam kategori “rentan”, yaitu: NTT, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, terdapat 9 provinsi (23,68%) pada kondisi waspada, dan 23 provinsi (60,53%) dalam kondisi aman. Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan informasi data kejadian bencana dari BNPB. Terkait dengan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 39,49% wilayah kab/Kota di Indonesia pada



kategori waspada, dan 60,51% pada kategori siaga. Selanjutnya untuk kejadian bencana, terdapat 20 provinsi (50,63%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 3 provinsi (7,89%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, dan 14 provinsi (36,84%) tidak mengalami bencana.

Terdapat beberapa rekomendasi sesuai hasil SKPG per pilar, sebagai berikut:

1. **Status Rentan**, indeks ketersediaan kondisi Rentan yaitu Provinsi Sumatera Utara Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu: a. Tingkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan b. Pemantauan stok Cadangan Pangan pemerintah pusat dan daerah dan cadangan Pangan masyarakat (petani, penggilingan, pedagang) c. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau OPD yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung d. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah deficit e. Lakukan evaluasi terhadap langkah intervensi bulanan
2. **Status Waspada**, indeks ketersediaan kondisi waspada yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Barat. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu: a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya puso akibat bencana dan iklim b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan, khususnya di daerah kabupaten/kota yang berstatus waspada. c. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. d. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau OPD pertanian daerah terkait penyediaan



benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung. e. Koordinasi dengan BNPB dan BPBD untuk memastikan antisipasi puso akibat bencana dan iklim. f. Memberi rekomendasi untuk melakukan upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) oleh OPD yang menangani urusan pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. **Status Keterjangkauan**, Indeks Keterjangkauan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, Kep. Babel, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Papua Selatan dan Papua Barat. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu: a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya kenaikan harga pada komoditas beras, minyak goreng, dan telur ayam b. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit c. Koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadaai kemungkinan peningkatan persentase balita underweight dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 2-4 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan 4. Status Rentan, Indeks Pemanfaatan kondisi Rentan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu: a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi rentan, karena jumlah persentase balita underweight terhadap jumlah seluruh balita lebih dari 15%, yaitu: 21,05% (68.861 balita) di NTT; 19,94% (14.523 balita) di Sulawesi Barat; 18,46% (4.340 balita) di Papua Barat; 17,29% (2.581 balita) di Papua Barat Daya; 16,99% (2.691 balita) di Papua Selatan; dan 15,93% (5.031 balita) di Papua. 10 b. Untuk mengatasi situasi tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa: (1) Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengambil tindakan relevan yang diperlukan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan untuk balita dengan BB kurang, BB sangat kurang atau balita yang tidak naik berat badannya. (2) Koordinasi lintas sektor untuk melakukan kegiatan pemberdayaan



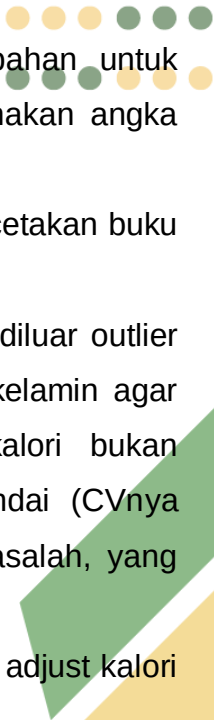
ekonomi dan kesehatan bagi keluarga balita underweight dan balita yang tidak naik berat badannya.

4. **Status Waspada**, Indeks Pemanfaatan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Tengah. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu: a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi waspada, karena jumlah persentase balita underweight terhadap jumlah seluruh balita antara 10 - 15%. b. Melakukan upaya antisipatif memburuknya status Gizi balita pada bulan berikutnya, khususnya untuk kabupaten/kota terlampir. c. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk persiapan penyaluran bantuan Pangan dengan OPD Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, BUMN, BUMD, TP PKK dan swasta

5) **Workshop Series PoU ke-6 Validasi Hasil Lanjutan dan Rencana Tindak Lanjut**

Beberapa informasi penting yang dihasilkan dari Kegiatan Workshop Series PoU ke-6 Validasi Hasil Lanjutan dan Rencana Tindak Lanjut. Lingkup Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang dilaksanakan pada tanggal 02-03 Desember di Depok, Jawa Barat diantaranya:

1. BKKBN menyampaikan: hasil pemutakhiran PK 2024 sudah diseminasi namun karena ada variabel yang masih perlu di crosscheck kemungkinan pertengahan atau akhir desember 2024. kemungkinan pemodelannya tidak berpengaruh banyak, data persentase kehamilan berdasarkan data PK 2023 sudah disiapkan
2. BPS menyampaikan dari hasil sementara implementasi model di Aceh mencoba menghitung PoU kecamatan dan desa, podes 2021 dan PK lama, belum dimasukkan variable kehamilan saat menghitung estimasi kalori beberapa kab/kota angkanya belum pasti, perlu perbaikan agar berproses BPS dengan BKKBN sudah sampai tahap penghitungan PoU desa menggunakan MEDR level kecamatan dan desa. Jika terdapat update variable tambahan maka membutuhkan proses.

- 
3. Coding yang dilakukan sudah selesai, update tambahan untuk menyempurnakan. Tim TNP2K memodelkan menggunakan angka PK untuk selanjutnya BPS yang menghitung PoU
 4. BPS dan BKKBN berkoordinasi sampai mendekati pencetakan buku direktorinya kisaran bulan (Januari/Februari).
 5. BPS menyarankan rata-rata kalori dari hasil modeling diluar outlier rata-rata estimasi kalori berdasarkan umur dan jenis kelamin agar terdistribusi, karena masih menggunakan aktual kalori bukan adjusted kalori. aktual kalori distribusi normal melandai (CVnya besar), adjustment: klo dari bahan makanan tidak masalah, yang masalah konversi kalori dari makanan jadi.
 6. Tindak Lanjut: akan dilakukan perbaikan model dengan adjust kalori dan data podes 2024.

6) NFA ajak Mahasiswa dan Civitas Akademika Gencarkan Gerakan Selamatkan Pangan untuk Cegah dan Kurangi FLW di Indonesia

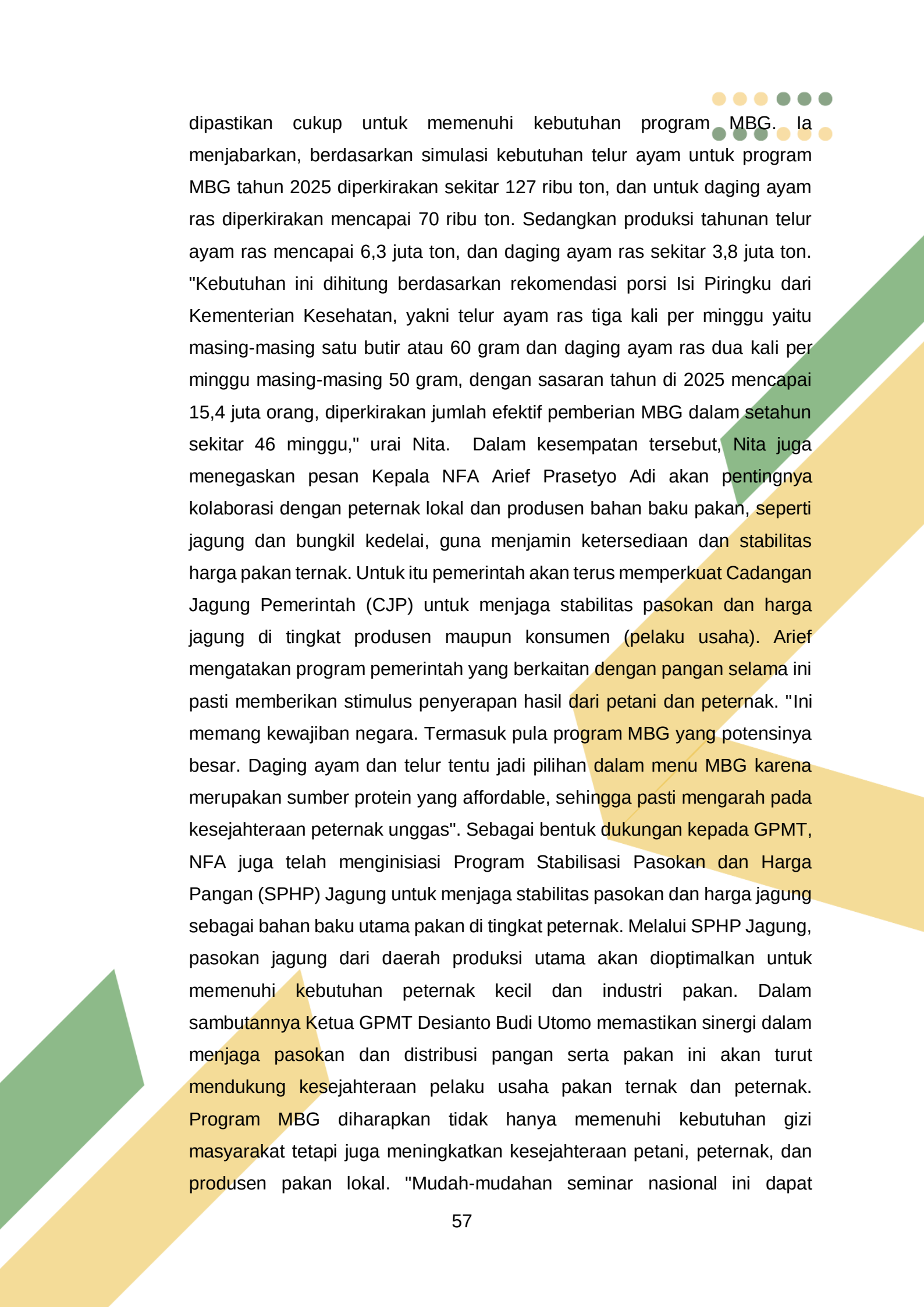
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus memperkuat langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pengurangan Food Loss And Waste (FLW) melalui Gerakan Selamatkan Pangan: Stop Boros Pangan yang telah diinisiasi sejak 2022. Program ini juga turut mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Pejabat Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Pangan NFA Nita Yulianis menegaskan bahwa keberhasilan gerakan ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pihak dan lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa dan civitas akademika. "Mahasiswa dan civitas akademika dapat menjadi agen perubahan Stop Boros Pangan melalui edukasi, literasi, serta promosi perilaku bijak mengonsumsi pangan bagi keluarga, teman, masyarakat dan lingkungan sekitarnya," ujar Nita saat memberikan Kuliah Umum di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (30/11/2024). Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang penyelamatan pangan untuk mencegah dan 13 mengurangi FLW. "Kampanye daring yang kreatif dan informatif dapat mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam gerakan ini," ujarnya. Selain itu, dukungan



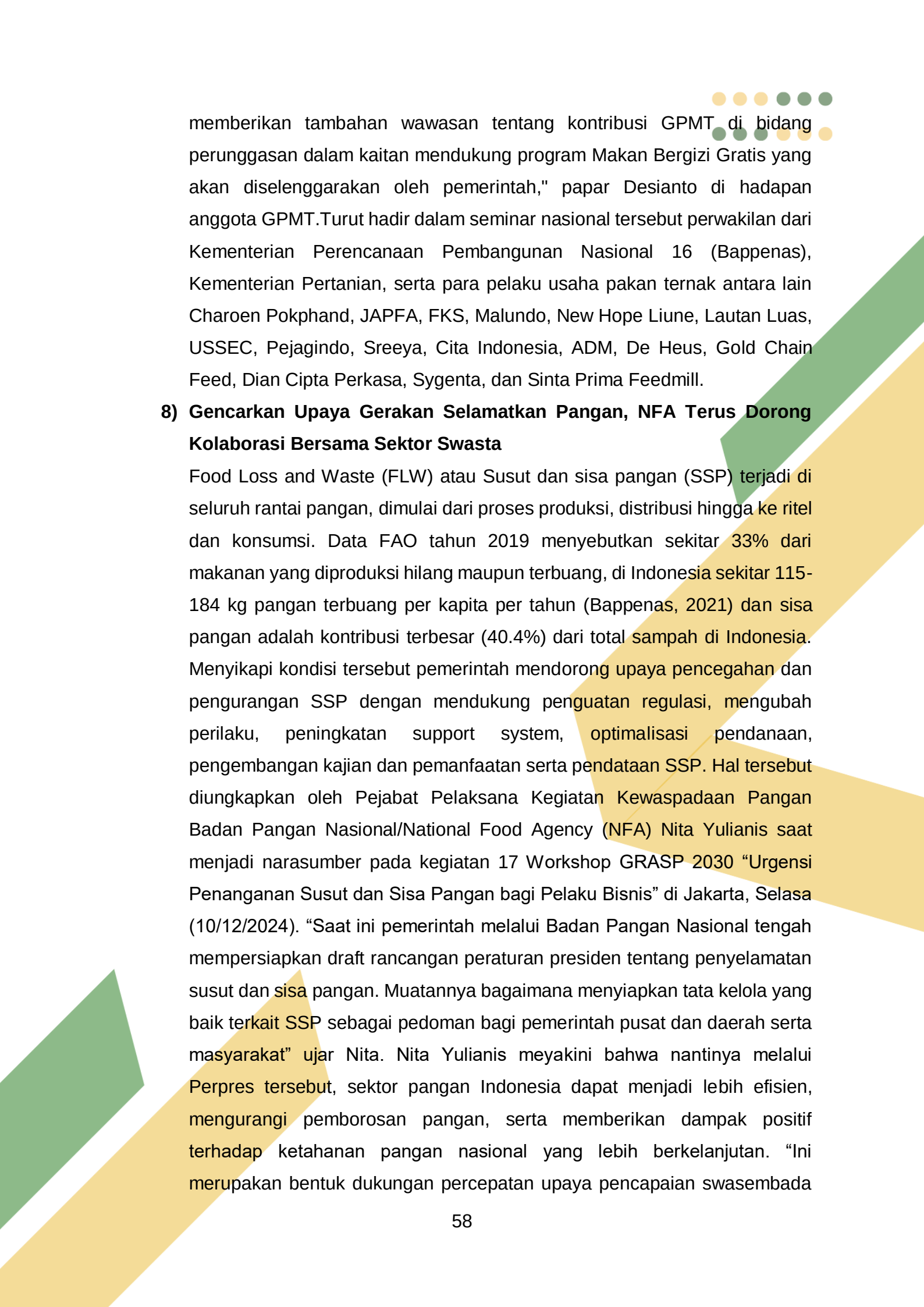
dalam Penelitian dan Inovasi Teknologi terkait penyelamatan pangan maupun FLW juga sangat diperlukan. Setiap tahun, Indonesia kehilangan 23-48 juta ton pangan. Data menunjukkan bahwa 40% sampah di Indonesia merupakan sampah makanan. Jika dikelola dengan baik, potensi pangan yang terbuang dapat memenuhi kebutuhan makan bagi 61-125 juta orang, setara 29-47% populasi Indonesia. Ironisnya, saat ini 62 kabupaten/kota masih menghadapi kerawanan pangan. Timbulan FLW juga berdampak pada lingkungan dimana berkontribusi pada emisi gas rumah kaca sebesar 7,29%. Kerugian ekonomi yang disebabkan FLW mencapai Rp231-551 Triliun per tahun setara 4-5% PDB Indonesia. "Untuk mencapai target pengurangan 75% FLW pada 2045, kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk mahasiswa dan civitas akademika. Mari bersama-sama kita jadikan Gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari demi mendukung visi Indonesia Emas 2045," tutup Nita. Upaya penyelamatan pangan merupakan bagian dari ekonomi sirkular dalam mendukung penerapan ekonomi hijau serta turut mendukung transformasi sistem pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia 2045

7) Dukungan NFA bagi Para Peternak Unggas untuk Menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Program Hasil Terbaik Cepat 1 (PHTC1) yang akan dimulai pada awal tahun 2025, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendukung kolaborasi para peternak unggas selaku produsen pangan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. "Perlu upaya bersama bagaimana kita memastikan bahwa produksi dalam negeri kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dapat kita capai bersama. Karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, upaya untuk pemenuhan makan bergizi gratis ini sebesar-besarnya bersumber dari produksi dalam negeri," ujar Pejabat Pelaksana Kewaspadaan Pangan NFA Nita Yulianis dalam seminar Bisnis Perunggasan Overview 2024 dan Outlook 2025 "Peran GPMT dalam Ketahanan Pangan serta Peningkatan Gizi Nasional" yang diselenggarakan secara hybrid oleh Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Selasa (3/12/2024). Nita juga mengungkapkan bahwa produksi dalam negeri komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras



dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Ia menjabarkan, berdasarkan simulasi kebutuhan telur ayam untuk program MBG tahun 2025 diperkirakan sekitar 127 ribu ton, dan untuk daging ayam ras diperkirakan mencapai 70 ribu ton. Sedangkan produksi tahunan telur ayam ras mencapai 6,3 juta ton, dan daging ayam ras sekitar 3,8 juta ton. "Kebutuhan ini dihitung berdasarkan rekomendasi porsi Isi Piringku dari Kementerian Kesehatan, yakni telur ayam ras tiga kali per minggu yaitu masing-masing satu butir atau 60 gram dan daging ayam ras dua kali per minggu masing-masing 50 gram, dengan sasaran tahun di 2025 mencapai 15,4 juta orang, diperkirakan jumlah efektif pemberian MBG dalam setahun sekitar 46 minggu," urai Nita. Dalam kesempatan tersebut, Nita juga menegaskan pesan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi akan pentingnya kolaborasi dengan peternak lokal dan produsen bahan baku pakan, seperti jagung dan bungkil kedelai, guna menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pakan ternak. Untuk itu pemerintah akan terus memperkuat Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung di tingkat produsen maupun konsumen (pelaku usaha). Arief mengatakan program pemerintah yang berkaitan dengan pangan selama ini pasti memberikan stimulus penyerapan hasil dari petani dan peternak. "Ini memang kewajiban negara. Termasuk pula program MBG yang potensinya besar. Daging ayam dan telur tentu jadi pilihan dalam menu MBG karena merupakan sumber protein yang affordable, sehingga pasti mengarah pada kesejahteraan peternak unggas". Sebagai bentuk dukungan kepada GPMT, NFA juga telah menginisiasi Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung sebagai bahan baku utama pakan di tingkat peternak. Melalui SPHP Jagung, pasokan jagung dari daerah produksi utama akan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan peternak kecil dan industri pakan. Dalam sambutannya Ketua GPMT Desianto Budi Utomo memastikan sinergi dalam menjaga pasokan dan distribusi pangan serta pakan ini akan turut mendukung kesejahteraan pelaku usaha pakan ternak dan peternak. Program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan produsen pakan lokal. "Mudah-mudahan seminar nasional ini dapat



memberikan tambahan wawasan tentang kontribusi GPMT di bidang perunggasan dalam kaitan mendukung program Makan Bergizi Gratis yang akan diselenggarakan oleh pemerintah," papar Desianto di hadapan anggota GPMT. Turut hadir dalam seminar nasional tersebut perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 16 (Bappenas), Kementerian Pertanian, serta para pelaku usaha pakan ternak antara lain Charoen Pokphand, JAPFA, FKS, Malundo, New Hope Liune, Lautan Luas, USSEC, Pejagindo, Sreeya, Cita Indonesia, ADM, De Heus, Gold Chain Feed, Dian Cipta Perkasa, Sygenta, dan Sinta Prima Feedmill.

8) Gencarkan Upaya Gerakan Selamatkan Pangan, NFA Terus Dorong Kolaborasi Bersama Sektor Swasta

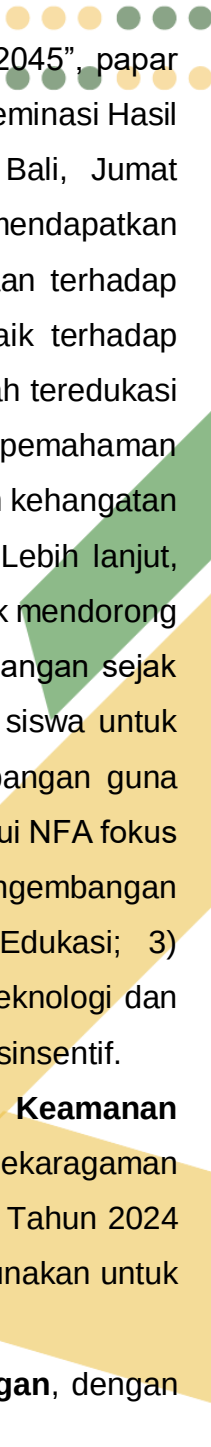
Food Loss and Waste (FLW) atau Susut dan sisa pangan (SSP) terjadi di seluruh rantai pangan, dimulai dari proses produksi, distribusi hingga ke ritel dan konsumsi. Data FAO tahun 2019 menyebutkan sekitar 33% dari makanan yang diproduksi hilang maupun terbuang, di Indonesia sekitar 115-184 kg pangan terbuang per kapita per tahun (Bappenas, 2021) dan sisa pangan adalah kontribusi terbesar (40.4%) dari total sampah di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut pemerintah mendorong upaya pencegahan dan pengurangan SSP dengan mendukung penguatan regulasi, mengubah perilaku, peningkatan support system, optimalisasi pendanaan, pengembangan kajian dan pemanfaatan serta pendataan SSP. Hal tersebut diungkapkan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nita Yulianis saat menjadi narasumber pada kegiatan 17 Workshop GRASP 2030 “Urgensi Penanganan Susut dan Sisa Pangan bagi Pelaku Bisnis” di Jakarta, Selasa (10/12/2024). “Saat ini pemerintah melalui Badan Pangan Nasional tengah mempersiapkan draft rancangan peraturan presiden tentang penyelamatan susut dan sisa pangan. Muatannya bagaimana menyiapkan tata kelola yang baik terkait SSP sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat” ujar Nita. Nita Yulianis meyakini bahwa nantinya melalui Perpres tersebut, sektor pangan Indonesia dapat menjadi lebih efisien, mengurangi pemborosan pangan, serta memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan nasional yang lebih berkelanjutan. “Ini merupakan bentuk dukungan percepatan upaya pencapaian swasembada



pangan pada tahun 2027 seperti yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo” tegasnya. Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) pada tahun 2024 ini telah dialokasikan di 15 provinsi, Nita menyebut upaya kolaboratif terus dilakukan NFA dengan menggandeng para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat penyelamatan pangan untuk sosialisasi dan promosi serta pembagian donasi pangan. Lebih lanjut, Pejabat Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Pangan NFA itu juga menekankan pentingnya data susut dan sisa pangan yang akurat guna menyusun kebijakan yang efektif serta perencanaan dan target penurunan susut dan sisa pangan lima tahun ke depan. “Badan Pangan Nasional bersama dengan Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) beberapa waktu lalu telah meluncurkan metode baku perhitungan SSP, semoga metode ini bisa menjadi rujukan dalam mengukur tingkat kehilangan pangan, sehingga selain perhitungan menjadi akurat” tuturnya. Pada kesempatan tersebut Kepala Sekretariat Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) Gina Karina pada sambutannya menyebutkan bahwa kerugian ekonomi yang disebabkan oleh SSP tidaklah sedikit. “Berdasarkan data Bappenas, Indonesia menghasilkan susut dan sisa pangan atau food loss and waste sebanyak 115-184 kg per kapita per tahun pada periode tahun 2000-2019. Kerugian ekonomi yang 18 dihasilkan juga tidak sedikit, yakni sekitar 4-5% dari PDB Indonesia per tahun” ungkap Gina.

9) Pilot Penyelamatan Pangan Dukung Pemenuhan Gizi Anak Sekolah di Provinsi Bali

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama GAIN, PIKAT dan SOS melaksanakan Pilot Penyelamatan Pangan Untuk Pemenuhan Gizi Anak Sekolah di SDN 2 Besakih Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Telah dilakukan sebanyak 12 kali pendistribusian makanan bagi 233 siswa penerima manfaat. Kegiatan ini merupakan kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak terutama mitra kerja dari sektor retail, hotel, restoran serta produsen pangan. “Diperlukan kolaborasi dan koordinasi sinergi antara pemerintah baik pusat dan daerah, akademisi, bisnis, komunitas serta media massa guna mendukung keberlanjutan program Penyelamatan Pangan Untuk Pemenuhan Gizi Anak Sekolah. Tujuannya agar program ini dapat dikembangkan sehingga dapat lebih banyak memberi



manfaat bagi masyarakat guna mewujudkan Generasi Emas 2045”, papar Pj Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Pangan dalam Acara Diseminasi Hasil Pelaksanaan Pilot Tata Kelola Penyelamatan Pangan di Bali, Jumat (27/12/2024. Berdasarkan hasil evaluasi, program ini mendapatkan apresiasi dan para siswa umumnya menunjukkan kegembiraan terhadap makanan yang disajikan, menunjukkan penerimaan yang baik terhadap kualitas dan variasi makanan. Perubahan perilaku siswa setelah teredukasi seperti perilaku kebersihan anak (kebiasaan cuci tangan dan pemahaman gizi), kedisiplinan dan perubahan sosial (budaya mengantre dan kehangatan sosial), dan utamanya kesadaran untuk stop boros pangan. Lebih lanjut, disebutkan oleh Nita Yulianis bahwa diperlukan kesadaran untuk mendorong perilaku stop boros pangan. “Edukasi mengenai stop boros pangan sejak dini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran kepada para siswa untuk menghargai makanan dan mendorong perilaku stop boros pangan guna mendukung penyelamatan pangan” tuturnya. Pemerintah melalui NFA fokus melakukan 5 strategi penyelamatan pangan mencakup 1) Pengembangan kebijakan dan regulasi; 2) Peningkatan kapasitas dan Edukasi; 3) Peningkatan koordinasi dan kerja sama; 4) Pengembangan Teknologi dan Sarana Prasarana; 5) Mendorong Implementasi Insentif dan Disinsentif.

3. Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pada periode bulan Desember Tahun 2024 telah ter-realisasi anggaran sebesar Rp. 2.551.282.022,- yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

a **Direktorat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Kampanye pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) kepada generasi muda melalui RASA (Ramadan With B2SA) yang Jakarta.
- 2) Sosialisasi dan edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan nasional melalui kegiatan Ramadhan with B2SA bersama Gerakan Berbagi (Gebrag) Ramadhan CT Arsa Foundation, di Lensa Anak Terminal, Depok;

- 
- 3) Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Kompleks Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta;
 - 4) Sosialisasi dan edukasi pentingnya konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Ramadhan Fest di Kota Bogor;
 - 5) Edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada anak-anak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat sejak usia dini Ramadhan with B2SA (RASA) di Sekolah Dasar Negeri Karang Asih, Cikarang.
 - 6) Edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada generasi muda di Sekolah Master, Depok;
 - 7) Edukasi tentang pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), berkolaborasi dengan ISFERA (Islamic Festival Ramadan) selenggarakan Ramadan With B2SA di SDN 06 Cipinang Muara Jakarta Timur.

b **Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan**, dengan kegiatan antara lain:

1) Rapat Koordinasi Pembahasan Pending Issue RPP Perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019

Rapat ini diawali dengan pembahasan permasalahan di bidang keamanan pangan segar diantaranya mekanisme koordinasi pengawasan keamanan pangan, penolakan ekspor pala, dan koordinasi penyelenggaraan urusan pangan. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pembahasan pending issue terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Adapun hal yang dibahas adalah Pasal 47 ayat 2 terkait Pengawasan Pangan Olahan dan Pasal 50 terkait koordinator penguatan pengawasan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Hal ini masih menjadi pending issue disebabkan pada saat selesai harmonisasi, BPOM belum melakukan paraf karena dinilai masih terdapat substansi yang belum selesai, sehingga perlu dilakukan rakornis. Oleh karena itu, perlu fasilitasi oleh Deputi Keamanan Mutu Pangan dan Gizi Kementerian Koordinator Pangan (Kemenko Pangan) untuk dapat membantu menyelesaikan pending issue tersebut. Badan Pangan Nasional mengusulkan hal tersebut agar dapat dikoordinasikan kembali dan juga



mengusulkan Badan Karantina Indonesia (Barantin) perlu dilibatkan dalam rantai koordinasi keamanan pangan tersebut. Rapat dilaksanakan tanggal 3 Desember 2024, di Ruang Op Room, Lantai 4 Badan Pangan Nasional. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dan dihadiri oleh Asisten Deputi Keamanan Mutu Pangan dan Gizi Kementerian Koordinator Pangan, Plt. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, perwakilan Biro Organisasi, Sumberdaya Laporan Bulan Desember 2024 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan 8 Manusia dan Hukum (OSH), serta fungsional dan staf Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

2) Rapat Pembahasan Hasil Kajian National Food Control System

Rapat Pembahasan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 9 Desember 2024. Rapat dibuka oleh Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional dan dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi Kementerian Koordinator Pangan (Sabbat Christian Jannes), Pakar IPB Prof. Dr. Ir. Purwiyatno Hariyadi, Ph.D serta perwakilan lingkup Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Sebelum adanya Badan Pangan Nasional, untuk mewujudkan ketahanan pangan terpadu, pemerintah membentuk Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN), dengan tujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar lembaga dan membangun koordinasi sinergis dalam rangka meningkatkan kegiatan keamanan pangan. Pengawasan pangan dilaksanakan oleh 5 otoritas kompeten yang berbeda, diantaranya Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Kesehatan. Masing-masing otoritas ini memiliki indikator capaian status keamanan pangan yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat menggambarkan secara riil status keamanan pangan secara nasional. Berdasarkan kajian Sistem Pengendalian Pangan Nasional (SPPN) yang dilaksanakan oleh Seafast Center IPB bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa perlu dilakukan harmonisasi regulasi, dan mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga tersebut. Untuk itu, diperlukan koordinator nasional yang otoritatif untuk memastikan

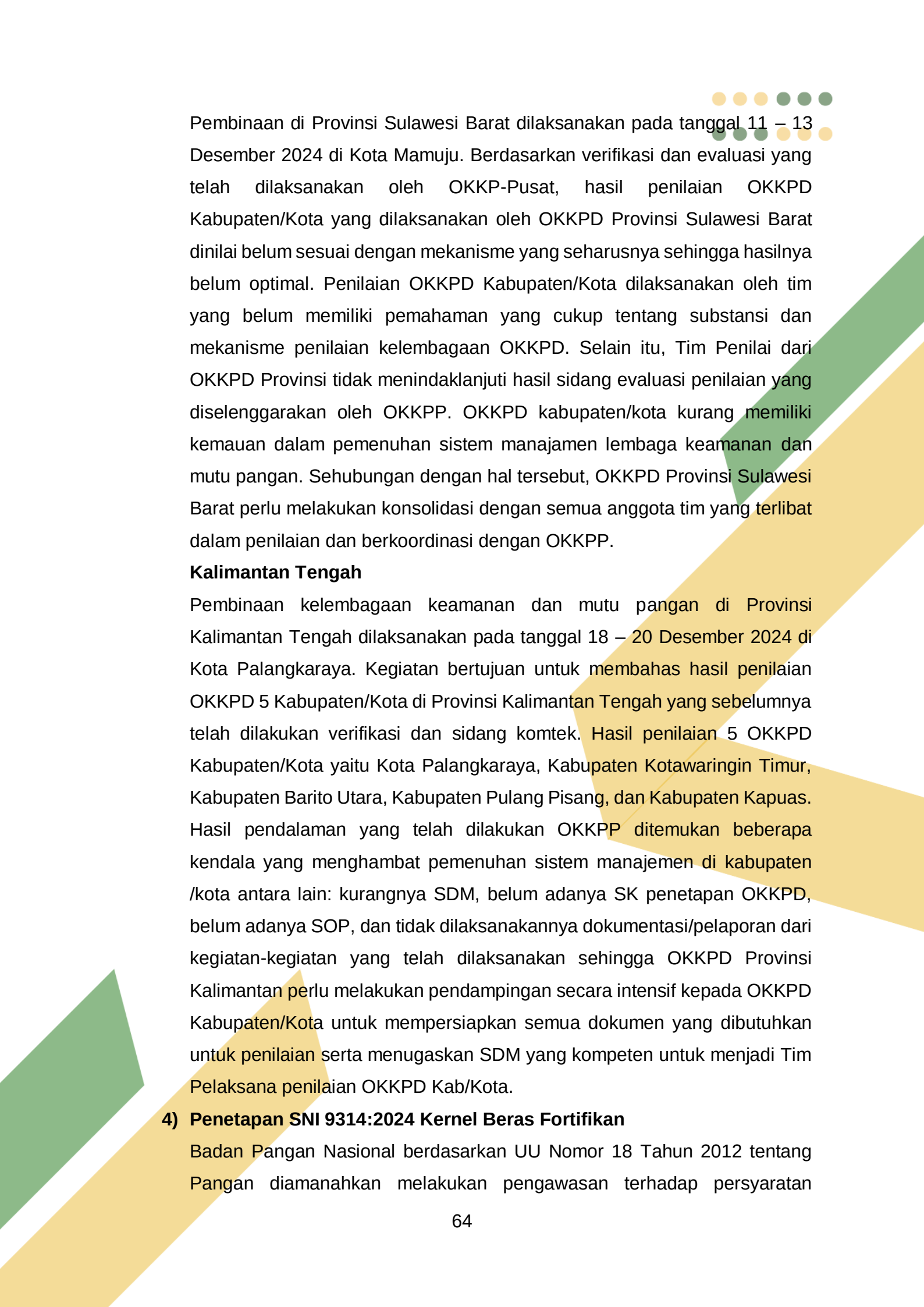


keterpaduan yang baik. Koordinator nasional ini tidak hanya perlu mengkoordinasikan proses harmonisasi regulasi, tetapi juga sistem manajemen antar Otoritas Kompeten (kementerian/lembaga) dalam mengimplementasikan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT). Sebelumnya, berdasarkan Laporan Bulan Desember 2024 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan 9 kajian tersebut, Bappenas diusulkan sebagai koordinator. Namun, dengan dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, peran tersebut lebih sesuai jika dilaksanakan oleh Kementerianko ini. Berdasarkan Surat Menteri Sekretariat Negara No. B-562/M/D-1/HK.02.02/11/2024 tanggal 4 November 2024, penyelesaian RPP tentang Perubahan atas PP No. 86/2019 dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dengan dukungan hasil kajian SPPN ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan ulang Pasal 50 RPP Perubahan PP No. 86/2019 tentang Keamanan Pangan yang saat ini masih menjadi pending issue. Terdapat 3 skenario harmonisasi regulasi dan sekaligus.

3) Pembinaan Penilaian OKKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-Pusat) melakukan penilaian dan pemberian sertifikat hasil penilaian terhadap OKKPD Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Selanjutnya, melalui dana dekonsentrasi tahun 2024, OKKPD Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah melakukan penilaian terhadap 5 OKKPD Kabupaten/Kota masing-masing provinsi. Hasil penilaian tersebut kemudian diverifikasi oleh OKKP-Pusat dan selanjutnya dibahas pada sidang penilaian untuk diputuskan hasil penilaiannya. Pembinaan kelembagaan dilakukan oleh OKKP Pusat di dua provinsi ini berdasarkan hasil sidang evaluasi penilaian yang dilakukan OKKPD Provinsi terhadap OKKPD Kabupaten/Kota dinilai kurang memenuhi ketentuan sesuai Perbadan 12/2023. Lebih jelasnya pembinaan yang dilaksanakan di dua provinsi tersebut sebagai berikut:

Sulawesi Barat



Pembinaan di Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 Desember 2024 di Kota Mamuju. Berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh OKKP-Pusat, hasil penilaian OKKPD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh OKKPD Provinsi Sulawesi Barat dinilai belum sesuai dengan mekanisme yang seharusnya sehingga hasilnya belum optimal. Penilaian OKKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh tim yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang substansi dan mekanisme penilaian kelembagaan OKKPD. Selain itu, Tim Penilai dari OKKPD Provinsi tidak menindaklanjuti hasil sidang evaluasi penilaian yang diselenggarakan oleh OKKPP. OKKPD kabupaten/kota kurang memiliki kemauan dalam pemenuhan sistem manajemen lembaga keamanan dan mutu pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, OKKPD Provinsi Sulawesi Barat perlu melakukan konsolidasi dengan semua anggota tim yang terlibat dalam penilaian dan berkoordinasi dengan OKKPP.

Kalimantan Tengah

Pembinaan kelembagaan keamanan dan mutu pangan di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Desember 2024 di Kota Palangkaraya. Kegiatan bertujuan untuk membahas hasil penilaian OKKPD 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan sidang komtek. Hasil penilaian 5 OKKPD Kabupaten/Kota yaitu Kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Pulang Pisang, dan Kabupaten Kapuas. Hasil pendalaman yang telah dilakukan OKKPP ditemukan beberapa kendala yang menghambat pemenuhan sistem manajemen di kabupaten/kota antara lain: kurangnya SDM, belum adanya SK penetapan OKKPD, belum adanya SOP, dan tidak dilaksanakannya dokumentasi/pelaporan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga OKKPD Provinsi Kalimantan perlu melakukan pendampingan secara intensif kepada OKKPD Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian serta menugaskan SDM yang kompeten untuk menjadi Tim Pelaksana penilaian OKKPD Kab/Kota.

4) Penetapan SNI 9314:2024 Kernel Beras Fortifikan

Badan Pangan Nasional berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diamanahkan melakukan pengawasan terhadap persyaratan



keamanan, mutu, dan gizi pangan segar termasuk persyaratan mutu beras fortifikasi. Selain itu, sesuai PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, kepala lembaga dapat menyusun SNI bagi pangan yang difortifikasi. Untuk itu, dilakukan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kernel Beras Fortifikan. SNI tersebut disusun oleh Badan Pangan Nasional melalui Komite Teknis (Komtek) 67-11 Pangan Segar Tertentu yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BSN No. 531/KEP/BSN/11/2023 pada tanggal 28 November 2023 dengan anggota dari perwakilan pakar, pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. SNI Kernel Beras Fortifikan ini mencakup persyaratan, pengambilan contoh dan metode uji, cara produksi pangan yang baik, pengemasan dan penyimpanan serta pelabelan kernel beras fortifikan. Penyusunan SNI ini telah melalui tahapan penyusunan sampai ditetapkan yaitu rapat konsolidasi, rapat teknis, rapat konsensus hingga jejak pendapat sebelum pada akhirnya penetapan RSNI. Berdasarkan hasil jajak pendapat, hanya diperoleh masukan terhadap redaksional penulisan sehingga tidak diperlukan pembahasan lebih lanjut. Setelah dilakukan perbaikan redaksional oleh BSN, kemudian rancangan tersebut ditetapkan sebagai SNI 9314:2024 Kernel Beras Fortifikan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 641/KEP/BSN/12/2024 pada tanggal 10 Desember 2024.

5) Studi Lapang Kebijakan dan Penerapan Sustainable Rice Platform

Studi Lapang Kebijakan dan Penerapan SRP dilaksanakan dalam rangka pertukaran pengalaman implementasi Sustainable Rice Platform (SRP) on Low Carbon Emission di negara-negara yang telah menjadi anggota dan telah memperoleh sertifikasi maupun negara lokasi pilot project sebagaimana yang dilakukan di Indonesia yang melibatkan multipihak secara terstruktur dan produktif dalam pengembangan beras berkelanjutan dan meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitas para pemangku kepentingan atas kebijakan budidaya padi dan produksi beras berkelanjutan. Kegiatan Studi Lapang Kebijakan dan Penerapan SRP selain pertemuan juga ada kunjungan lapang ke Bangsue Chia Meng Rice Mill, dan diakhiri dengan keikutsertaan dalam The 3rd Global Sustainable Rice Conference & Exhibition 2024. Kunjungan lapang dilaksanakan oleh Konsorsium Low Carbon Rice Project yang terdiri dari Preferred by Nature,



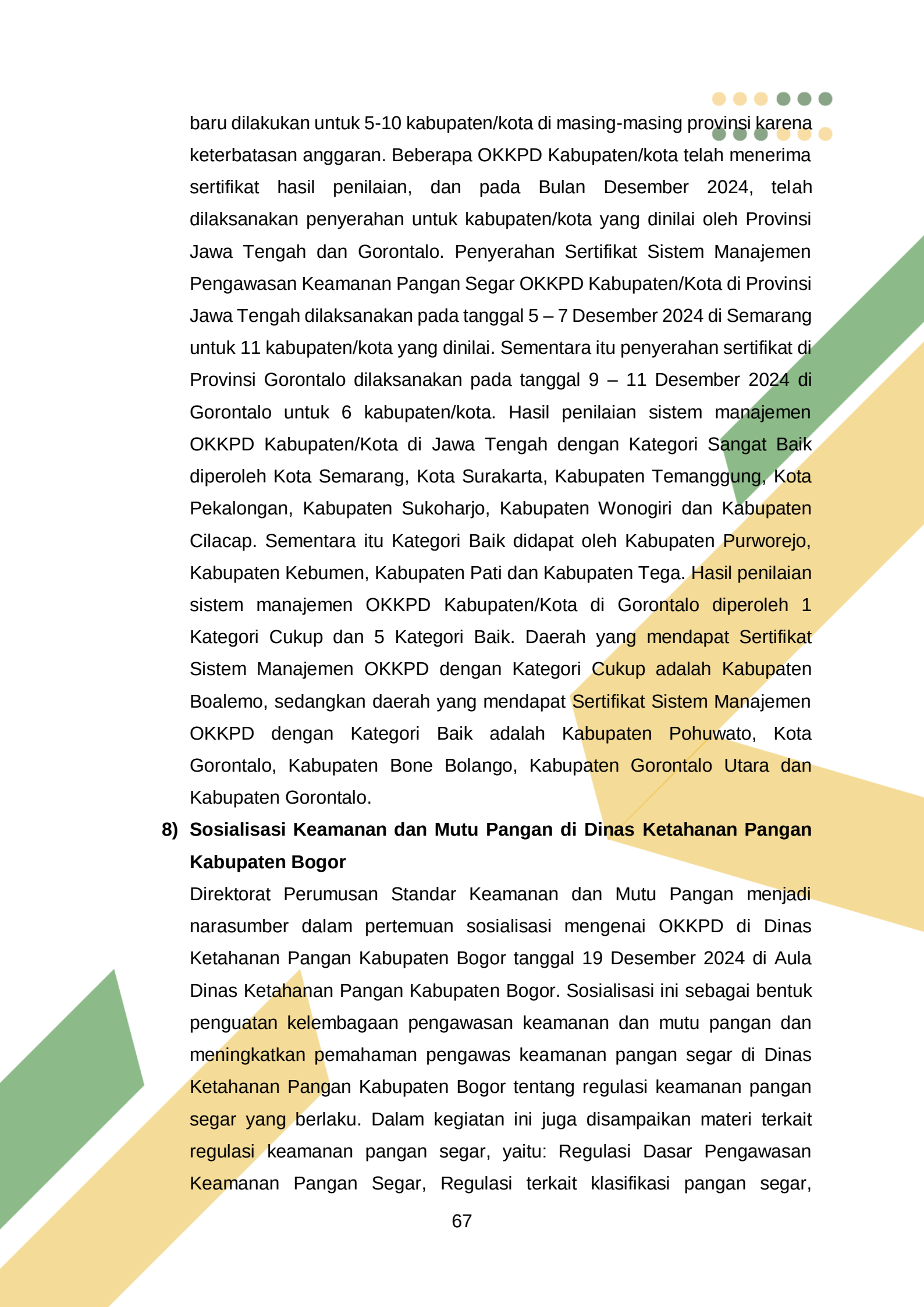
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), dan Perkumpulan Pengusaha Beras dan Penggilingan Padi Indonesia (PERPADI) yang didukung oleh Switch Asia | EU pada tanggal 24 – 26 November 2024 berlokasi di Kota Bangkok, Thailand. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pangan Nasional, yaitu: Dr. Sri Nuryanti bersama perwakilan dari Bappenas, Kementerian Pertanian, Sustainable Rice Platform National Working Group (SRP NWG), Preferred by Nature, KRKP dan PERPADI.

6) Mengikuti Pelatihan Market Controls in the Sectors of Agri-food di Yunani

Pelatihan ini diselenggarakan oleh European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) melalui program Better Training for Safer Food (BTSF) Initiative. BTSF initiative adalah inisiatif Komisi Eropa yang dirancang untuk mengembangkan strategi pelatihan Uni Eropa di bidang hukum pangan, hukum pakan, kesehatan hewan, aturan kesejahteraan hewan, dan aturan kesehatan tanaman. Pelatihan ini dilaksanakan di Amelia Athens Hotel, Yunani tanggal 10 -13 Desember 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta menyelaraskan regulasi otoritas kompeten keamanan pangan di negara anggota Uni Eropa dan negara non-Uni Eropa dalam melaksanakan pengawasan terhadap indikasi geografis produk pertanian, minuman anggur dan minuman beralkohol. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa negara Asia dan Uni Eropa, yaitu: Indonesia, Malaysia, India, Armenia, Belgium, Bulgaria, Brazil, Chili, Cyprus, Jerman, Estonia, Prancis, Georgia, Polandia, Italia, Lituania, Macedonia Utara, Romania, Slovenia dan Turki. Peserta dari Badan Pangan Nasional yaitu Wara Fitria Tristiyanti, Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dan Tsara Mufidah, Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama pada Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

7) Evaluasi dan Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar OKKPD Kabupaten/Kota

Penilaian sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar oleh 15 Provinsi terhadap OKKPD Kabupaten/kota lingkup masing-masing provinsi telah selesai dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi. Namun penilaian ini



baru dilakukan untuk 5-10 kabupaten/kota di masing-masing provinsi karena keterbatasan anggaran. Beberapa OKKPD Kabupaten/kota telah menerima sertifikat hasil penilaian, dan pada Bulan Desember 2024, telah dilaksanakan penyerahan untuk kabupaten/kota yang dinilai oleh Provinsi Jawa Tengah dan Gorontalo. Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar OKKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Desember 2024 di Semarang untuk 11 kabupaten/kota yang dinilai. Sementara itu penyerahan sertifikat di Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Desember 2024 di Gorontalo untuk 6 kabupaten/kota. Hasil penilaian sistem manajemen OKKPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan Kategori Sangat Baik diperoleh Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Cilacap. Sementara itu Kategori Baik didapat oleh Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pati dan Kabupaten Tega. Hasil penilaian sistem manajemen OKKPD Kabupaten/Kota di Gorontalo diperoleh 1 Kategori Cukup dan 5 Kategori Baik. Daerah yang mendapat Sertifikat Sistem Manajemen OKKPD dengan Kategori Cukup adalah Kabupaten Boalemo, sedangkan daerah yang mendapat Sertifikat Sistem Manajemen OKKPD dengan Kategori Baik adalah Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo.

8) Sosialisasi Keamanan dan Mutu Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menjadi narasumber dalam pertemuan sosialisasi mengenai OKKPD di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor tanggal 19 Desember 2024 di Aula Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Sosialisasi ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan dan meningkatkan pemahaman pengawas keamanan pangan segar di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor tentang regulasi keamanan pangan segar yang berlaku. Dalam kegiatan ini juga disampaikan materi terkait regulasi keamanan pangan segar, yaitu: Regulasi Dasar Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Regulasi terkait klasifikasi pangan segar,



Regulasi terkait batas maksimal cemaran pangan segar di peredaran (Peraturan Badan Pangan Nasional No. 10 Tahun 2024), Regulasi terkait batas maksimal residu pestisida pada PSAT (Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 Tahun 2024), Regulasi terkait mutu dan label beras (Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2023) dan Regulasi terkait label pangan segar (Peraturan Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2023).

9) Pelatihan Optimalisasi Penggunaan Microsoft Power Point

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melaksanakan upaya peningkatan kompetensi non-teknis sumberdaya manusia melalui Pelatihan Optimalisasi Penggunaan Microsoft Powerpoint tanggal 20 Desember 2024 di kantor Badan Pangan Nasional. Pelatihan peningkatan kompetensi non-teknis dalam bidang digital ini merupakan salah satu upaya akselerasi transformasi sumberdaya manusia dalam instansi pemerintahan. Akselerasi transformasi sumberdaya manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional untuk menciptakan aset bangsa dengan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, dan profesional. Pelatihan ini menghadirkan narasumber, seorang Certified Trainer BNSP yang berpengalaman di bidang presentation designer. Peserta pelatihan ini adalah pegawai/staf fungsional dari Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan serta perwakilan dari Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

10) Pencapaian Predikat Sangat Baik atas Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Badan Pangan Nasional

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu instrumen penting dalam menentukan kualitas Reformasi Birokrasi (RB) yang bertujuan meningkatkan kinerja aparatur negara dan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, penguatan partisipasi dalam pengukuran IKK dari seluruh instansi pemerintah sangat diperlukan. Melalui komitmen bersama tersebut, IKK diharapkan mampu menjadi rujukan proses pengelolaan kebijakan yang berkualitas, yang bermuara pada perbaikan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah. IKK menilai kualitas kebijakan pemerintah dari proses pembuatan kebijakan, pengelolaan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi. IKK dapat menjadi rujukan



untuk mengelola kebijakan yang berkualitas, sehingga dapat memperbaiki pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, Badan Pangan Nasional telah berinisiatif melaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2024 dengan objek pengukuran tiga kebijakan melalui sistem informasi IKK. Berdasarkan validasi akhir Tim Nasional IKK terhadap hasil self assessment kebijakan yang menjadi objek pengukuran IKK oleh Badan Pangan Nasional Tahun 2024 diperoleh hasil penilaian dengan kategori Sangat Baik pada tiga kebijakan Badan Pangan Nasional yang disampaikan melalui surat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8572/D.1/PEP.07 tanggal 6 Desember 2024 tentang Penyampaian Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Badan Pangan Nasional Tahun 2024. Satu dari tiga kebijakan Badan Pangan Nasional tahun 2024 tersebut adalah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun Laporan Bulan Desember 2024 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan 16 2023 tentang Label Pangan Segar, yang disusun oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

11) Penetapan dan Pengundangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Batas Maksimal Residu Pestisida dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan

Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional pada tanggal 18 Desember 2024 dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 20 Desember 2024. Penyusunan peraturan ini telah memenuhi kaidah penyusunan peraturan yang baik dimana telah dilaksanakan beberapa tahap penyusunan peraturan perundangan sejak tahun 2023 yaitu dimulai dengan brainstorming, pembahasan draft (Februari – Juli 2024), konsultasi publik (13-17 Agustus 2024), dan finalisasi draft. Harmonisasi dilaksanakan beberapa kali sejak Oktober - November 2024. Peraturan Badan Pangan Nasional ini bersifat lintas sektoral dan telah ditelaah oleh



Sekretaris Kabinet serta telah mendapatkan izin Presiden. Perbadan ini merupakan acuan dalam melakukan pengawasan keamanan pangan segar. Subtansi dari peraturan ini adalah pemenuhan batas maksimal residu pestisida, pengujian, pengawasan, pengkajian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam penyusunan Perbadan ini adalah Kemenkumham (Tim Harmonisasi), Sekretaris Kabinet, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari Badan Pangan Nasional yang terlibat adalah dari Biro OSH, Biro PKH, Direktorat Ketersediaan Pangan, Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Rapat Koordinasi Pembangunan Aplikasi Standar Keamanan dan Mutu Pangan Rapat Koordinasi ini dilakukan dengan Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional, yang bertujuan untuk membahas rencana pengembangan sarana informasi terkait standar keamanan dan mutu pangan dalam bentuk aplikasi. Aplikasi tersebut ke depannya akan menjadi acuan bagi petugas keamanan pangan daerah dalam melaksanakan pengawasan di lapangan dan juga pelaku usaha dalam pemenuhan terhadap standar keamanan dan mutu pangan khususnya untuk produk pangan segar. Aplikasi yang akan dikembangkan diantaranya terkait regulasi keamanan dan mutu pangan seperti klasifikasi pangan segar, batas maksimal cemaran dalam pangan segar dan batas maksimal residu pestisida dalam PSAT. Pengembangan aplikasi ini direncanakan selesai dalam waktu 3 bulan melalui ekatalog. Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan akan menyusun KAK berkoordinasi dengan Pusdatin.

12)Kajian Keamanan dan Mutu Kayumanis

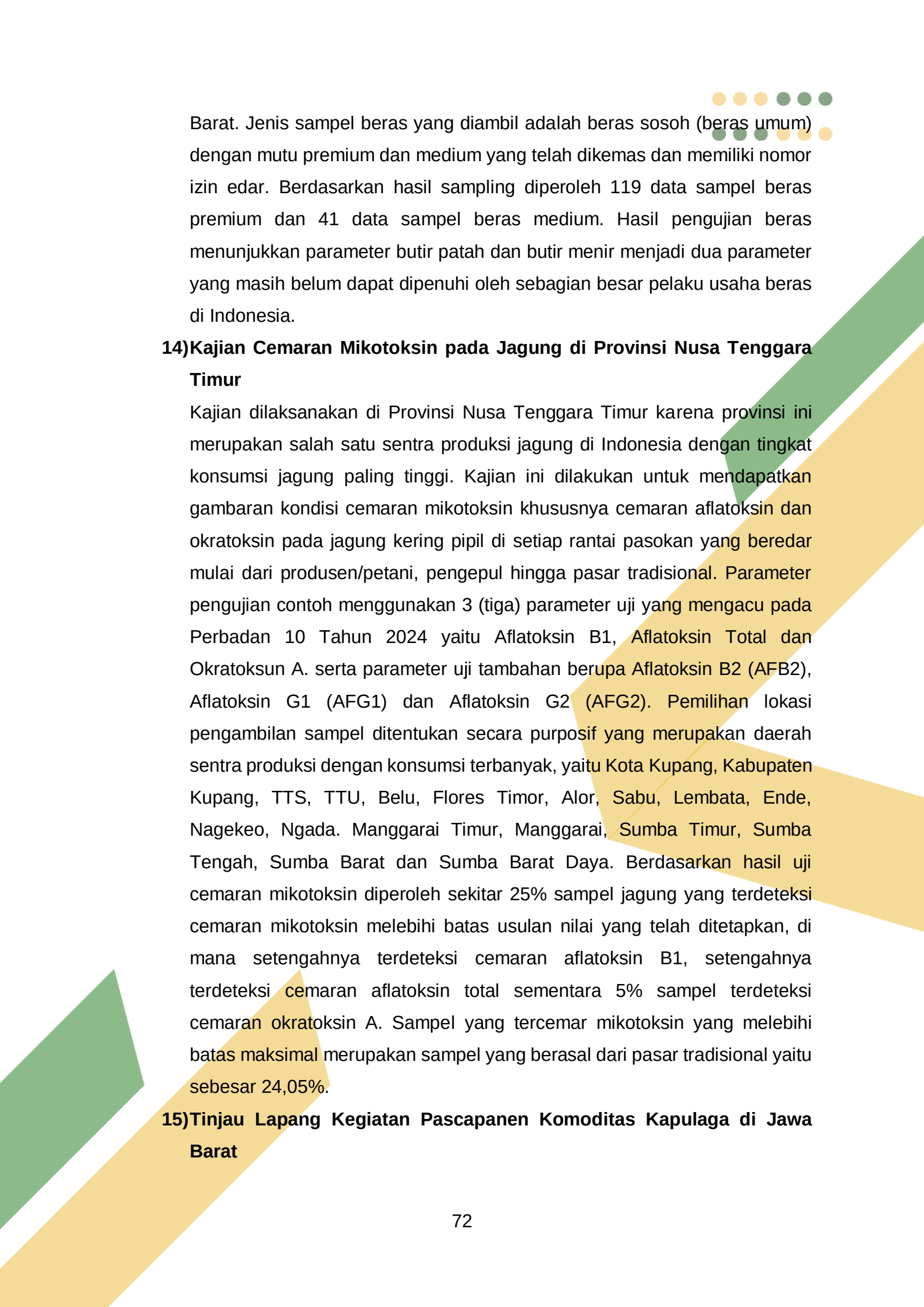
Badan Pangan Nasional selaku Koordinator Mirror Committee (MC) Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) Indonesia, melakukan kajian keamanan dan mutu kayumanis sebagai bahan penyusunan kertas posisi Indonesia pada forum electronic working group CCSCH untuk pembahasan standar kayumanis. Kajian ini dilakukan melalui pengambilan contoh dan pengujian untuk menghasilkan data dan informasi yang



dibutuhkan. Lokasi pengambilan sampel dipilih secara purposif pada 6 provinsi (Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan) yang merupakan sentra produksi kayumanis atau lokasi eksportir berada. Dari masing masing provinsi dipilih 2-5 eksportir/pengepul dan / atau pasar tradisional untuk dilakukan sampling. Bentuk sampel yang diambil berdasarkan Conference Room Document (CRD) 07 Document Proposal for New Work on Codex Standard for Dried Cinnamon yang merupakan salah satu bahan pada Sidang CCSCH ke-7 di India, tersedia dalam 3 bentuk, yaitu whole, pieces/cut/cracked/broken, dan ground/powdered. Dari hasil sampling diperoleh 69 sampel yang terdiri dari 27 sampel dengan bentuk whole, 28 sampel dengan bentuk pieces/cut/cracked/broken, dan 14 sampel berbentuk ground/powdered. Hasil kajian untuk memperkuat penyusunan posisi Indonesia dalam pembahasan Draft standard for Cinnamon dilaksanakan dengan mengakomodir kepentingan Indonesia dalam penyusunan draft standar mutu dan keamanan pangan pada kayumanis, yaitu dengan merujuk pada hasil kajian profil mutu dan keamanan pangan. Berdasarkan hasil profil sampel kayumanis, diperlukan dukungan kegiatan dalam rangka memastikan kualitas kayumanis di Indonesia memenuhi standar internasional, melalui kolaborasi bersama lintas sektor dan stakeholder seperti eksportir, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

13) Kajian Mutu Beras di Peredaran

Kajian standar mutu beras premium dan medium dilakukan untuk mendapatkan gambaran tingkat kesesuaian standar mutu beras yang beredar di pasaran dengan persyaratan mutu beras yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Parameter standar mutu beras meliputi derajat sosoh, kadar air, butir menir, butir patah, total butir beras lainnya, butir gabah dan benda lain. Kajian ini dilaksanakan berupa studi literatur, penyusunan rencana kegiatan, pengambilan sampel, pengujian di laboratorium, analisis data, dan penyusunan laporan. Pengambilan sampel dilakukan di pasar tradisional dan/atau retail pada 10 provinsi sentra produksi beras yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera

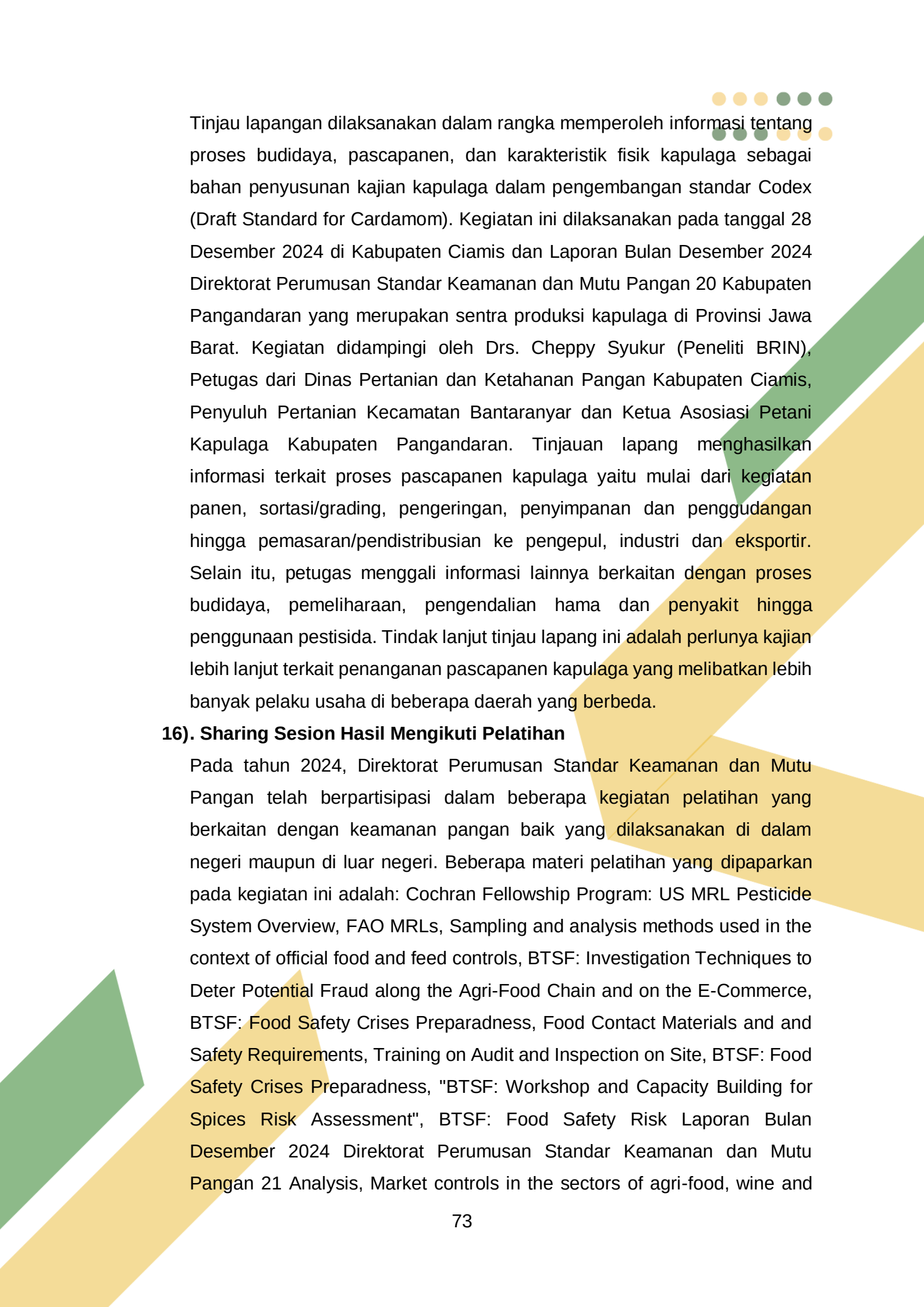


Barat. Jenis sampel beras yang diambil adalah beras sosoh (beras umum) dengan mutu premium dan medium yang telah dikemas dan memiliki nomor izin edar. Berdasarkan hasil sampling diperoleh 119 data sampel beras premium dan 41 data sampel beras medium. Hasil pengujian beras menunjukkan parameter butir patah dan butir menir menjadi dua parameter yang masih belum dapat dipenuhi oleh sebagian besar pelaku usaha beras di Indonesia.

14)Kajian Cemaran Mikotoksin pada Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kajian dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena provinsi ini merupakan salah satu sentra produksi jagung di Indonesia dengan tingkat konsumsi jagung paling tinggi. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi cemaran mikotoksin khususnya cemaran aflatoksin dan okratoksin pada jagung kering pipil di setiap rantai pasokan yang beredar mulai dari produsen/petani, pengepul hingga pasar tradisional. Parameter pengujian contoh menggunakan 3 (tiga) parameter uji yang mengacu pada Perbadan 10 Tahun 2024 yaitu Aflatoksin B1, Aflatoksin Total dan Okratoksin A. serta parameter uji tambahan berupa Aflatoksin B2 (AFB2), Aflatoksin G1 (AFG1) dan Aflatoksin G2 (AFG2). Pemilihan lokasi pengambilan sampel ditentukan secara purposif yang merupakan daerah sentra produksi dengan konsumsi terbanyak, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Flores Timur, Alor, Sabu, Lembata, Ende, Nagekeo, Ngada. Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Berdasarkan hasil uji cemaran mikotoksin diperoleh sekitar 25% sampel jagung yang terdeteksi cemaran mikotoksin melebihi batas usulan nilai yang telah ditetapkan, di mana setengahnya terdeteksi cemaran aflatoksin B1, setengahnya terdeteksi cemaran aflatoksin total sementara 5% sampel terdeteksi cemaran okratoksin A. Sampel yang tercemar mikotoksin yang melebihi batas maksimal merupakan sampel yang berasal dari pasar tradisional yaitu sebesar 24,05%.

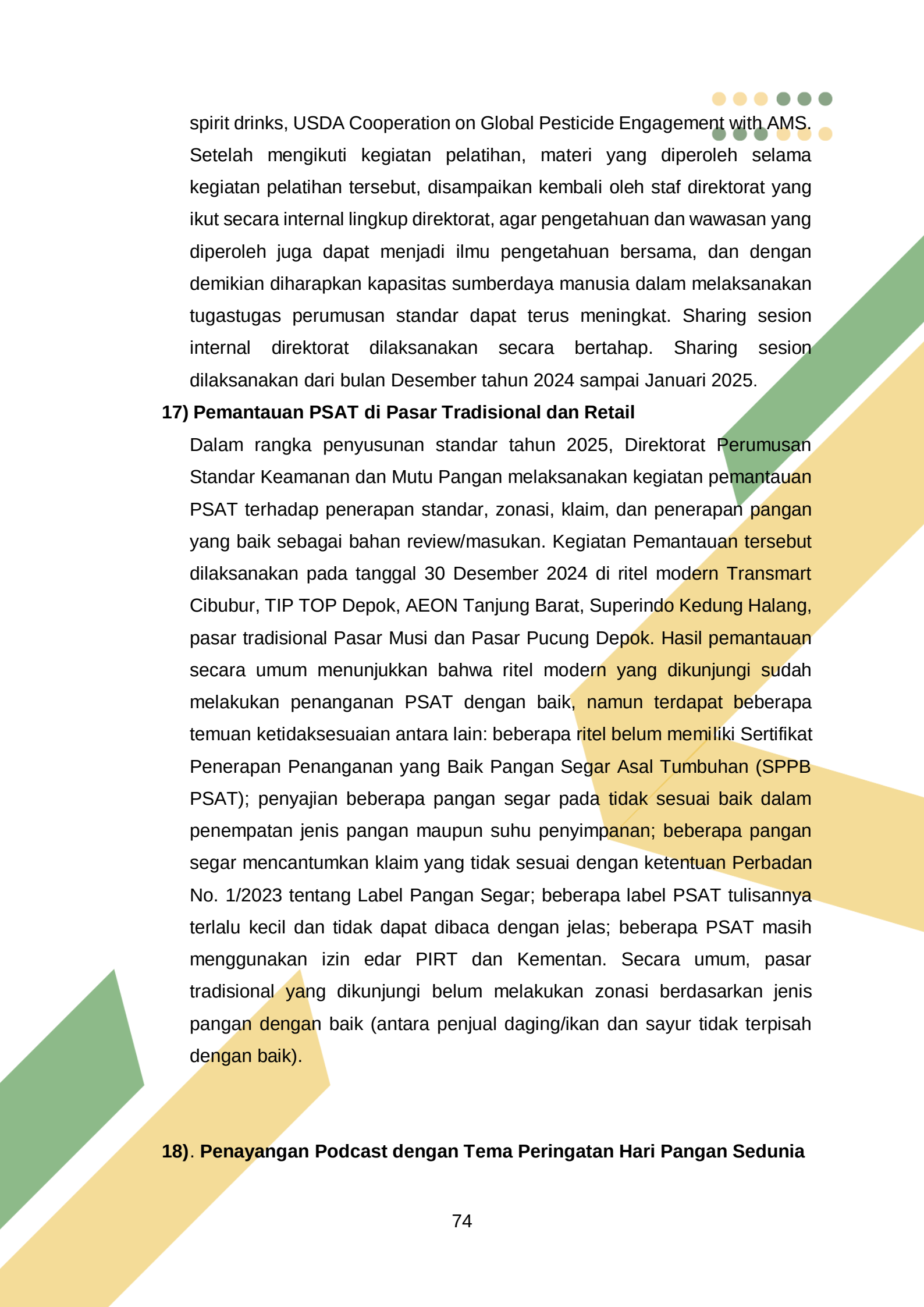
15)Tinjau Lapangan Kegiatan Pascapanen Komoditas Kapulaga di Jawa Barat



Tinjau lapangan dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi tentang proses budidaya, pascapanen, dan karakteristik fisik kapulaga sebagai bahan penyusunan kajian kapulaga dalam pengembangan standar Codex (Draft Standard for Cardamom). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2024 di Kabupaten Ciamis dan Laporan Bulan Desember 2024 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan 20 Kabupaten Pangandaran yang merupakan sentra produksi kapulaga di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan didampingi oleh Drs. Cheppy Syukur (Peneliti BRIN), Petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Penyuluh Pertanian Kecamatan Bantaranyar dan Ketua Asosiasi Petani Kapulaga Kabupaten Pangandaran. Tinjauan lapang menghasilkan informasi terkait proses pascapanen kapulaga yaitu mulai dari kegiatan panen, sortasi/grading, pengeringan, penyimpanan dan penggudangan hingga pemasaran/pendistribusian ke pengepul, industri dan eksportir. Selain itu, petugas menggali informasi lainnya berkaitan dengan proses budidaya, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit hingga penggunaan pestisida. Tindak lanjut tinjau lapang ini adalah perlunya kajian lebih lanjut terkait penanganan pascapanen kapulaga yang melibatkan lebih banyak pelaku usaha di beberapa daerah yang berbeda.

16). Sharing Sesion Hasil Mengikuti Pelatihan

Pada tahun 2024, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan keamanan pangan baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa materi pelatihan yang dipaparkan pada kegiatan ini adalah: Cochran Fellowship Program: US MRL Pesticide System Overview, FAO MRLs, Sampling and analysis methods used in the context of official food and feed controls, BTSF: Investigation Techniques to Deter Potential Fraud along the Agri-Food Chain and on the E-Commerce, BTSF: Food Safety Crises Preparadness, Food Contact Materials and and Safety Requirements, Training on Audit and Inspection on Site, BTSF: Food Safety Crises Preparadness, "BTSF: Workshop and Capacity Building for Spices Risk Assessment", BTSF: Food Safety Risk Laporan Bulan Desember 2024 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan 21 Analysis, Market controls in the sectors of agri-food, wine and



spirit drinks, USDA Cooperation on Global Pesticide Engagement with AMS.

Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, materi yang diperoleh selama kegiatan pelatihan tersebut, disampaikan kembali oleh staf direktorat yang ikut secara internal lingkup direktorat, agar pengetahuan dan wawasan yang diperoleh juga dapat menjadi ilmu pengetahuan bersama, dan dengan demikian diharapkan kapasitas sumberdaya manusia dalam melaksanakan tugastugas perumusan standar dapat terus meningkat. Sharing sesion internal direktorat dilaksanakan secara bertahap. Sharing sesion dilaksanakan dari bulan Desember tahun 2024 sampai Januari 2025.

17) Pemantauan PSAT di Pasar Tradisional dan Retail

Dalam rangka penyusunan standar tahun 2025, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melaksanakan kegiatan pemantauan PSAT terhadap penerapan standar, zonasi, klaim, dan penerapan pangan yang baik sebagai bahan review/masukan. Kegiatan Pemantauan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024 di ritel modern Transmart Cibubur, TIP TOP Depok, AEON Tanjung Barat, Superindo Kedung Halang, pasar tradisional Pasar Musi dan Pasar Pucung Depok. Hasil pemantauan secara umum menunjukkan bahwa ritel modern yang dikunjungi sudah melakukan penanganan PSAT dengan baik, namun terdapat beberapa temuan ketidaksesuaian antara lain: beberapa ritel belum memiliki Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT); penyajian beberapa pangan segar pada tidak sesuai baik dalam penempatan jenis pangan maupun suhu penyimpanan; beberapa pangan segar mencantumkan klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan Perbadan No. 1/2023 tentang Label Pangan Segar; beberapa label PSAT tulisannya terlalu kecil dan tidak dapat dibaca dengan jelas; beberapa PSAT masih menggunakan izin edar PIRT dan Kementan. Secara umum, pasar tradisional yang dikunjungi belum melakukan zonasi berdasarkan jenis pangan dengan baik (antara penjual daging/ikan dan sayur tidak terpisah dengan baik).

18). Penayangan Podcast dengan Tema Peringatan Hari Pangan Sedunia



Podcast B2SA merupakan salah satu media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kedeputan Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat umum melalui media digital dengan channel Youtube Badan Pangan Nasional terkait dengan isu dan berbagai materi lainnya terkait konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Podcast dengan tema Hari Pangan Sedunia dan peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menghadirkan dua narasumber yaitu Dr. Andriko Noto Susanto, selaku PJ. Gubernur NTT dan Nadine Candrawinata yang merupakan publik figur yang memiliki kedekatan dengan NTT. Taping podcast dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2024 di Ruang Podcast Lantai 2, Kantor Badan Pangan Nasional dan telah ditayangkan pada tanggal 12 Desember 2024 di Youtube Chanel Badan Pangan Nasional

c Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dengan kegiatan antara lain:

1) Pengawasan Keamanan Pangan menuju HBKN Tahun 2024 di pasar Ciputat dan ritel modern TipTop Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan tahun baru 2025, telah dilaksanakan pengawasan di Kota Tangerang pada hari Jumat, 6 Desember 2024. Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Tim pengawas Direktorat PPSKMP bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dan Dinas Ketahanan Pangan Prov. Banten. Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan melalui: a) pengambilan sampel pangan segar; b) pengujian pangan segar untuk parameter uji residu pestisida dan formalin menggunakan metoda uji cepat; serta c) pengawasan label pangan segar. Pengambilan sampel di Pasar Induk Jatiuwung meliputi: a) sampel uji residu pestisida : Cabai Merah Keriting, Cabai Ceplak Hijau, Cabai Ceplak Merah, Bawang Merah, Bawang Putih, Sawi Putih, Tomat, Wortel, dan Kentang; dan b) sampel uji formalin : ikan kembung asin. Pengambilan dan uji cepat sampel (residu pestisida) di Indogrosir meliputi: bawang merah, bawang putih dan kentang. Hasil uji cepat: positif residu pestisida hanya pada sampel cabai ceplak merah dari pasar induk jatiuwung. Negatif pada uji formalin.



Sebagai Tindak lanjut pengawasan, a) Indogrosir direkomendasikan untuk mengurus SPPB PSAT ke OKKPD Provinsi Banten serta melakukan pengawasan label terhadap PSAT yang diterima dari supplier dan b) Pasar Jatiuwung pemilik cold storage disarankan untuk memiliki SPPB PSAT, agar berkonsultasi pada Dinas Provinsi.

2) Pengawasan Keamanan Pangan menuju HBKN Tahun 2024 di Pasar Jatiasih dan ritel modern The Foodhall Grand Galaxy Park, Kota Bekasi

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan tahun baru 2025 telah dilaksanakan di Kota Bekasi pada hari Senin, 9 Desember 2024. Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Tim Dit. PPSKMP bersama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan melalui: a) pengambilan sampel pangan segar; b) pengujian pangan segar untuk parameter uji residu pestisida dan formalin menggunakan _rapid test kit; serta c) pengawasan label dan iklan pangan segar. Sampel pangan segar di Pasar Jatiasih dan retail modern The Foodhall meliputi: a) sampel uji residu pestisida: cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, sawi hijau, tomat, wortel, dan kentang; dan b) sampel uji formalin: ikan kembung dan daging ayam. Hasil uji cepat untuk seluruh sampel dari Pasar Jatiasih dan The Foodhall menunjukkan hasil negatif residu pestisida dan uji formalin, kecuali sampel Cabai Merah Keriting dari The Foodhall yang menunjukkan hasil positif residu pestisida. Atas temuan tersebut, tim meminta pihak manajemen untuk melakukan penelusuran terhadap pemasok dan melaporkan hasil penelusuran tersebut kepada OKKPP.

3) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Menjelang HBKN 2024 & Tahun Baru 2025 di Pasar Bersih Sentul dan Supermarket AEON Mall Sentul City, Kab. Bogor

Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar dilakukan melalui: a) pengambilan sampel pangan segar; b) pengujian pangan segar untuk parameter uji residu pestisida dan formalin menggunakan metode uji cepat; serta c) pengawasan label pangan segar. Pengambilan sampel pangan



segar meliputi: a) sampel uji residu pestisida: Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Bawang Merah, Bawang Putih, Sawi Hijau, Tomat, Wortel, dan Kentang; dan b) sampel uji formalin: ikan kembung dan daging ayam. Hasil uji cepat untuk seluruh sampel pangan segar dari Pasar Bersih Sentul dan Supermarket AEON Mall Sentul City menunjukkan hasil negatif baik pada sampel yang diuji residu pestisida maupun formalin. Sebagai tindak lanjut untuk supermarket AEON Mall Sentul City: a) mereview kebijakan perusahaan perihal pemilihan pemasok dan standar kelengkapan dokumen izin edar pada setiap kedatangan barang dan tdk menerima PSAT terkemas tanpa izin edar; b) mensosialisasikan semua SOP pada unit terkait; c) meminta pelaku usaha menyesuaikan izin edar PSAT ke PD/PDUK sesuai kewenangan.

4) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Menjelang HBKN 2024 & Tahun Baru 2025 di Kota Cirebon.

Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan telah dilaksanakan oleh tim OKKP Pusat bersama dengan DKPPP Kota Cirebon di Pasar Pagi dan Yogya Cirebon Junction, Kota Cirebon. Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar dilakukan melalui: a) pengambilan sampel pangan segar; b) pengujian pangan segar untuk parameter uji residu pestisida dan formalin menggunakan metode uji cepat (rapid test); serta c) pengawasan label pangan segar. Pengambilan sampel pangan segar meliputi: a) sampel uji residu pestisida: Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Bawang Merah, Bawang Putih, Sawi Hijau, Tomat, Wortel, dan Kentang; dan b) sampel uji formalin: ikan kembung dan daging ayam. Hasil uji cepat untuk seluruh sampel pangan segar dari Pasar Pagi Kota Cirebon dan Supermarket Yogya Cirebon Junction menunjukkan hasil negatif baik pada sampel yang diuji residu pestisida maupun formalin. Rekomendasi tindak lanjut untuk supermarket Jogya Cirebon Junction: a) untuk segera mengusulkan Permohonan SPPB-PSAT ke OKKPD Provinsi Jawa Barat melalui OSS dan akan mensosialisasikan hasil temuan ke seluruh cabang Yogya Supermarket; b) mempersyaratkan kepada pemasok bahwa PAST yang dikemas dengan masa simpan lebih dari 7 (tujuh) hari yang akan di pasok ke Yogya Supermarket harus memiliki nomor Izin Edar PSAT.

5) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Menjelang HBKN 2024 & Tahun Baru 2025 di Kab Bekasi

Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar telah dilaksanakan oleh Tim Pengawas OKKP Pusat bersama dengan Tim Pengawas Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Secara umum, TipTop Tambun telah menerapkan sanitasi higienis dengan baik dan bersih, namun belum melakukan pemisahan untuk penyimpanan pangan segar dan pangan olahan di cold storage. TipTop Tambun melaksanakan penanganan PSAT mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pemajangan, pemotongan, dan pengemasan ulang, namun belum memiliki SPPB PSAT. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut : a) TipTop Tambun agar mengajukan permohonan SPPB PSAT ke OKKPD Prov Jawa Barat melalui OSS; dan b) TipTop Tambun agar melakukan kontrol dan memeriksa setiap produk dari pemasok untuk memastikan telah memiliki izin edar dan mencantumkan label.

6) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Menjelang Tahun Baru 2025 di Kab. Bogor

Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar telah dilaksanakan di Kab Bogor melalui: a) pengambilan sampel pangan segar; b) pengujian pangan segar untuk parameter uji residu pestisida dan formalin menggunakan metode uji cepat; c) pengawasan label pangan segar; serta d) pemantauan harga bahan pokok. Pengambilan sampel pangan segar meliputi: a) sampel uji residu pestisida: Cabai Merah Keriting, Bawang Merah, Bawang Putih, Sawi Hijau, dan Wortel; dan b) sampel uji formalin: daging ayam. Hasil uji cepat untuk seluruh sampel pangan segar dari Fresh Market dan Superindo menunjukkan hasil negatif baik pada sampel yang diuji residu pestisida maupun formalin. Sebagai Tindak lanjut Superindo diharuskan segera mengurus SPPB PSAT dan memantau semua pemasok untuk memastikan barang yang dikirim memiliki ijin edar; dan Badan Pangan Nasional akan memanggil semua manajemen retail modern di Indonesia termasuk superindo untuk mensosialisasikan kembali SPPB-PSAT dan memperingatkan retail untuk segera mengurus SPPB PSAT.

7) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Menjelang HBKN 2024 & Tahun Baru 2025 di Kab. Siak, Prov. Riau



Pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar menjelang HBKN 2024 di Kab. Siak telah dilaksanakan oleh Tim OKKP Pusat dan OKKP-D Provinsi Riau dan Kab Siak. Kegiatan ini dilaksanakan di Pasar Belantik Raya dan Indomaret Fresh Kab Siak. Tim HBKN melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar di Pasar Belantik Raya melalui: a) pengambilan sampel pangan segar; dan b) pengujian pangan segar untuk parameter uji residu pestisida dan formalin menggunakan metode uji cepat. Pengambilan sampel pangan segar meliputi: a) sampel uji residu pestisida: Cabai Merah Keriting, Cabai Hijau Keriting, Cabai Rawit Merah, Bawang Putih, Paria; dan b) sampel uji formalin: ikan selar. Hasil uji cepat untuk seluruh sampel pangan segar dari Pasar Belantik Raya menunjukkan hasil negatif baik pada sampel yang diuji residu pestisida maupun formalin. Secara umum, kondisi sanitasi higiene di Indomaret Fresh Kab. Siak baik dan telah menerapkan sistem zonasi dalam pemajangan produk pangan segar, pangan olehan, dan pangan siap saji. 5. Rekomendasi tindak lanjut untuk Indomaret Fresh, Kab. Siak: a) mendaftarkan SPPB-PSAT ke OKKPD Prov. Riau; b) memastikan semua produk PSAT telah memiliki izin edar dan desain label sesuai ketentuan.

8) Rapat Pembahasan Lanjutan Standar Penilaian Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT)

Rapat pembahasan lanjutan Standar Penilaian Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT) telah dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2024. Rapat dibuka oleh Ketua Tim Kerja Registrasi dan Surveilans dan dihadiri secara luring oleh perwakilan OKKPD Banten, perwakilan Biro Organisasi, SDM dan Hukum, serta Fungsional lingkup Direktorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar, Badan Pangan Nasional. Turut hadir secara daring perwakilan OKKPD DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Rapat ini menghadirkan narasumber pakar keamanan pangan yg juga anggota tim Komisi Teknis (Komtek) pusat yaitu oleh Prof. Dr. Ir. Sri Rahardjo, M.Sc, UGM. Rapat bertujuan untuk membahas konsep revisi standar SPPB PSAT untuk usaha skala menengah besar dengan format terbaru sesuai masukan pada rapat sebelumnya dan kebijakan penyederhanaan standar penerapan sanitasi higiene untuk UMK. Sebagai tindak lanjut: Perlu simulasi penentuan level



penerapan standar SPPB PSAT untuk pelaku usaha skala menengah besar; Standar penerapan sanitasi higiene untuk UMK perlu dibuat dalam format penulisan yg mudah dipahami dan diterapkan; Rapat lanjutan direncanakan di awal tahun 2025 dan Apabila standar ini sudah ditetapkan perlu adanya bimtek ke petugas daerah u penyamaan persepsi.

9) Penerbitan SPPB PSAT dan Izin Edar PSAT-PL

Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan mendapat amanat untuk melayani penerbitan Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPBPSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan, sedangkan Izin edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal importasi yang akan diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia. SPPB-PSAT merupakan salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan izin edar PSAT-PL. Pada bulan Desember 2024, terdapat total 182 permohonan baru berupa 10 permohonan SPPB-PSAT dan 172 Izin Edar PSAT-PL. Permohonan yang diterbitkan OKPP-P pada bulan Desember sebesar 9 SPPB-PSAT dan 211 Izin Edar PSAT-PL sedangkan yang ditolak atau TMS sebanyak 3 SPPB-PSAT dan 16 Izin Edar PSAT-PL. Total akumulasi permohonan yang masuk dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 adalah sebanyak 280 SPPB-PSAT dan 3.164 Izin Edar PSAT-PL. Dari total 3.444 tersebut, sebanyak 2.117 permohonan sudah terbit dan 530 permohonan ditolak. Infografis layanan OKKP-P periode Desember 2024.

10) Kegiatan Jalin Lokal

Pelaksanaan Kegiatan Jalin Lokal telah dilaksanakan di The Kasablanka Hall tanggal 5-6 Desember 2024. Kegiatan Jalin Lokal merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dalam menciptakan ekosistem kolaboratif untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kegiatan ini dirancang sebagai titik temu bagi pelaku UMKM untuk: Memulai dan mengembangkan bisnis dan Membangun jaringan dan koneksi bisnis.



Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM dan dihadiri oleh perwakilan dari beberapa K/L termasuk Bapanas, BPOM, BPJPH, BKPM, BSN dan BUMN, perusahaan retail serta perusahaan funding & investment. Badan Pangan Nasional turut berkontribusi dalam kegiatan ini dengan menyampaikan informasi mengenai: Regulasi dan perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Edukasi mengenai panganekaragaman konsumsi pangan berbasis Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

11) Surevelan PT Green Box Fresh Vegetables

PT Green Box Fresh Vegetables (PT Green Box) bergerak di bidang perdagangan (importasi dan distribusi) PSAT jenis sayuran dan jamur asal China dan Korea Selatan sejak tahun 2013. Perusahaan yang beralamat di Jakarta Utara ini telah memiliki nomor SPPB-PSAT 34/SKLPSH/OKKPP/08/2020 yang berlaku hingga 2025. Kegiatan surveilan bertujuan untuk memastikan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan standar penanganan pangan yang baik, setelah mendapatkan SPPB PSAT. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Desember 2024 15 Tindak lanjut surveilan, PT Green Box akan melakukan tindakan perbaikan dan menyampaikan perbaikan kepada auditor dengan target penyelesaian selama 60 hari kalender, yaitu pada 10 Februari 2025.

12) Surveillan PT Mawar Indonesia Bersinar (PT MIB)

PT MIB yang berlokasi di Jakarta Barat, melakukan usaha pada bidang pangan segar (beras basmati, beras japonica, dan jagung berondong) dan olahan (gula pasir, gula batu, tepung terigu). Perusahaan telah memiliki SPPB PSAT yang masih berlaku hingga 17 Mei 2027 dengan ruang lingkup penyimpanan suhu ruang dan pengemasan ulang dan telah memiliki nomor izin edar untuk pangan segar berupa jagung berondong dan beras. Temuan Ketidaksesuaian antara lain : a) Beberapa dokumen operasional tidak lengkap/tidak mutakhir; b) termohigrometer belum dikalibrasi dan timbangan habis masa berlaku sertifikat tera; c) kebersihan toilet perlu ditingkatkan; dan d) area pemeriksaan mutu kurang memadai. Tindak lanjut: pelaku usaha akan melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian sesuai waktu yang disepakati.

13) Surveillan PT Laris Manis Utama



PT Laris Manis Utama (PT LMU) berdiri sejak tahun 1996 dan bergerak di bidang perdagangan impor serta distribusi. PT LMU sudah memiliki SPPB-PSAT dengan nomor 29/SPPBPSAT/OKKPP/06/2021 dengan ruang lingkup Penyimpanan Dingin Produk Perkebunan dan Hortikultura, berlaku hingga 20 Juni 2026. PT LMU beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 21,5 No. 168 RT 01 RW 04 Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Produk yang diimpor oleh PT LMU meliputi buah dan sayur (segar dan frozen).

14) Surveilance PT. Abadi Duta Lestari

PT Abadi Duta Lestari (ADL) berlokasi di Jakarta Utara dan telah memperoleh SPPB-PSAT dengan nomor 28/SPPBPSAT/OKKPP/06/2021 untuk ruang lingkup penyimpanan dingin produk hortikultura yang berlaku hingga 6 Juni 2026. Surveilance dilaksanakan dalam rangka memastikan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan standar penanganan yang baik setelah mendapatkan SPPB-PSAT. Produk yang ditangani oleh PT. ADL yaitu anggur, jeruk, apel, kelengkeng, jamur enoki, leci, pir, strawberry, ceri, dan pomegranate yang berasal dari China, Thailand, Mesir, dan Amerika Serikat. Tindak lanjut surveilance, PT. ADL akan melakukan tindakan perbaikan dan menyampaikan perbaikan kepada auditor sesuai dengan waktu yang disepakati.

15) Sidang Komisi Teknis SPPB-PSAT

Salah satu proses penerbitan SPPB dilaksanakan penilaian melalui rapat komtek bertujuan untuk memberi rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Sanitasi Higienis Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT), sehingga penerbitan melalui audit menjadi lebih obyektif, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan semua auditor dapat memaparkan secara utuh gambaran masing-masing unit usaha yang telah diaudit, dan tim komtek dapat memberikan rekomendasi yang sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan masukan terhadap penilaian proses penerbitan SPPB, pada bulan Desember 2024 telah dilaksanakan 2 (Dua) kali Komisi Teknis OKKPP pada 23 dan 30 Desember 2024 secara hybrid.

Pelaku usaha yang diajukan pada rapat Komtek 23 dan 30 Desember 2024 berjumlah 14 (empat belas) pelaku usaha yaitu: 1. PT Segar Kumala



Indonesia Cabang Makassar ruang lingkup penyimpanan suhu dingin; 2. PT Classic Fine Foods Indonesia ruang lingkup penyimpanan suhu ruang, penyimpanan suhu dingin, dan penyimpanan suhu beku; 3. PT Duta Dagang Lestari ruang lingkup penyimpanan suhu ruang dan pengemasan ulang; 4. PT Permata Food Indonesia ruang lingkup penyimpanan suhu ruang dan pengemasan ulang; 5. PT Seia Global Coldstorage ruang lingkup penyimpanan suhu dingin dan penyimpanan suhu beku; 6. PT Mitra Buah Abadi ruang lingkup penyimpanan suhu dingin; 7. CV Grinyuni Fruit ruang lingkup penyimpanan suhu dingin; 8. PT Sinergi Sinar Mentari 9. PT Barokah Cuan Bersama ruang lingkup penyimpanan suhu dingin; 10. PT Orit Jaya Perkasa ruang lingkup penyimpanan suhu dingin dan penyimpanan suhu beku; 11. CV Kapuas Lestari ruang lingkup penyimpanan suhu ruang dan pengemasan ulang; 12. PT Exindokarsa Agung ruang lingkup penyimpanan suhu dingin dan penyimpanan suhu beku; 13. PT FKS Makassar ruang lingkup penyimpanan suhu ruang; 14. CV Tiga Saudara ruang lingkup penyimpanan suhu dingin. Penilai atau pakar yang hadir dalam komtek 23 dan 30 Desember 2024 yaitu: 1) IPB University oleh Dr. Rimbawan; 2) Universitas Gadjah Mada oleh Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc; 3) Universitas Brawijaya oleh Prof. Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP; 4) Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh Dr. Mulyana Hadipernata, S.TP., M.Sc; 5) Badan Karantina oleh Tri wahyu Cahya Rini; 6) Badan Pangan Nasional oleh Apriyanto Dwi Nugroho, S.T.P, M.Sc; 7) Badan Pangan Nasional oleh Netra Mirawati, SP., MP; 8) Badan Pangan Nasional oleh Tuty Anna Samosir, SP., MM. Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Komisi Teknis OKKP-P sepakat memberikan rekomendasi kepada Ketua OKKP-P untuk menerbitkan SPPB-PSAT bagi seluruh perusahaan yang terdaftar pada Sidang Komisi Teknis 23 dan 30 Desember 2024. Tim Komtek sepakat untuk menerbitkan SPPB-PSAT PT Classic Fine Foods Indonesia, PT Permata Food Indonesia, PT Seia Global Coldstorage dan PT FKS Multi Agro tanpa catatan, sedangkan untuk pelaku usaha lain perlu melengkapi perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh Komisi Teknis OKKP-P terlebih dahulu sebelum diterbitkan.



16) Pengawasan Keamanan Pangan Segar bersama Satgas Pangan di Batam

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar menjelang HBKN Nataru dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional bersama OKKPD Prov Kepri, OKKPD Kota Batam dan didampingi Tim Satgas Pangan Mabes POLRI dan Satgas Pangan Polda Kepri, dilaksanakan pengawasan pasokan dan harga di Pasar Rakyat TOS 3000, dan kesesuaian label pangan segar di Ritel Modern Indogrosir Batam. Hasil Pengawasan Keamanan Pangan dilaksanakan melalui pengujian rapidtest pada mobil lab keliling dan pengawasan kesesuaian label di Ritel Modern. Hasil Pengujian Rapid test kit menggunakan parameter pengujian residu pestisida menunjukkan hasil negatif pada komoditas cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kentang, tomat, sawi, sedangkan cabai merah keriting menunjukkan hasil positif. Hasil pengujian PSAI pada komoditas ikan kembung, ikan teri, ikan benggol, ikan teri medan menunjukkan hasil negatif pada parameter uji formalin. Dari hasil pengawasan Ritel Modern Indogrosir disarankan untuk: a) segera mengurus SPPB PSAT, b) meminta supplier untuk segera mengurus izin edar atau memilih PSAT yg sdh memiliki izin edar sesuai ketentuan perundangan.

17) Rapat Monitoring Dan Percepatan Realisasi Anggaran Dekontrasi

Rapat monitoring dan percepatan realisasi anggaran dekonsentrasi pada tanggal 24 Desember 2024, dihadiri penanggung jawab kegiatan dana dekon pengawasan keamanan pangan segar dari Dinas Urusan Pangan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Unit Pelaksana Teknis dan Bidang Keamanan penerima anggaran dekontrasi. Rapat bertujuan untuk monitoring dan mempercepat realisasi anggaran dekonsentrasi kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Realisasi anggaran dekon total per 19 Desember 2024, data SP2D tercatat sebesar 92,31% dan secara akrual sebesar 94,59% dengan target akhir Desember 98%. Kendala yang dihadapi daerah selama proses realisasi ialah: Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Desember 2024 21 1) kurangnya SDM; 2) Daerah lebih memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Sebagai tindak lanjut, Perlunya pemberian punishment bagi Provinsi dan Kab/Kota yang penyerapan anggarannya dibawah dari target



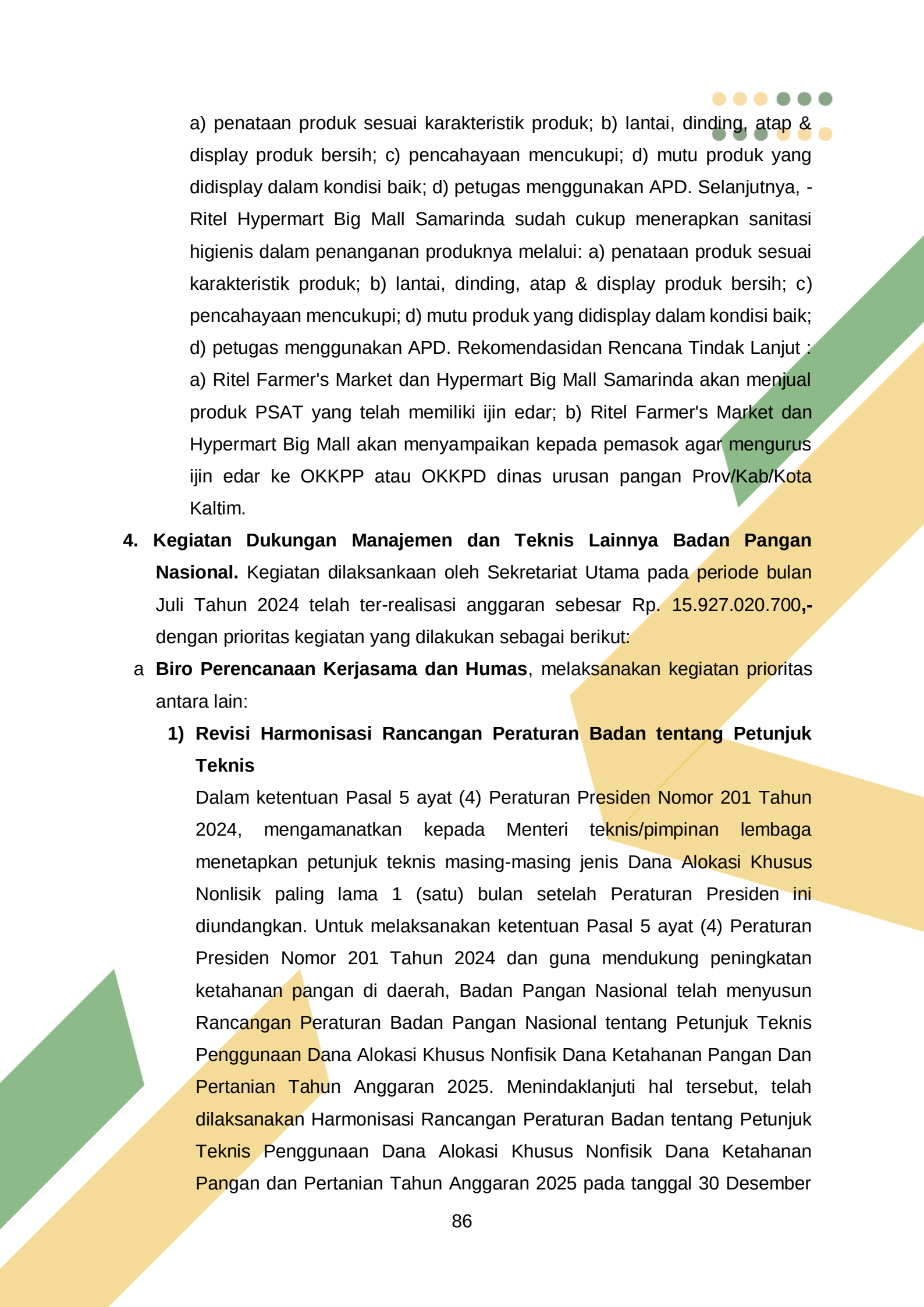
dan mengkaji kembali lokasi Provinsi dan Kab/Kota penerima dana dekon, dengan mempertimbangkan SDM dan jumlah alokasi APBD.

18)Rapat Bimbingan Teknis Proses Penerbitan PDUK dan Pelaporan SIPSAT

Rapat Bimbingan Teknis Proses Penerbitan PDUK dan Pelaporan SIPSAT dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2024. Bimtek dibuka oleh Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dan dilaksanakan secara hybrid, dihadiri oleh narasumber Direktur Data dan Informasi, BKPM dan peserta dari Kab/Kota di 15 Prov (Aceh, Bali, Bengkulu, DKI, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, NTB, NTT, Sumbar, Sumut, dan Papua Barat daya), serta staf internal Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaporan kegiatan penerbitan izin dan pengawasan keamanan pangan segar pada sistem informasi SIPSAT. Sebagai tindak lanjut, Peserta diharapkan aktif dalam pelaporan penerbitan izin dan pengawasan keamanan pangan melalui SIPSAT, Optimalisasi pemanfaatan fitur SIPSAT untuk transparansi dan akurasi data dan Proses penerbitan izin PSATPDUK dan pelaporan diharapkan lebih efisien dan sesuai ketentuan.

19)Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar bersama Satgas Pangan

Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan di Pasar Merdeka, Ritel Farmer's Market dan Hypermart Big Mall Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan pada 30 Desember 2024. Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar dilakukan melalui: a) pengambilan sampel pangan segar; b) pengujian pangan segar untuk parameter uji residu pestisida dan formalin menggunakan metode uji cepat; serta c) pengawasan label pangan segar. 2. Pengambilan sampel pangan segar meliputi : a) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT): cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih; dan b) Pangan Segar Asal Hewan (PSAH): daging ayam dan daging sapi; dan c) Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) : ikan kembung. Pengujian residu pestisida dilakukan terhadap sampel PSAT dan uji formalin terhadap sampel PSAH dan PSAI. Secara umum, Ritel Farmer's Samarinda sudah cukup menerapkan sanitasi higienis dalam penanganan produknya melalui:



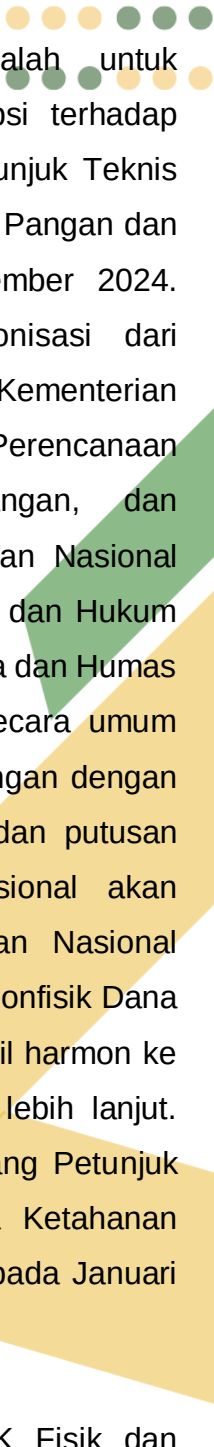
a) penataan produk sesuai karakteristik produk; b) lantai, dinding, atap & display produk bersih; c) pencahayaan mencukupi; d) mutu produk yang didisplay dalam kondisi baik; d) petugas menggunakan APD. Selanjutnya, - Ritel Hypermart Big Mall Samarinda sudah cukup menerapkan sanitasi higienis dalam penanganan produknya melalui: a) penataan produk sesuai karakteristik produk; b) lantai, dinding, atap & display produk bersih; c) pencahayaan mencukupi; d) mutu produk yang didisplay dalam kondisi baik; d) petugas menggunakan APD. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut : a) Ritel Farmer's Market dan Hypermart Big Mall Samarinda akan menjual produk PSAT yang telah memiliki ijin edar; b) Ritel Farmer's Market dan Hypermart Big Mall akan menyampaikan kepada pemasok agar mengurus ijin edar ke OKKPP atau OKKPD dinas urusan pangan Prov/Kab/Kota Kaltim.

4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional. Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama pada periode bulan Juli Tahun 2024 telah ter-realisasi anggaran sebesar Rp. 15.927.020.700,- dengan prioritas kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

a **Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas**, melaksanakan kegiatan prioritas antara lain:

1) Revisi Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan tentang Petunjuk Teknis

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, mengamanatkan kepada Menteri teknis/pimpinan lembaga menetapkan petunjuk teknis masing-masing jenis Dana Alokasi Khusus Nonfisik paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan guna mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah, Badan Pangan Nasional telah menyusun Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2025. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 30 Desember



2024. Tujuan dilaksanakan pertemuan dimaksud adalah untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 30 Desember 2024. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim Pembina Harmonisasi dari Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi Kementerian 10 Hukum, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun tim dari Badan Pangan Nasional dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi, Sumberdaya Manusia dan Hukum dengan didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas beserta perwakilan unit kerja pengampu kegiatan DAK. Secara umum dihasilkan bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan. Sebagai tindak lanjut, Badan Pangan Nasional akan menyampaikan draft Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 hasil harmon ke Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum untuk proses lebih lanjut. Target Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 akan selesai pada Januari 2025.

2) Rakor DAK Sub Bidang Pangan Tahun 2025

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan Nonfisik maka diperlukan pertemuan untuk mengkoordinasikan dan memberikan pemahaman pada Kabupaten/Kota penerima DAK terkait kebijakan yang perlu dipedomani dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan Nonfisik di Tahun 2025. Tujuan diselenggarakannya pertemuan adalah dalam rangka mengkoordinasikan dan memberikan pemahaman pada Kabupaten/Kota penerima DAK terkait kebijakan yang perlu dipedomani dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan Nonfisik di Tahun 2025. Sasaran kegiatan adalah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima



DAK Fisik dan Non Fisik Sub Bidang Pangan Tahun 2025. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 di Hotel Santika Depok. Narasumber yang akan diundang dalam pertemuan ini adalah dari Direktorat Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan, Direktorat Fasilitas Transfer & Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan; Direktorat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

3) Sinkronisasi KRISNA-SAKTI atas Rencana Kerja TA 2024 dan TA 2025

Dalam rangka menyelaraskan rencana kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2024 pada aplikasi KRISNA dengan rencana kerja dan anggaran pada Badan Pangan Nasional pada aplikasi SAKTI Tahun 2024 telah dilaksanakan sinkronisasi KRISNA-SAKTI. Proses sinkronisasi dilakukan 11 untuk menyelaraskan sumber data untuk referensi pelaporan pada Triwulan IV. Selanjutnya, sehubungan telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029 dan Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan dalam rangka percepatan penyusunan Renja K/L 2025, RKA K/L 2025 dan Renstra K/L 2025 – 2029, Kementerian/Lembaga perlu melakukan proses sinkronisasi Renja - RKA K/L TA 2025 untuk menjaga keselarasan data antara Renja dan RKA K/L. Untuk itu, Badan Pangan Nasional telah melakukan penyelarasan rencana kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 pada aplikasi KRISNA dengan rencana kerja dan anggaran pada Badan Pangan Nasional pada aplikasi SAKTI Tahun 2025. Proses sinkronisasi dilakukan untuk menyelaraskan sumber data untuk referensi untuk pelaporan program dan kegiatan tahun 2025.

4) Masukan RPJMN 2025-2029

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor T-21158/Dt.9.4/PP.03.01/10/2024 hal Surat Penyampaian Soft File Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029 dan berdasarkan keselarasan dengan substansi Rancangan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang telah disampaikan melalui aplikasi KRISNA, Badan Pangan Nasional menyampaikan hal sebagai berikut: a. Badan Pangan



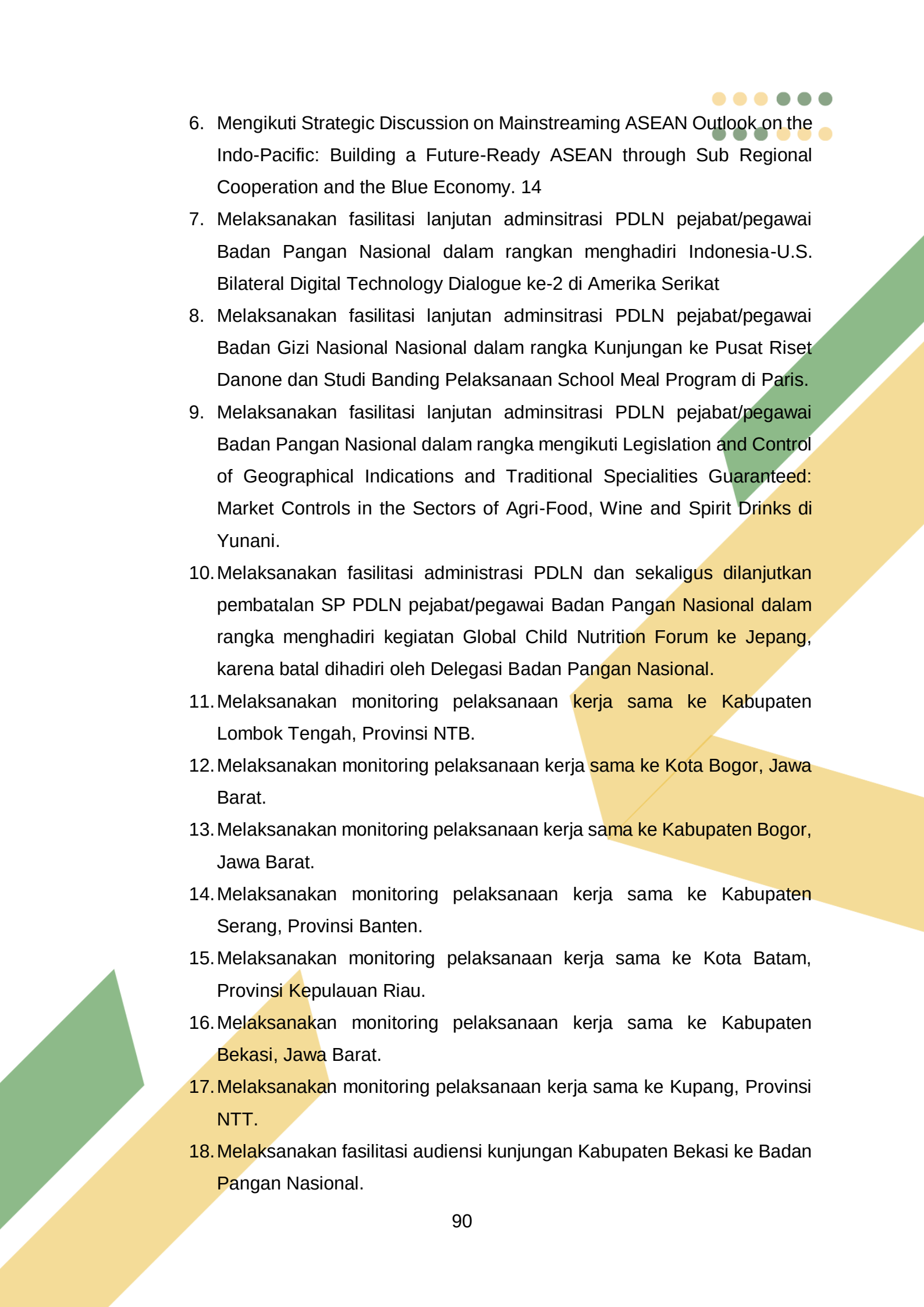
Nasional berkontribusi atas pencapaian PN 2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru) dan PN 7 (Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan).

5) Revisi DIPA 20, DIPA 21, DIPA 22

Revisi dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Pangan Nasional. Fokus revisi DIPA 20 dalam rangka pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan untuk kegiatan 1) Pembelian Layanan Figma; 2) Pembelian Layanan Canva; serta 3) Pencetakan dan Penjilidan Rilis SKPG. Fokus revisi DIPA 21 dalam rangka pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan untuk kegiatan 1) Bahan Promosi; serta 2) Gerakan Pangan Murah. Fokus revisi DIPA 21 dalam rangka pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan untuk kegiatan 1) Rapat Koordinasi Penatausahaan BMN; 2) Sewa Kendaraan Pimpinan; 3) Pemeliharaan Inventaris Kantor; serta 4) Rapat Koordinasi Rekomendasi Kebijakan.

6) Kerja Sama Bidang Pangan, melalui kegiatan:

1. Melakukan fasilitasi peninjauan Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Universitas Pakuan Bogor.
2. Melakukan fasilitasi peninjauan Kerja Sama berupa penyusunan draft Kesepahaman Bersama antara Badan Pangan Nasional dan BMKG terkait Dukungan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk ketahanan pangan.
3. Mengikuti rapat pembahasan penyusunan Terjemahan Resmi Perbadan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar di Peredaran.
4. Mengikuti rapat pembahasan Pelaksanaan Input Dokumen Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2024.
5. Mengikuti Soft Launching dan Bimbingan Teknis Penerbitan Dokumen PDLN di Kementerian Luar Negeri melalui Aplikasi AEPSILON Web-Based.

- 
6. Mengikuti Strategic Discussion on Mainstreaming ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Building a Future-Ready ASEAN through Sub Regional Cooperation and the Blue Economy. 14
7. Melaksanakan fasilitasi lanjutan administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka menghadiri Indonesia-U.S. Bilateral Digital Technology Dialogue ke-2 di Amerika Serikat
8. Melaksanakan fasilitasi lanjutan administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Gizi Nasional Nasional dalam rangka Kunjungan ke Pusat Riset Danone dan Studi Banding Pelaksanaan School Meal Program di Paris.
9. Melaksanakan fasilitasi lanjutan administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti Legislation and Control of Geographical Indications and Traditional Specialities Guaranteed: Market Controls in the Sectors of Agri-Food, Wine and Spirit Drinks di Yunani.
10. Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN dan sekaligus dilanjutkan pembatalan SP PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka menghadiri kegiatan Global Child Nutrition Forum ke Jepang, karena batal dihadiri oleh Delegasi Badan Pangan Nasional.
11. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerja sama ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.
12. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerja sama ke Kota Bogor, Jawa Barat.
13. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerja sama ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
14. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerja sama ke Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
15. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerja sama ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
16. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerja sama ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
17. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerja sama ke Kupang, Provinsi NTT.
18. Melaksanakan fasilitasi audiensi kunjungan Kabupaten Bekasi ke Badan Pangan Nasional.

19. Melaksanakan diskusi perlindungan konsumen di bidang pangan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional

7) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Penyusunan dan penerbitan publikasi cetak melalui majalah bulanan Media NFA Volume 3 Nomor 12, Desember 2024 mengangkat isu utama terkait Akhir Tahun 2024, Jaga Fluktuasi Harga, Kendalikan Inflasi yang disebarluaskan di lingkup internal dan juga stake holder terkait.
2. Talkshow/ wawancara Kepala NFA di media TV/ Radio pada bulan Desember 2024 sebagai berikut : 17 Desember 2024 CNBC Indonesia Prabowo Perintahkan Bagi Beras Gratis, Ini Kesiapan Bapanas 19 Desember 2024 CNN Indonesia Kepala Bapanas Klaim Stok Beras Cukup di Natal Tahun Baru 20 Desember 2024 Investor Daily TV Stabilitas Pasokan Pangan Jelang Nataru 20 Desember 2024 CNN Indonesia The Role of Food and Energy Sovereignty in Achieving 8% Economic Growth 29 Desember 2024 Metro TV 16 Juta Keluarga Terima Bantuan Beras
3. Pada bulan Desember 2024, NFA telah menerbitkan 29 siaran pers resmi dengan rincian sebagai berikut : 23 isu terkait ketersediaan dan stabilitas pangan, 2 isu terkait panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan 4 isu lainnya.
4. Pelayanan informasi publik yang diberikan kepada pemohon informasi publik dan terselesaikan sesuai batas waktu yang dipersyaratkan

b Pusat Data dan Informasi, pada periode bulan Desember Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan prioritas:

1) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tata Kelola:

Telah dilakukan penyusunan draf format resmi Kerangka Acuan Kerja clearance Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) Badan Pangan Nasional. 2) Telah dilakukan penyusunan draf format resmi dokumen Software Requirement System dalam pengembangan aplikasi SPBE. 3) Telah dilakukan penyusunan draf Surat Keputusan (SK) Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Badan Pangan Nasional.

Arsitektur :

Telah dilaksanakan sosialisasi implementasi Arsitektur SPBE untuk evaluasi anggaran belanja TIK SPBE pada tanggal 3 Desember 2024. Pada pertemuan ini disampaikan mengenai integrasi aplikasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE sebagai aplikasi Ega untuk clearance sehingga harus segera dilakukan perbaikan dan penyempurnaan arsitektur SPBE di SIA SPBE. 2) Telah dilaksanakan reviu Peta Rencana Arsitektur SPBE untuk disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja yang menghasilkan matriks Gap Pengembangan Aplikasi Badan Pangan, sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi implementasi Arsitektur SPBE pada tanggal 3 Desember 2024. Hasil reviu berupa perbaikan lampiran pada SK Arsitektur SPBE. 3) Telah dilakukan penguatan dan pendalaman domain keamanan dan infrastruktur SPBE di aplikasi SIA SPBE dan pencatatan di SK Arsitektur SPBE.

Keamanan :

Telah dilakukan penyusunan format penulisan Non Disclosure Agreement dalam rangka penjaminan keamanan data dan informasi dalam kerja sama Pusdatin Badan Pangan Nasional dengan pihak ketiga.

2) Kelola Kelola Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)

Detail penggunaan resource PDNS 1 (satu) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) oleh Badan Pangan Nasional: sudah terpakai 378 GHz atau 98,44%. 2) Memory dari yang dialokasikan sebanyak 640 GB sudah terpakai 633 GB atau 98,91%. 3) Storage dari yang dialokasikan sebanyak 19,8 TB sudah terpakai 19,59 TB atau 98,94%. 4) Menggunakan 24 vApps, dengan total VM running 53 dari 56 VM.

Penggunaan resource pada PDNS 2

Tidak ada perubahan di VM server PDNS 2 (dua). Belum ada info terkait pemindahan kembali beberapa VM ke server ke PDNS 2 (dua).

3) Server kendali IT

Penggunaan resource pada Ruang Pusat Kendali IT Badan Pangan Nasional terlihat pada gambar 3.3 dengan penjelasan sebagai berikut: a. vCPU dari yang dialokasikan sebanyak 134,4 GHz sudah terpakai 7,08 Ghz (5,27%). b. Memory dari yang dialokasikan sebanyak 1023,52 GB sudah terpakai 270,76 GB (26,45%). c. Storage dari yang dialokasikan sebanyak 25,34 TB sudah terpakai 2,27 TB (8,96%). d. Total VM running 23 (dua puluh

tiga) dari 24 (dua puluh empat) VM, 1 (satu) VM suspended, 0 power off, dan total host terkoneksi sebanyak 1 (satu).

4) Jaringan Internet

a. Penggunaan Bandwidth Traffic main link FA BW selama bulan Desember
Penggunaan Bandwidth Badan Pangan Nasional Bulan Desember 1) In bound (download) a) Current: Besar bandwidth yang terakhir tercatat selama periode Desember sebesar 98,9 MB. b) Average: Besar bandwidth rata-rata selama periode Desember sebesar 41,23 MB. c) Maximum: Besar bandwidth maksimal selama periode Desember sebesar 205,12 MB. 2) Outbound (upload) a) Current: Besar bandwidth yang terakhir tercatat selama periode Desember sebesar 31,35 MB. b) Average: Besar bandwidth rata-rata selama periode Desember sebesar 19,48 MB. c) Maximum: Besar bandwidth maksimal selama periode Desember sebesar 112,97 MB. b. Koneksi Advice ke Access Point (AP) 1) Total client yang mengakses jaringan Internet Badan Pangan Nasional selama bulan Desember rata-rata mencapai 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) device per hari, menurun dari bulan November yang mencapai 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) device per hari. Dinamika Penggunaan Internet Januari sampai Desember 2024 2) Total penggunaan AP selama bulan Desember 2024 mengalami kenaikan secara signifikan pada lantai 3 (tiga). Rata-rata penggunaan secara harian terlihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3 Total Penggunaan AP Januari sampai Desember 2024 c. Fortiget Dalam rangka peningkatan keamanan jaringan internet Badan Pangan Nasional, tiap bulan dilakukan laporan monitoring fortigate. Ringkasan total ancaman dan sumber terblokir dari hasil monitoring di bulan Desember sebagai berikut: 1) Intrusion Prevention System (IPS): Terdeteksi sebanyak 1 (satu) serangan dengan tingkat risiko high-critical yang berhasil diblokir oleh sistem. 2) Anti Virus: Tidak ada file terdeteksi mengandung virus selama bulan November (0 file terdeteksi virus). 3) Anomali: Terdapat 286 (dua ratus delapan puluh enam) sumber yang terdeteksi sebagai kategori critical dan berhasil diidentifikasi sebagai ancaman. Jenis ancaman anomali yang teridentifikasi meliputi: Lantai Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Lantai 2 65 62 66 70 59 61 65 67 64 59 65 73 Lantai 3 67 58 54 61 58 55 60 57 54 51 64 74 Lantai 4 78 76 86 91 86 80 84 81 92 95 79 75 Lantai 6 105 89 122 137 146 138 152 145



144 145 156 130. Pusat Data dan Informasi Pangan a) UDP Flood Attack: Serangan yang bertujuan membanjiri jaringan dengan lalu lintas UDP berlebihan untuk menghabiskan sumber daya sistem. b) ICMP Flood Attack: Serangan pembanjiran jaringan melalui lalu lintas ICMP, menyebabkan sistem menjadi tidak responsif. 4) Web Filter: Sebanyak 1.993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) situs web yang teridentifikasi berbahaya berhasil diblokir oleh sistem Web Filter. 5) Secure Socket Layer (SSL): Terdapat 1 (satu) alamat IP yang berhasil diblokir karena aktivitas yang mencurigakan terkait enkripsi SSL. 6) Application Control: Sebanyak 8.595 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima) aplikasi yang dianggap tidak diizinkan berhasil diblokir oleh sistem kontrol aplikasi. 7) Forwarded Traffic: Ditemukan 26.808 (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan) tujuan lalu lintas yang mencurigakan dan berhasil diblokir sebelum mencapai jaringan. 8) Aplikasi/URL yang sering terblokir selama bulan Desember: Catce, Malware, Pornografi.

5) Help Desk SAPA

Permohonan Layanan yang diajukan selama bulan Desember yaitu: Total request zoom di bulan Desember ada 9 (sembilan) permintaan zoom, yang berasal dari internal Pusdatin Pangan dan dari unit kerja lain yaitu Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi; Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan Distribusi dan Cadangan Pangan.

6) Pembangunan Sistem Informasi Pangan

Data Pangan, dan Sistem Informasi Pangan (SIPangan) Daerah a. Telah dilaksanakan koordinasi untuk uji coba SIP Daerah ke 5 (lima) lokasi yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Garut dan Kota Depok. Kondisi saat ini masih banyak Dinas Pangan Daerah yang belum memiliki SIPangan sendiri, sehingga Pusdatin Pangan membuatkan. Pusat Data dan Informasi Pangan template SIPangan Daerah dengan menggunakan teknologi berbasis cloud. Respon Dinas Pangan Daerah terhadap SIPangan Daerah adalah baik dan positif, diharapkan SIPangan Daerah dapat menjadi one stop data sehingga memudahkan untuk pembuatan laporan kepada pimpinan. b. Monitoring update konten Portal Satu Data Pangan, baik pada menu dataset, visualisasi, maupun publikasi.

7) Monev integrasi aplikasi

a. Integrasi Aplikasi Food Security and Vulnerable Atlas (FSVA) melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) 1) Tidak ada penambahan subscriber di bulan Desember, sehingga total tetap 9 (sembilan) subscriber yaitu Diskominfo Kota Balikpapan, Diskominfo Kota Yogyakarta, Diskominfo Kab. Halmahera Utara, Diskominfo Kabupaten Buleleng, Diskominfo Kab. Wonogiri, dan Diskominfo Kab. Banjar, dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, SPLP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) Bappenas. 2) 0 total success request. 3) 0 total traffic. 1) Total 26 (dua puluh enam) subscriber. Tidak ada penambahan subscriber di bulan Desember.

c Biro Keuangan Pengadaan dan Umum pada periode bulan Desember Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan prioritas antara lain.

Pada bulan Desember dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 956 Layanan BMN telah merealisasikan Rp. 85.271.122,- atau sebesar 13,51%. 2. Pada bulan Desember dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 959 Layanan Protokoler telah merealisasikan Rp. 14.643.500,- atau sebesar 1,62%. 3. Pada bulan November dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 962 Layanan Umum telah merealisasikan Rp. 1.114.448.062,- atau sebesar 8,87%. 4. Pada bulan Desember dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 994 Layanan Perkantoran merealisasikan komponen pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan November sebesar Rp. 3.759.279.048,- atau sebesar 7,13%, Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 714.605.980,- atau sebesar 4,71%. Sedangkan untuk KRO EBB 951 Komponen Layanan Sarana Internal dan KRO/RO EBD 955 Komponen Layanan Manajemen Keuangan melaksanakan beberapa kegiatan, berupa: a. Rapat Koordinasi Pelaksanaan LLAT Badan Pangan Nasional b. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2024 c. Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Interim BPK RI d. Kegiatan Entry Meeting BPK RI atas Badan Pangan Nasional e. Kegiatan Entry Meeting BPK RI pemeriksaan Interim di Polbangtan D.I. Yogyakarta 5. Pada bulan November KRO/RO EBB 962 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Komponen Layanan Sarana Internal telah merealisasikan Rp. 0,- atau sebesar 0,00%



d Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Hukum, melaksanakan kegiatan di bulan Desember 2024 :

1) Menghadiri Sosialisasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional

Mengikuti kegiatan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian agar dapat diimplementasikan dengan baik oleh instansi/unit kerja pengguna. Aplikasi ini dapat digunakan untuk penyiapan database nasional pejabat fungsional bidang pertanian, percepatan proses pemberian rekomendasi kebutuhan formasi, dan pendaftaran uji kompetensi. Rapat dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian serta pengelola kepegawaian lingkungan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, KLHK, Badan Karantina Nasional dan Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Provinsi dan Kabupaten Kota.

2) Menghadiri Rapat Input NSPK

Menghadiri rapat internal penginputan bukti dukung NSPK bersama Tim Kerja Sumber Daya Manusia dan Tim Kerja Hukum.

3) Bidang Rapat Evaluasi RB TW I-III

Pelaksanaan Evaluasi RB Triwulan III tahun 2024 di lingkungan Badan Pangan Nasional, deadline pengisian Triwulan III pada tanggal 13 Desember 2024, terdapat beberapa unit kerja yang belum menyelesaikan input portal RB.

4) Rapat Konsolidasi Kejelasan Kelembagaan Badan Pangan Nasional

Pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai tindak lanjut hasil Konsolidasi Kelembagaan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024, bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dalam rangka pengendalian kerawanan dan kewaspadaan pangan, perlu dilakukan percepatan penataan. Organisasi Badan Pangan Nasional melalui Perubahan Kedua atas Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, dengan tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

5) Peningkatan Kapasitas terkait Kinerja ASN dan Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas mengundang narasumber dari Direktorat Kinerja Badan Kepegawaian Negara serta peningkatan implementasi nilai berAKHLAK dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari.

6) Menghadiri rapat Diseminasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

Diseminasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Hal ini perlu dilakukan agar ASN, TNI, dan Polri memahami maksud dari ditetapkan Peraturan Menteri PAN RB no. 17 Tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain : 1) Penyusunan aturan Konflik kepentingan (6 bulan); 2) Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Internal yang terdiri dari a. penyusunan petunjuk teknis (tidak wajib), b. Identifikasi dan manajemen konflik kepentingan, c. Penyediaan sumberdaya, d. Sosialisasi internal, e. Penetapan pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan;

7) Menghadiri FGD Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan transformasi jabatan fungsional dengan agenda pemaparan hasil monev, tindak lanjut arah kebijakan JF pasca masa transisi kabinet terutama bagi Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur. Sebagai tindak lanjut, Badan Pangan Nasional akan melakukan kegiatan seperti mengadakan sosialisasi kepada instansi daerah terkait penghitungan kebutuhan formasi dan persetujuan formasi., melakukan penyisiran kesesuaian nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pangan Nasional, menyusun Standar Kompetensi Jabatan khususnya kompetensi teknis. Dan menyelesaikan urusan pegawai Non ASN di lingkungan Badan Pangan Nasional dan rencana pengangkatan kedepannya dengan mempertimbangkan jabatan dan kelas jabatan yang ada di lingkungan Badan Pangan Nasional.

8) Pengangkatan struktural di lingkup Badan Pangan Nasional

Bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional; b. bahwa untuk melaksanakan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pangan Nasional



sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengangkatan Jabatan Pengawas; 12 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

9) Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Lingkup Badan Pangan Nasional Periode Desember 2024

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepegawaian terhadap PNS lingkup Badan Pangan Nasional yang telah memenuhi syarat Kenaikan Pangkat sebagai penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara. Berdasarkan pemutakhiran database Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIM-ASN) Badan Pangan Nasional perlu mengusulkan penerbitan Keputusan Kenaikan Pangkat kepada pegawai yang telah memenuhi syarat dan diusulkan minimal 2 bulan sebelum TMT KP.

10).Pengangkatan Jabatan fungsional AKP Pegawai Lingkup Badan Pangan Nasional Periode Desember 2024

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepegawaian terhadap PNS lingkup Badan Pangan Nasional yang telah memenuhi syarat Kenaikan Pangkat sebagai penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara. Berdasarkan pemutakhiran database Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIM-ASN) Badan Pangan Nasional perlu mengusulkan penerbitan Keputusan Kenaikan Jabatan setelah dilakukan uji kompetensi melalui penyesuaian/inpassing dari jabatan lain ke jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan.

11)Kegiatan pengawasan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 1

Dalam rangka mengisi lowongan formasi PPPK dilaksanakan pengawasan Selkom tahap 1 Di BKN Cililitan pada hari selasa, 3 Desember 2024.

12)Kegiatan pelatihan pelayanan prima

Dalam rangka meningkatkan pelayan prima di lingkup Badan Pangan Nasional yang di laksanakan pada hari jum'at-sabtu, 06-07 Desember 2024 di Amanuba Resort Rancamaya.



13) Kegiatan pelantikan JPT administrator dan JF lingkup Badan Pangan Nasional

Dalam rangka pengembangan karir pegawai telah dilaksanakan pelantikan bagi JF dilingkup Badan Pangan Nasional pada hari senin, 09 Desember 2024.

14) Kegiatan pengisian indeks NSPK

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5356/BAK.03/SD/F/2024 tanggal 01 Agustus 2024 perihal Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2024, Badan Pangan Nasional perlu melakukan penyiapan dokumen Indeks NSPK Manajemen ASN di lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan pada hari senin- rabu, 09-11 desember di Hotel Royal.

15) Kegiatan ujikom Auditor

Dalam rangka pengawasan di lingkup Badan Pangan Nasional dilaksanakannya ujian Auditor hari rabu, 11 Desember 2024.

16) Kegiatan pengawasan SKB CPNS Badan Pangan Nasional 2024

Dalam rangka mengisi lowongan formasi CPNS dilaksanakan pengawasan SKB CPNS 2024 yang dilaksanakan beberapa lokasi sebagai berikut: a) Bandung tanggal 17-19 Desember 2024 b) Yogyakarta tanggal 17-19 Desember 2024 c) Semarang tanggal 19-20 Desember 2024.

17) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

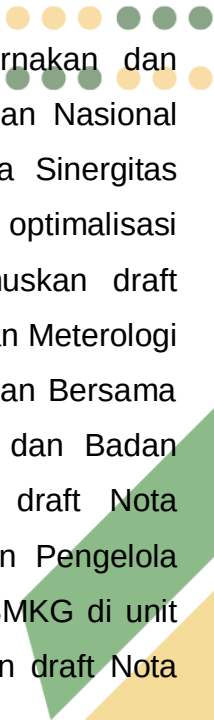
Biro Organisasi, SDM, dan Hukum bersama dengan Direktorat di lingkungan Badan Pangan Nasional melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan bulan Desember 2024, sebagai berikut: a. Rancangan Peraturan Presiden (Rpepres) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dengan pemrakarsa Oleh Kementerian Sekretariat Negara RI; b. Penguatan Koordinasi di bidang Keamanan dan mutu pangan dalam pembahasan pending issu RPP Perubahan atas Tahun 2019; c. Mengikuti rapat Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Panca Prioritas yang diadakan oleh Kumham; 106 Desidarius M.Tames 1994052320232211013 24-24 Des 2024 1 Tahunan Dir.Perumusn Standar Mutu dan Keamanan Pangan 107 Dir.Perumusn Standar Mutu dan Keamanan Pangan 30 des3 Januari 2025 4 Tahunan Dir.Perumusn Standar Mutu dan Keamanan Pangan

108 Anisa Mevy Permatasari 199701302023212007 31-31 Des 2024 1 Tahunan Dir.ketersediaan Pangan 109 Ni Nyoman Esti Pramesti 199402072023212028 31-31 Des 2024 1 Tahunan Dir.ketersediaan Pangan 110 Bambang Hariyanto, SP., MP 196909011999031001 27-31 Des 2024 3 Tahunan Dir.Pengawasan Penerapan Stadar Keamanan dan Mutu Pangan 111 Fadliani, S.Kom 198007252007012011 27-31 Des 2024 3 Tahunan Biro OSH 112 Eni Nurkhayani, STP., MSE 198004022005012001 27-27 Des 2024 1 Tahunan Dir.Pengawasan Penerapan Stadar Keamanan dan Mutu Pangan

27 d. Finalisasi Rperbadan tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan Tahun 2025; e. Kegiatan pemahaman mengenai petunjuk teknis jabatan fungsional perancang Perundang-undangan; f. Penyusunan Tata Cara Pengadaan CPP dari Luar negeri dan dalam negeri; g. Rancangan Peraturan Badan SPHP tentang Komoditas Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan; h. Penetapan Pengundangan Rperbadan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional; i. Penyampaian Paraf Persetujuan Penerjemah Alih Bahasa No.10 tahun 2024 ttg Batas Maksimal Cemarkan Dalam Pangan Segar di Peredaran; j. Koordinasi Penetapan revisi HPB 2024; k. Permohonan proses Harmonisasi RPerbadan ttg petunjuk teknis DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan Tahun 2025; l. Penyampaian Progress Penyusunan RUU Penyelamatan Pangan m. Penyampaian hasil Harmonisasi RPerbadan tentang Batas Maksimal Residu Pestisida dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan; n. Reviu draft revisi Perbadan No.16 tahun 2023 ttg pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional; o. Reviu RKepbadan tentang Revisi HPB tahun 2024; p. Mengikuti rapat Identifikasi regulasi terkait Lahan dan Infrastruktur yang diselenggarakan oleh Kementan; q. Permohonan masukan terhadap RKepbadan penetapan penerima Bantuan pangan pengganti tahun 2024; r. Penetapan dan Pengundangan RPerbadan ttg kelas jabatan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

18) Penyusunan Naskah Perjanjian

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional menjalin kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan (stakeholder). Penyusunan naskah perjanjian yang disusun



pada bulan Desember 2024, sebagai berikut: Menyempurnakan dan merumuskan draft Perjanjian Kerjasama Antara Badan pangan Nasional dengan Institut Teknologi Sepuluh November dalam rangka Sinergitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan Data Pangan; Menyempurnakan dan merumuskan draft Perjanjian Kerjasama antara Badan Pangan Nasional dan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika; Pembahasan dokumen Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pangan Nasional dan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika; Menyempurnakan draft Nota Kesepahaman antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Pengelola Perbatasan (BNPP); Permintaan Identifikasi kebutuhan data BMKG di unit Kerja di Lingkup Badan Pangan Nasional terkait pembahasan draft Nota Kesepahaman dan PKS.

19)Penyusunan Instrumen Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum dilakukan beberapa penyusunan instrument hukum lainnya, sebagai berikut: a. Penyempurnaan Rancangan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.52.3 tahun 2024 tentang Penetapan kebutuhan impor pangan tahun 2024; 29 b. Penyempurnaan Rancangan Surat Keputusan Penunjukan Tim Akun SSO Kemeterian Keuangan Aplikasi SIMAN V2; c. Penyempurnaan Rancangan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Penyerahan Arsip Statis Badan Pangan Nasional Tahun 2024; d. Penyempurnaan Rancangan Surat Keputusan Pengelola Keuangan Satker Badan Pangan Nasional tahun 2025.

20)Koordinasi Evaluasi, pelaksanaan progsun dan persiapan penyusunan laporan Pengelolaan JDIH Badan Pangan Nasional tahun 2024;

Dalam rangka meningkatkan diseminasi dan literasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program penyusunan peraturan Badan Pangan Nasional Tahun 2024. Program Penyusunan (Progsun) Tahun 2024 terjadi sedikit penurunan, dikarenakan terdapat perubahan kebijakan di kementerian hukum, semula pengharmonisasian RPermen/RPerbadan dilaksanakan oleh Pokja, namun



saat ini pelaksanaan pengharmonisasian dilaksanakan oleh tim berdasarkan tugas fungsi yang ditetapkan di kementerian hukum.

21) Pelaksanaan kegiatan Advokasi Hukum

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : a) Mengikuti Pelaksanaan serah terima Mobil SPHP oleh Kepala Badan Pangan Nasional; b) Menghadiri pelantikan JPT Pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional; c) Mengikuti kegiatan forum pendalaman materi untuk Perancang Perundang-undangan; d) Mengikuti Talk show dan lomba menghias tumpeng dalam rangka hari ibu dan HUT Dharma Wanita Persatuan lingkup Badan Pangan Nasional; e) Menghadir acara ASN Culture Festival tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KemenPANRB; 30 f) Menghadiri Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (Revisi Perbadan 16/2023); g) Mengikuti rapat Penyusunan Penilaian Sanitasi Higiene untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

e Inspektorat pada periode bulan Desember Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan prioritas diantaranya:

Tugas Inspektorat sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, yaitu melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3.3 Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional Periode Bulan Desember Tahun 2024

Kepala Badan Pangan Nasional dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya pada bulan Desember Tahun 2024 kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Serah Terima 5 Unit SPHP Mobile ke Pemda, Bukti Kepesatan Badan Pangan Nasional 'Gaspol' Pelaksanaan Stabilisasi Pangan

Pemerintah terus menerus mengupayakan inflasi yang terkendali dengan menekan gejolak pangan. Salah satu patron yang konsisten diterapkan adalah penggencaran program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bagian dari Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Melalui GPM, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menggandeng seluruh pemerintah daerah beserta stakeholder pangan untuk dapat menyediakan sejumlah pangan pokok strategis dengan harga yang baik dan wajar bagi masyarakat. Dengan mewujudkan aksesibilitas pangan tersebut juga



turut menandakan adanya kelancaran distribusi dari produsen, pedagang sampai konsumen.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyebutkan pihaknya menaruh

fokus pada pelaksanaan GPM di seluruh penjuru Indonesia, sehingga dari tahun ke tahun, program GPM dapat terus berkembang pesat dan berdampak positif dalam pengendalian inflasi. Untuk itu, dengan penyerahan 5 unit 'SPHP Mobile' berupa mobil box kepada 5 pemerintah daerah yang terpilih, GPM dapat terus diintensifkan dan mampu hadir di daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau.

"Hari ini kita berkesempatan untuk memberikan lagi, stimulus kepada daerah-daerah yang sangat memerlukan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi



5 kendaraan ini agar bisa digunakan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Karena dengan ini bisa menjangkau daerah-daerah yang memang belum terjangkau sebelumnya," jelas Arief sesuai acara simbolis pelepasan 'SPHP Mobile' di Kantor NFA, Jakarta, pada Senin (2/12/2024).

"Memang ini sangat diperlukan untuk bisa sampai ke masyarakat secara lebih luas, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo harus bisa berkarya dan sampai kepada masyarakat banyak. Ini salah satunya dan ini program nyata. Jadi ini harus bisa sampai ke masyarakat yang paling jauh sekalipun," ucap Arief.

Lebih lanjut, dengan adanya 'SPHP Mobile' diharapkan agar pemerintah daerah mampu menggencarkan GPM di wilayahnya. Transaksi jual beli pun dapat dilaksanakan di 'SPHP Mobile' karena terdapat ornamen semacam toko yang mampu memuat sejumlah pangan pokok strategis yang dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah daerah yang menerima 5 unit 'SPHP Mobile' hari ini antara lain Sumatera Barat, Jambi, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kalimantan Tengah. Adapun pagu anggaran 'SPHP Mobile' per unitnya adalah Rp 400 juta. Berdasarkan itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menekankan kepada pemerintah daerah yang menerima apresiasi ini, harus mengoptimalkan penggunaannya bagi kepentingan masyarakat.

"Nanti ke depan saya minta ada list setiap harinya SPHP Mobile ini kemana saja. Jadi di kelurahan mana saja, terjadwal, dan dikoordinasikan dengan masyarakat agar produk kita bisa bantu masyarakat. Kalau perlu dalam sehari ada 2 sampai 3 titik. Jadi semakin bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, utamanya di 5 daerah penerima," pinta Arief.

"Tugas dari pemerintah pusat itu memberikan stimulasi agar pemerintah daerah bisa melakukan hal yang sama. Jadi Badan Pangan Nasional itu dalam setiap kegiatannya itu mendorong, tapi yang kita harapkan adalah bisa menjadi contoh dan menjadi stimulus daerah untuk bisa mengerjakan hal yang sama dengan baik. Ini inisiasi yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Misal kalau kita lihat sudah ribuan titik untuk GPM," tandasnya.



GPM sendiri merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai stakeholder pangan yang dikoordinasikan oleh NFA. Program ini terbilang cukup ampuh dalam menekan gejolak fluktuasi pangan. Intensitas pelaksanaan GPM dari tahun ke tahun pun semakin mengalami eskalasi yang impresif.

Di tahun 2022, GPM digelar di 442 titik yang tersebar 30 provinsi dan 110 kabupaten/kota. Sementara pelaksanaan GPM sepanjang 2023 semakin intensif dan mengalami kenaikan pesat sampai 267 persen dibandingkan 2022. GPM di 2023 tercatat sebanyak 1.626 kali di 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota.

Selanjutnya, pada GPM di 2024 pun turut mengalami kinerja yang prima. Dibandingkan dengan tahun 2023, capaian GPM di tahun ini melesat pesat hingga 439,5 persen. Total GPM sampai minggu ketiga November telah capai 8.773 kali di 37 provinsi dan 478 kabupaten/kota.

Selain dalam bentuk GPM, intervensi yang pemerintah lakukan juga dalam bentuk program beras SPHP. "Bulog itu punya stok beras hari ini 1,9 juta ton. Nanti akhir tahun bisa 2 juta ton. Jadi indikator-indikator ini menandakan bahwa ketahanan pangan kita baik. Program SPHP beras 150 ribu ton per bulan untuk Desember Januari Februari," sebut Arief.

"Dalam rapat terbatas terakhir dengan Bapak Presiden, beliau menyetujui nanti di Januari Februari perlu ada intervensi pemerintah. Ada SPHP beras, yang satu lagi bantuan pangan beras. Keduanya ini dijalankan untuk membantu masyarakat luas. Jadi harga wajar di tingkat petani, harga wajar juga di konsumen. Ini yang kita jaga," tutupnya.

Salah satu penerima 'SPHP Mobile', Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari, mengungkapkan pihaknya semakin terpacu untuk melaksanakan berbagai program pengendalian pangan dengan adanya fasilitas ini. Apalagi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terbaik yang menerima 'Bapanas Award 2024' dengan kategori GPM Provinsi Terbaik Nasional Tahun 2023.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pangan Nasional atas bantuan mobil SPHP untuk Jawa tengah. Di Jawa tengah, SPHP dilakukan sangat intens. Saat ini saja 2024, (GPM) sudah 993 kali di 35 kabupaten/kota. Jadi ini



sangat membantu karena jangkauan Jawa Tengah punya wilayah yang cukup luas (hingga) 35 kabupaten/kota,” ungkap Dyah.

Turut hadir dalam kegiatan hari ini antara lain Direktur Ketersediaan Pangan NFA Indra Wijayanto, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA Yusra Egayanti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ismed Wijaya, Plt. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Derry Swasti, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY R. Hery Sulistio Hermawan, dan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Elpiansyah.

2. Dukung Swasembada Pangan, NFA Terus Perkuat Stok Cadangan Pangan Pemerintah

Dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional yang mandiri dan berdaulat.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyatakan guna mewujudkan swasembada pangan, diperlakukan sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, para pelaku usaha pangan, serta seluruh elemen masyarakat. Hal ini merupakan kunci kesuksesan bersama untuk menggapai Indonesia Emas 2045.

“Penguatan cadangan pangan menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, gejolak harga pangan dunia, dan risiko bencana alam. Dengan cadangan yang memadai, kita dapat menjaga ketahanan pangan nasional serta mendorong penguatan ekosistem pangan nasional yang mendukung peningkatan kesejahteraan pelaku usaha di sektor pangan,” ujar Arief pada Selasa (3/12/2024).

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh NFA meliputi penguatan infrastruktur dan logistik pangan melalui pembangunan sarpras rantai dingin (cold chain) untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan merata, kerjasama dengan BUMN dan asosiasi untuk memperkuat pengadaan dan pengelolaan stok

pangan pokok strategis, hingga optimalisasi penyerapan hasil panen petani sebagai langkah prioritas mendukung produksi domestik.

Di sisi lain, program diversifikasi pangan lokal mendukung pengembangan pangan lokal sebagai alternatif seperti sagu, singkong, dan umbi-umbian, juga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada beras, di samping gerakan Stop Boros Pangan.

Dengan kebijakan ini, Kepala NFA berharap upaya ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap



pengembangan ekosistem usaha pangan, termasuk peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha pangan termasuk petani, distributor, dan pengolah, bisa mendapatkan manfaat melalui

kepastian pasar, stabilitas harga, dan peluang usaha yang lebih luas.

NFA optimis bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengurangi impor, bahkan mampu menjadi negara pengekspor pangan di masa depan, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.

Sebelumnya dalam Rapat Kabinet di Jakarta (2/12/2024) Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja kementerian/lembaga di bidang pangan atas upayanya dalam meningkatkan produksi, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memperkuat CPP. Diharapkan 2025 tidak impor beras.

"Apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional, semua unsur, Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan Menteri BUMN. Terima kasih langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan," ungkap Presiden.

Diketahui pada akhir tahun 2024, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai hampir 2 juta ton, harga pangan relatif stabil untuk menjaga daya beli masyarakat. Ke depan upaya pemenuhan CPP akan dioptimalkan melalui produksi dalam negeri.

3. Kolaborasi Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan di Akhir Tahun 2024

Menjelang akhir tahun 2024, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan baik, terutama di tengah meningkatnya permintaan selama periode libur panjang akhir tahun.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, sektor swasta, serta asosiasi pelaku usaha dalam menghadapi potensi fluktuasi harga dan gangguan pasokan.



“Jadi semua kementerian/lembaga, asosiasi, dan seluruh pelaku usaha stakeholders di bidang pangan diminta untuk fokus pada swasembada pangan. Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil

Presiden Republik Indonesia menegaskan visi besar mendukung kebutuhan pokok rakyat yang terpenuhi dengan harga yang terjangkau sekaligus menciptakan kebahagiaan bagi para petani, peternak, nelayan dengan harga jual produk yang menguntungkan. Ini adalah upaya menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sektor pangan menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Stabilitas Pangan Periode Nataru 2024-2025 di kantor NFA, Jakarta pada Kamis (5/12/2024).



Sebagai bagian dari upaya tersebut, NFA telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain monitoring dan pengendalian harga pangan di pasar-pasar. Ini dilakukan untuk mendeteksi potensi kenaikan harga yang tidak wajar, pemerataan stok pangan seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur untuk merespon permintaan mendadak serta menjaga stabilitas harga, termasuk melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Perum Bulog, ID FOOD, dan mitra strategis terus dilakukan di daerah-daerah yang menunjukkan potensi kenaikan harga yang signifikan. Begitu pula program penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu, tetap dilaksanakan untuk memastikan daya beli terjaga.

Terakhir, kolaborasi dengan pelaku usaha dan asosiasi mulai dari produsen hingga distributor. Ini untuk menjaga ketersediaan barang di pasar dengan harga yang kompetitif.

Menurut data NFA, kondisi ketersediaan pangan nasional menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berada pada tingkat yang aman. Proyeksi stok akhir tahun 2024 antara lain beras 8,398 juta ton; jagung 3,665 juta ton; minyak goreng 336 ribu ton; dan gula konsumsi 1,478 juta ton.

Stok beras Perum Bulog per 4 Desember 2024 mencapai 2,07 juta ton, dengan rincian 1,818 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 252 ribu ton stok komersial.

Ditambahkan oleh Arief, sinergi kolaborasi dengan mitra strategis dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Lalu optimalisasi peran Bulog, ID FOOD, dan mitra logistik lainnya, serta memastikan rantai pasok berjalan efektif dengan melibatkan asosiasi dan pelaku usaha lainnya.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan stabilitas pangan nasional selama periode akhir tahun 2024, memberikan kepastian harga yang wajar, serta meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pangan khususnya dalam menjaga inflasi sesuai target pemerintah 2,5 persen plus minus 1 persen," pungkas Arief.



4. Fokus pada Keseimbangan Harga Petani dan Konsumen yang Wajar, Badan Pangan Nasional Terus Dukung Peningkatan Produksi Gula Nasional

Dalam upaya membantu menjaga kestabilan ekosistem gula dalam negeri, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah menetapkan harga acuan pembelian (HAP) di tingkat produsen dan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen untuk gula konsumsi. Kebijakan HAP tersebut turut menciptakan keseimbangan harga di tiap lini rantai pasok.

Melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, HAP di produsen sebesar Rp 14.500 per kilogram (kg) diyakini telah menjadi basis harga yang wajar dan memberi kepastian harga bagi petani tebu domestik. Sementara HAP di konsumsi dalam rentang Rp 17.500-18.500 per kg sesuai wilayah menjadi acuan kewajaran pedagang melepas stok di pasar.

"Melalui kebijakan HAP yang berdasarkan perhitungan yang mempertimbangkan masukan pihak-pihak yang relevan, Badan Pangan Nasional turut membantu dalam penguatan ekosistem pergulaan nasional. Penetapan kebijakan HAP bagi produsen di Rp 14.500 per kilo, itu menurut saya merupakan salah satu cara mensejahterakan petani kita. Tatkala petani terus bersemangat, tentunya produksi dalam negeri akan menanjak. Lalu HAP di konsumen sendiri memberi kewajaran harga bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi," kata Arief.

Atas kiprah tersebut, NFA menerima penghargaan bergengsi sebagai "Lembaga dengan Peran Terdepan dalam Peningkatan Produksi Gula Nasional". Apresiasi ini diberikan dalam ajang National Sugar Summit (NSS) 2024 yang digelar di Malang, Jawa Timur, pada Kamis (5/12/2024) dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari sektor pangan, pemerintah, dan industri gula nasional.

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat mengatakan diberikannya penghargaan kepada NFA karena lembaga ini dinilai berperan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan produksi gula nasional. Hal itu dibuktikan melalui penetapan kebijakan harga yang menjadi kewenangan NFA.

"Peningkatan produksi ini didorong oleh kebijakan harga yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Untuk itu, masyarakat industri gula nasional memberikan penghargaan kepada Badan Pangan Nasional karena dinilai menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi nasional selama ini," ujar Budi.

Berdasarkan hasil evaluasi akhir giling tahun 2024, luas areal mengalami peningkatan sebesar 3,26 persen. Produksi tebu meningkat sebesar 5,96 persen, sementara produksi gula meningkat sebesar 8,09 persen, dan rendemen meningkat sebesar 1,52 persen dibandingkan pada tahun 2023.

Berkaitan dengan penghargaan itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengungkapkan terima kasihnya dan berkomitmen untuk terus membantu perwujudan Asta Cita terkait ketahanan pangan. "Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor gula. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan peran kami dalam memperkuat produksi pangan strategis nasional," ungkap Arief.

"Tentu ini merupakan pengejawantahan atas Asta Cita Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang mengusung visi besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan pokok rakyat yang mampu dipenuhi dari bangsa sendiri dengan harga terjangkau. Dengan begitu, kalangan petani dapat turut tersejahterakan dan masyarakat pun bisa terpenuhi kebutuhannya. Ini adalah upaya menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sektor pangan menuju Indonesia Emas 2045," sambungnya.



Adapun sejak NFA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021, NFA terus melakukan berbagai langkah konkret untuk mendorong sinergi stakeholder dalam

stabilisasi harga gula, baik di tingkat produsen maupun konsumen.

NFA telah menetapkan HAP gula konsumsi di tingkat produsen dan konsumen sebelum musim giling tebu dimulai pada tahun 2024 ini. Melalui konkretisasi HAP tersebut turut mempengaruhi perubahan positif indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR). Apalagi produksi gula dalam negeri sebagian besar masih bersumber dari perkebunan rakyat.



Sampai November 2024, menyadur data Badan Pusat Statistik (BPS), NTPR berada di titik kulminasinya di angka 160,99. Indeks tersebut menjadi angka tertinggi NTPR dalam 2 tahun belakangan ini. Kendati begitu, rerata harga gula konsumsi di tingkat konsumen cukup stabil. Menurut panel harga pangan pada 5 Desember, rerata harga gula konsumsi di tingkat konsumen berada di angka Rp 17.960 per kg.

NFA juga aktif mengadvokasi kebijakan yang mendukung penguatan sektor gula, termasuk stabilisasi harga, perlindungan petani tebu, dan pengurangan ketergantungan terhadap impor gula. "Kami percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah, petani, dan pelaku industri, Indonesia dapat mencapai swasembada gula yang berkelanjutan. Langkah ini adalah wujud nyata dari visi kami untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh," tutup Arief.

Lebih lanjut tentang National Sugar Summit (NSS) 2024 yang digelar di Pabrik Gula Kebon Agung, Malang, Jawa Timur pada 4-5 Desember 2024 ini merupakan ajang diskusi dan bertukar gagasan di antara pelaku industri gula Indonesia. Melalui penerapan optimalisasi teknologi dan kemitraan, industri gula nasional diharapkan dapat mencapai swasembada gula dan mampu bersaing di kawasan ASEAN.

5. Bersama-sama Cek Harga Pasar, Harga Wajar di Tingkat Petani dan Konsumen

Sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Pengamanan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang digelar Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) di hari sebelumnya, pemerintah bergerak cepat memastikan ketersediaan pasokan dan harga pangan pokok strategis. Langkah itu ditempuh dengan blusukan langsung melihat kondisi pangan ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta pada Jumat (6/12/2024).

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi yang memimpin inspeksi hari ini memastikan secara keseluruhan harga dan stok pangan pokok strategis dalam kondisi memadai dan wajar. "Hari ini bersama-sama kita cek langsung ke pasar. Secara keseluruhan kondisi pangan sangat baik," ucapnya.

Berdasarkan pengecekan di pasar, beberapa komoditas pangan dalam harga yang wajar antara lain daging sapi paha belakang Rp 130.000 per kilogram (kg). Kemudian daging sapi paha depan Rp 120.000 per kg, bawang putih Rp 42.000

per kg, cabai merah keriting tadi Rp 35.000 per kg, dan cabai hijau Rp 42.000 per kg. Sementara harga beras Bulog SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Rp 12.000 per kg atau Rp 60.000 per sak (isi 5 kg).

"Kemudian harga telur terpantau stabil di harga sekitar Rp 24.000 sampai 26.000 per kilo. Ini juga harga yang baik. Perlu saya jelaskan bahwa harga telur yang baik hari ini, itu karena pakan dari ayam petelur sudah dijaga. Bulog memiliki stok jagung sekitar 90 ribu ton, sehingga harga di tingkat peternak layer sangat baik. Nah ini yang harus dijaga bahwa harga yang terbentuk sekarang adalah harga yang wajar. Jadi tidak boleh terlalu rendah bagi petani dan peternak, harus terbentuk harga yang wajar. Mari kita jaga iklim yang sudah baik seperti ini," tandasnya.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap produsen pangan dalam negeri adalah dengan menggelontorkan program SPHP jagung pakan sejak November 2023. Total 303 ribu ton jagung pakan dengan harga Rp 5.000 per kg disalurkan ke para peternak mandiri, sehingga dapat membantu atasi kesulitan peternak memperoleh jagung pakan yang kala itu sedang tinggi akibat menurunnya produksi.

Lebih lanjut, melalui program bantuan pangan penanganan stunting yang dikerjakan ID FOOD, telah merangkul hingga 8.778 peternak yang terdiri dari 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler. Dengan itu, telah memperlihatkan dampak positif program pemerintah yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam antarlini ekosistem pangan.



"Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa kita harus bersama petani dan peternak. Namun tentunya kewajaran harga bagi masyarakat juga senantiasa harus dibentuk. Harga harus

wajar di tingkat produsen sampai konsumen. Apalagi Bapak Presiden sudah menyampaikan kalau stok beras di Bulog saat ini adalah stok terbaik, 2 juta ton.



Sekarang kita bersiap menghadapi Nataru karena mungkin nanti dalam 1-2 minggu ke depan harus bisa mengantisipasi kenaikan permintaan. Kita siap juga menghadapi sampai Januari dan Februari nanti," tegas Arief.

"Kami juga mengimbau masyarakat supaya membiasakan belanja bijak. Jadi kalau kita di rumah biasanya punya beras 5 kilo, belanjanya tidak usah 10 kilo atau 15 kilo. Jadi belanja bijak sesuai kebutuhan saja. Lalu stop boros pangan. Jangan sampai boros pangan. Bayangkan petani kita nanamnya penuh jerih payah, kemudian sudah di meja kita, tapi kita makan malah ada sisa dan terbuang sia-sia," pintanya.

Dalam kegiatan peninjauan hari ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan; Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa; Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, Bambang Wisnu Broto; Direktur SPHP NFA, Maino Dwi Hartono; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati; Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo; Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso; Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, beserta perwakilan dari Perum Bulog dan asosiasi pelaku usaha sektor pangan.

6. 5 Provinsi Ini Sambut Baik Inisiasi Kepala NFA Jaga Stabilitas Pangan Lewat Mobil SPHP

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jambi, Kalteng, Sumbar dan DIY menyambut baik inisiasi Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam menjaga stabilitas dan pasokan pangan melalui penyerahan 5 mobil Stabilitas Harga Pasokan Pangan atau SPHP.

Penyerahan 5 kendaraan ini bertujuan untuk menjangkau sejumlah titik daerah dan juga pelosok yang sebelumnya sulit terjangkau gerakan pangan murah (GPM).



Mengenai hal ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Dyah Lukisari mengatakan bahwa mobil SPHP ini sangat bermanfaat untuk menyediakan bahan pokok yang berkualitas

dan terjangkau. Mobil tersebut juga sekaligus langkah nyata dari NFA dalam membantu kelancaran dan pelaksanaan stabilitas pangan.

“Jelas mobil ini akan sangat membantu karena kegiatan GPM di Jawa Tengah itu sangat masif. Tahun ini saja kita sudah mencapai 993 kali. Jadi dengan adanya bantuan transport ini akan sangat membantu kelancaran dan pelaksanaan GPM,” ujar Dyah, Minggu (8/12/2024).

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismed Wijaya mengatakan bahwa mobil SPHP akan digunakan secara rutin dalam menjangkau masyarakat di daerah yang membutuhkan bantuan bahan pokok murah namun berkualitas tinggi.

“InsyaAllah, mobil ini akan kami manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ahmad Elpiansyah menyampaikan terimakasih atas perhatian besar Kepala NFA terhadap stabilitas yang dilakukan lewat mobil SPHP maupun gerakan pangan murah.

“Dengan adanya mobil ini, kami yakin dan sangat optimis kondisi pangan menjelang Nataru dalam kondisi aman. Dan kami akan langsung segera melakukan operasi gerakan pangan murah,” katanya.



Kepala Badan NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa penyerahan 5 unit mobil ini untuk memperkuat stabilisasi pangan. Ia juga menyebut, pada tahun ini juga NFA juga telah menyerahkan 7 unit mobil laboratorium keliling keamanan pangan segar kepada tujuh provinsi untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar.

“Yang pasti, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto stabilitas pangan harus kita jaga. Dan ke depan saya minta tolong kepada para Kadis untuk menyiapkan list setiap hari mobil ini kemana saja. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas,” katanya.

Untuk diketahui, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency juga terus mendukung visi Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sebagai langkah nyata, Bapanas siap menjaga stabilitas agar pasokan dan produksi dalam negeri dapat diserap secara baik.

7. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Perkuat Komitmen Dukung Swasembada Pangan

Komitmen dalam mendukung percepatan swasembada pangan menjadi aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat melantik pejabat tinggi pratama, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional lingkup NFA pada Senin (9/12/2024) di kantor NFA Jakarta.

“Saya berharap para pejabat yang dilantik hari ini dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Apa yang saudara kerjakan akan dinilai oleh masyarakat, dan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada negara, tapi juga kepada Tuhan,” ujar Arief.

“Tadi pagi, di Rakor Inflasi Kemendagri, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengarahkan kita semua, semangat kita untuk swasembada pangan, untuk kemandirian bangsa. Untuk itu, tentunya seluruh stakeholder di bidang pangan, termasuk Badan Pangan Nasional di mana Saudara semua berada, akan bekerja sepenuh hati mewujudkannya,” kata Arief.

Dalam kesempatan tersebut, Arief juga menitipkan pesan khusus kepada Kombes Pol Hermawan yang baru dilantik sebagai Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.



“Saya titip Pak Hermawan terkait dengan pengawasan keamanan pangan ini sangat penting, karena tidak ada artinya yang kita kerjakan apabila pangan strategis yang sampai ke masyarakat

itu tidak aman. Jadi saya harapkan secara simultan melakukan pengawasan keamanan pangan dengan melibatkan seluruh dinas pangan di provinsi dan kabupaten/kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah” tutur Arief. Selain Hermawan yang dilantik sebagai Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Arief juga melantik 1 orang pejabat pengawas dan 10 orang pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf, serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama lingkup Badan Pangan Nasional.

8. Gotong Royong Wujudkan Swasembada Pangan, Akselerasi Produksi Pangan Dalam Negeri Jadi Kunci Keberhasilan

Pemerintah semakin dekat dengan visi swasembada pangan besutan Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, pemerintah telah memutuskan untuk meniadakan impor beberapa pangan pokok strategis untuk tahun 2025. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sesuai menggelar 'Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025' di Jakarta, pada Senin (9/12/2024).

"Kita baru saja rapat memutuskan tentang neraca komoditas untuk tahun 2025. Pertama, (ada) berita gembira bahwa 2025 kita tidak akan impor jagung untuk pakan ternak. Nol ya, nggak ada impor lagi. Kedua, kita tidak akan impor lagi garam untuk konsumsi. Jadi tidak impor jagung untuk pakan. Tidak impor garam untuk konsumsi. Tidak impor gula untuk konsumsi. Tidak impor beras untuk konsumsi," papar Zulhas.



"Jadi kita akan coba kerja keras selama 2 tahun ini. Untuk industri pun kita juga akan produksi. Bisa kita Insya Allah 2027, perintah presiden swasembada pangan, kita amankan. Mohon doa dan dukungannya karena

Bapak Presiden luar biasa. Political will-nya dari Bapak Presiden, dukungan swasembada pangan luar biasa. Oleh karena itu, kami meyakini paling lambat 2027, kita swasembada pangan," tandasnya.

Swasembada pangan tersebut dilaksanakan pemerintah dengan upaya akselerasi produksi pangan dalam negeri. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengungkapkan semangat Presiden Prabowo yang mengarahkan hingga level kecamatan agar bersama-sama mewujudkan swasembada pangan.

"Semangat swasembada pangan tadi Bapak Presiden dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa memang harus disiapkan produksi dalam negeri. Harapan beliau, swasembada pangan yang menyeluruh. Jadi maksudnya setiap daerah diminta untuk menyiapkan upaya itu. Mulai dari provinsi, kabupaten, kalau perlu sampai kecamatan, itu menyiapkan swasembada. Kita gotong royong," ungkap Arief.

"Jadi maksudnya kita semua seperti Pak Menko Pangan sampaikan tadi, fokusnya adalah pada produksi dalam negeri. Apa yang bisa diproduksi dalam negeri, itu harus dipenuhi dari dalam negeri. Nah Bapak Presiden menyampaikan kita itu bangsa yang kuat, bangsa yang mampu untuk melakukan ini semuanya sendiri. Jadi jangan ketergantungan pangan terhadap luar negeri. Itu perintahnya tadi. Ini masalah harga diri bangsa. Beliau tadi sampaikan begitu," sambungnya. Arief sebut telah ada beberapa komoditas pangan pokok yang telah mampu dipenuhi pasokannya dari hasil produksi domestik. "Ini semangatnya adalah untuk swasembada, makanya tadi semua impor kan dipotong-potong. Daging ayam kita sudah sufficient. Telur juga sudah. Sufficient itu maksudnya sudah mampu dipenuhi dari petani kita. Bawang merah sudah dipenuhi betul. Beras Insya Allah ini sudah terpenuhi. Gula konsumsi juga," bebernya.



Menurut Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2024, komoditas daging ayam ras memiliki produksi dalam setahun 3,8 juta ton. Sementara kebutuhan tahunan di kisaran 3,7 juta ton. Kondisi surplus juga ada di komoditas telur ayam dengan produksi dalam negeri di 6,3 juta ton dan konsumsi tahunan di 6,2 juta ton.

Bawang merah diperkirakan produksi selama 2024 dapat mencapai 1,3 juta ton dengan konsumsi tahunan 1,1 juta ton. Untuk gula konsumsi, produksinya masih perlu digenjot sedikit lagi untukenuhi konsumsi tahunan. Di 2024, produksi domestik setahun diestimasikan mampu mencapai 2,4 juta ton untuk mengejar konsumsi tahunan di angka 2,8 juta ton.

Terkait beras, NFA telah menyusun proyeksi stok awal di tahun 2025 yang dapat mencapai 8,398 juta ton. Ini merupakan carry over dari stok akhir 2025. Kebutuhan beras di 2025 diperkirakan sebesar 31,04 juta ton berdasarkan perhitungan konsumsi rumah tangga, konsumsi non-rumah tangga, dan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 284.438.782 jiwa.

"Jadi begini, kita telah menghitung bersama-sama terkait ending balance di tahun 2024, projection kebutuhannya berapa, itu yang menjadi beginning balance. Kalau kita sudah melihat memang tidak perlu impor, ya memang tidak usah impor. Contohnya beras. Beras kan kebutuhannya 30-31 juta ton. Walaupun ending balance di 8,398 juta ton tapi itu tersebar ada di masyarakat, ada di bulog 2 juta ton, dan lain-lain. Makanya tadi kementerian teknis diminta produksi beras bisa sampai 32 juta ton," urainya.

"Jadi semangatnya sekarang adalah swasembada. Jangan kita bicara impor impor terus. Stok beras di Bulog nanti di 31 Desember bisa sekitar 2 juta ton. Itu sudah dikurangi bantuan pangan beras Desember ini yang 220 ribu ton," lanjutnya.

Adapun stok beras yang dikelola Perum Bulog merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam catatan NFA, stok beras Bulog jelang tutup tahun 2022, tepatnya 12 Desember 2022 adalah 455 ribu ton. Di penghujung 2023, stok beras Bulog meningkat pesat hingga 251 persen menjadi 1,6 juta ton. Di penghujung 2024, stok beras Bulog diperkirakan akan ada 2 juta ton.

"Jadi untuk 2025, justru kita harus menyiapkan panen raya yang kemungkinan ada di akhir Februari sampai Maret. Jangan sampai nanti sudah panen, kita tak siap untuk menyerap gabah petani. Kalau tidak, nanti harga petani bisa jatuh. Nah peran Bulog nanti akan semakin diperkuat untuk upaya itu," pungkas Arief.

9. Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Hadapi Nataru

Pemerintah memastikan ketersediaan pangan pokok strategis menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bagi masyarakat, memadai dengan harga yang baik dan wajar. Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024) di Jakarta.

"Jelang Nataru nanti, stok pangan pokok strategis kita pastikan mencukupi. Terkait harga, pemerintah tentunya selalu menjaga tingkat harga agar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kita tidak ingin petani menderita kalau harga terlalu rendah. Di sisi lain, masyarakat juga perlu bisa memperoleh harga pangan yang wajar," ujar Arief.

Mengenai perkembangan harga yang kerap terjadi menjelang Nataru, Arief berkomitmen akan terus dijaga kestabilannya agar kalangan petani tidak mengalami keterpurukan. Keseimbangan harga bagi produsen dan konsumen ini yang menjadi fokus NFA.

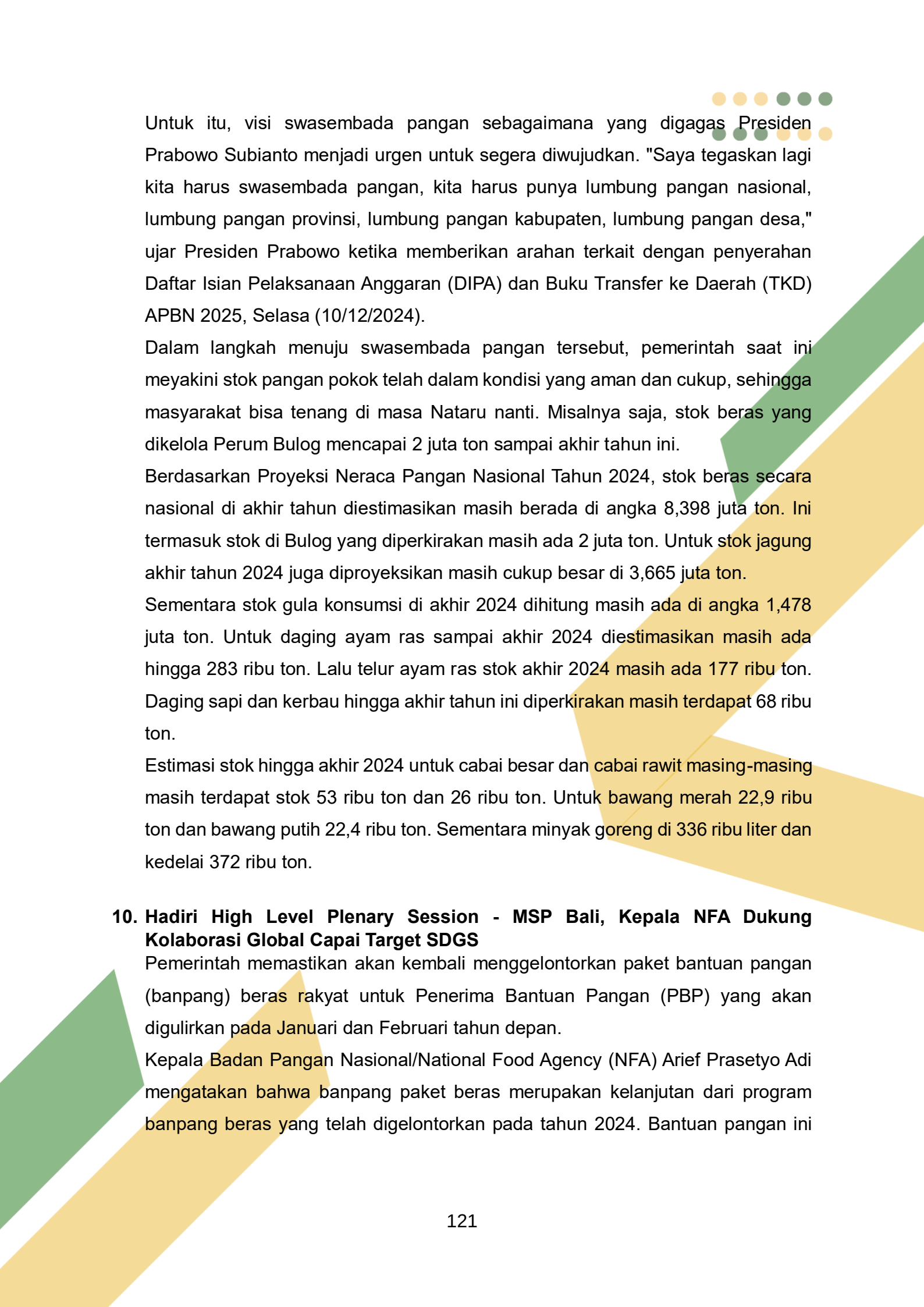
Menurut Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, kondisi Indonesia berbeda dengan negara lain yang tidak memiliki petani dan peternak, sehingga kewajaran harga harus senantiasa diwujudkan. Untuk itu perlu ada keseimbangan harga antarlini.

"Jadi stok tidak perlu dikhawatirkan. Justru malah kita harus jaga beberapa komoditas supaya harganya tidak jatuh di tingkat petani. Itu challenge kita di Indonesia yang berbeda dengan negara lain yang tidak memiliki petani dan peternak," bebernya.



"Hari ini kebijakannya sesuai perintah dari Bapak Presiden Prabowo, bahwa petani, peternak sampai nelayan, jangan sampai menderita, akibat produknya tidak terserap. Kemudian harga di

tingkat konsumen juga harus dijaga. Semua harus di tahapan wajar, sehingga ada keseimbangan antara harga di tingkat petani sampai ke masyarakat



Untuk itu, visi swasembada pangan sebagaimana yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi urgen untuk segera diwujudkan. "Saya tegaskan lagi kita harus swasembada pangan, kita harus punya lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan desa," ujar Presiden Prabowo ketika memberikan arahan terkait dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2025, Selasa (10/12/2024).

Dalam langkah menuju swasembada pangan tersebut, pemerintah saat ini meyakini stok pangan pokok telah dalam kondisi yang aman dan cukup, sehingga masyarakat bisa tenang di masa Nataru nanti. Misalnya saja, stok beras yang dikelola Perum Bulog mencapai 2 juta ton sampai akhir tahun ini.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2024, stok beras secara nasional di akhir tahun diestimasikan masih berada di angka 8,398 juta ton. Ini termasuk stok di Bulog yang diperkirakan masih ada 2 juta ton. Untuk stok jagung akhir tahun 2024 juga diproyeksikan masih cukup besar di 3,665 juta ton.

Sementara stok gula konsumsi di akhir 2024 dihitung masih ada di angka 1,478 juta ton. Untuk daging ayam ras sampai akhir 2024 diestimasikan masih ada hingga 283 ribu ton. Lalu telur ayam ras stok akhir 2024 masih ada 177 ribu ton. Daging sapi dan kerbau hingga akhir tahun ini diperkirakan masih terdapat 68 ribu ton.

Estimasi stok hingga akhir 2024 untuk cabai besar dan cabai rawit masing-masing masih terdapat stok 53 ribu ton dan 26 ribu ton. Untuk bawang merah 22,9 ribu ton dan bawang putih 22,4 ribu ton. Sementara minyak goreng di 336 ribu liter dan kedelai 372 ribu ton.

10. Hadiri High Level Plenary Session - MSP Bali, Kepala NFA Dukung Kolaborasi Global Capai Target SDGS

Pemerintah memastikan akan kembali menggelontorkan paket bantuan pangan (banpang) beras rakyat untuk Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang akan digulirkan pada Januari dan Februari tahun depan.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa banpang paket beras merupakan kelanjutan dari program banpang beras yang telah digelontorkan pada tahun 2024. Bantuan pangan ini

merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi per 1 Januari 2025 mendatang.



“Bantuan Pangan beras ini akan digelontorkan di bulan Januari Februari untuk 16 juta PBP atau Penerima Bantuan Pangan di mana masing-masing PBP akan mendapatkan 10 kg beras, fokusnya ada di

desil 1 dan 2,” ujar Arief dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/12/2024).

“Ini sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo, jadi Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras ini,” tambah Arief.

Untuk diketahui, paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan meliputi kelompok rumah tangga, kelompok pekerja dan kelompok UMKM. Pada kelompok pertama, pemerintah memberi bantuan untuk 16 juta penerima PBP, PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) 1 persen untuk komoditas tepung terigu, gula industri dan minyak kita.

“Namun tahun depan terjadi penyusutan menjadi 16 juta penerima karena berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin menurun. Selain itu, masih ada berbagai intervensi dan stimulus pemerintah lainnya untuk masyarakat berpendapatan rendah. Tapi yang pasti kuota bantuan pangan beras tetap 10 kilogram untuk masing-masing penerima,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa bantuan pangan beras ini juga merupakan upaya bersama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas harga pangan serta memberikan paket stimulus di tengah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen.

“Akan ada bantuan pangan dan beras sebesar 10 ribu perkilogram. Dan kita bersyukur tentunya kalau kita lihat dengan data dari nilai daya beli menunjukkan bahwa masyarakat masih kuat untuk berbelanja,” katanya.



Airlangga mengatakan sesuai dengan jadwal tarif PPN tahun depan, maka barang-barang yang dibutuhkan masyarakat akan diberi fasilitas 0 persen. Di antaranya bahan pokok beras, daging, telur dan lain-lain dipastikan bebas PPN.

“Itu yang akan kita berikan fasilitas. Nah bahan makanan lain dengan penerapan PPN tersebut pemerintah memberikan stimulus atau paket ekonomi PPN ditanggung pemerintah. Sekali lagi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.

Sebelumnya Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah dan DPR akan memberikan keberpihakan kepada masyarakat dengan membebaskan biayanya PPN. Namun tepung, gula dan minyak kita untuk industri PP-nya tetap 11 persen. 1 persen pemerintah yang membayar,” jelasnya.

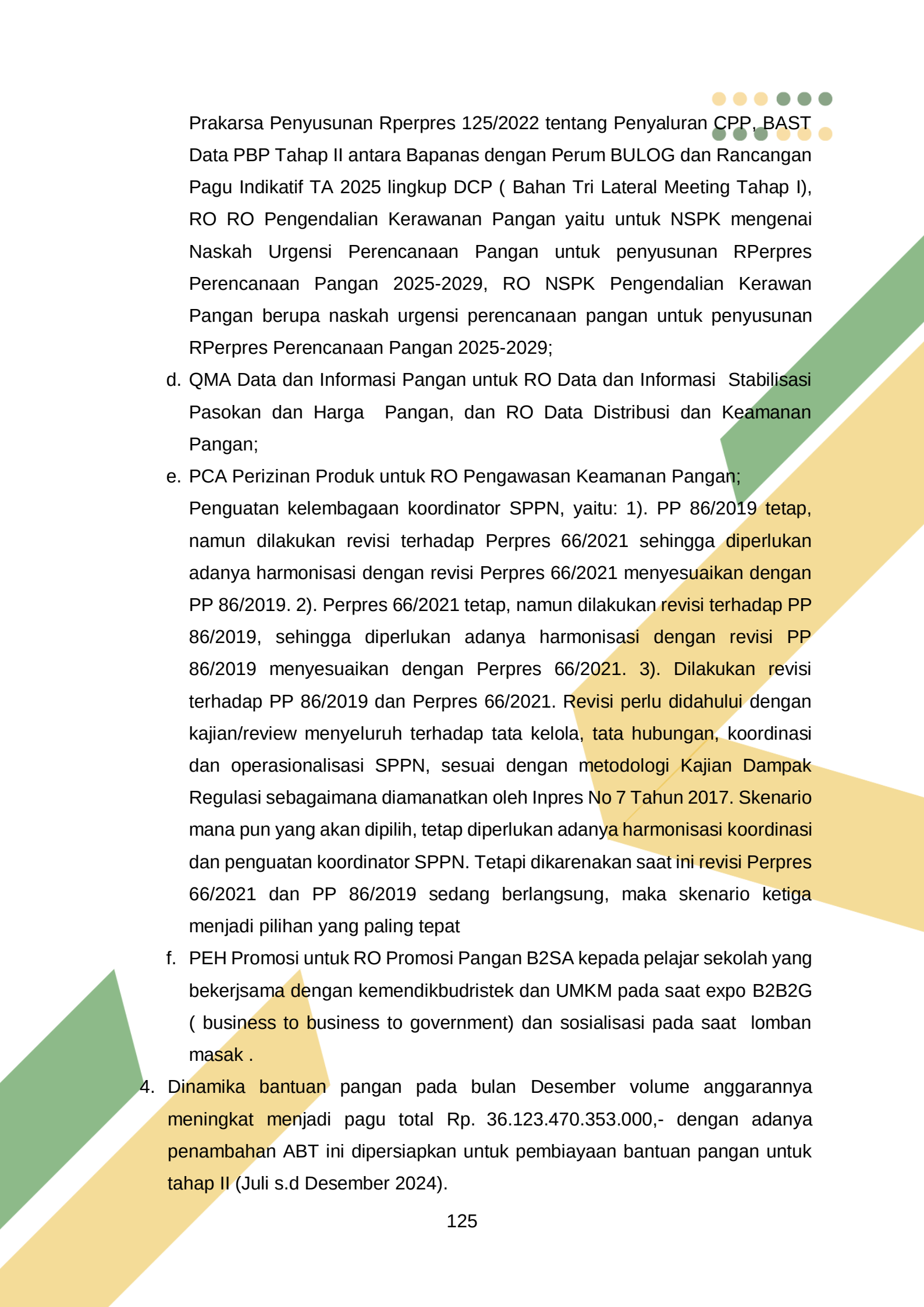
=====



4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) kegiatan dengan 17 jenis KRO (ABR, AEA, AEC, AFA, BEC, BMA, EBA, EBB, EBC, EBD, PCA, PEH, RAG, QIA, QDD, QEA, QMA) dan 55 output/RO dengan pagu total berdasarkan DIPA Badan Pangan Nasional tahun 2024 sebesar Rp. 36.414.810.050.000.-yang dialokasikan untuk mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen.
2. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember tahun 2024 sebesar Rp. 36.239.428.171.705,-,- dengan persentase realisasi sesuai pagu DIPA Revisi sebesar Rp. 99,56%. Sedangkan realisasi pada bulan Desember Tahun 2024 untuk satker Badan Pangan Nasional mencapai Rp. 9.839.516.382.771,- atau mencapai 98,44% dari target pagu Revisi DIPA Revisi atau setara Rp. 9.995.865.358.725,-
3. Realisasi fisik sampai bulan Desember Tahun 2024 sesuai target pencapaian KRO dan Output/RO Tahun 2024 adalah:
 - a. ABR Kebijakan bidang pertanian dan pangan untuk RO Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan RO Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - b. AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monitoring dan Pelaporan untuk RO Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - c. AFA Norma Standar Prosedur dan Kriteria untuk RO NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, RO NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan yaitu NSPK Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 181 Tahun 2024 tentang Pemberian Kompensasi atas Penyelenggaraan CPP, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Penetapan Penerima Bantuan Pangan Tahap I Tahun 2024, SK penetapan Lokasi dan Penerima Sarpras 2024, PKS Bapanas dan BULOG tentang Penyaluran CPP UNTUK Pemberian Banpang Beras Tahun 2024, Dokumen Persetujuan Izin



Prakarsa Penyusunan Rperpres 125/2022 tentang Penyaluran CPP, BAST Data PBP Tahap II antara Bapanas dengan Perum BULOG dan Rancangan Pagu Indikatif TA 2025 lingkup DCP (Bahan Tri Lateral Meeting Tahap I), RO RO Pengendalian Kerawanan Pangan yaitu untuk NSPK mengenai Naskah Urgensi Perencanaan Pangan untuk penyusunan RPerpres Perencanaan Pangan 2025-2029, RO NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan berupa naskah urgensi perencanaan pangan untuk penyusunan RPerpres Perencanaan Pangan 2025-2029;

d. QMA Data dan Informasi Pangan untuk RO Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan RO Data Distribusi dan Keamanan Pangan;

e. PCA Perizinan Produk untuk RO Pengawasan Keamanan Pangan; Penguatan kelembagaan koordinator SPPN, yaitu: 1). PP 86/2019 tetap, namun dilakukan revisi terhadap Perpres 66/2021 sehingga diperlukan adanya harmonisasi dengan revisi Perpres 66/2021 menyesuaikan dengan PP 86/2019. 2). Perpres 66/2021 tetap, namun dilakukan revisi terhadap PP 86/2019, sehingga diperlukan adanya harmonisasi dengan revisi PP 86/2019 menyesuaikan dengan Perpres 66/2021. 3). Dilakukan revisi terhadap PP 86/2019 dan Perpres 66/2021. Revisi perlu didahului dengan kajian/review menyeluruh terhadap tata kelola, tata hubungan, koordinasi dan operasionalisasi SPPN, sesuai dengan metodologi Kajian Dampak Regulasi sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No 7 Tahun 2017. Skenario mana pun yang akan dipilih, tetap diperlukan adanya harmonisasi koordinasi dan penguatan koordinator SPPN. Tetapi dikarenakan saat ini revisi Perpres 66/2021 dan PP 86/2019 sedang berlangsung, maka skenario ketiga menjadi pilihan yang paling tepat

f. PEH Promosi untuk RO Promosi Pangan B2SA kepada pelajar sekolah yang bekerjasama dengan kemendikbudristek dan UMKM pada saat expo B2B2G (business to business to government) dan sosialisasi pada saat lomba masak .

4. Dinamika bantuan pangan pada bulan Desember volume anggarannya meningkat menjadi pagu total Rp. 36.123.470.353.000,- dengan adanya penambahan ABT ini dipersiapkan untuk pembiayaan bantuan pangan untuk tahap II (Juli s.d Desember 2024).



4.2 Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan Desember Tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terjadinya penambahan Anggaran Badan Pangan Nasional pada bulan Desember Tahun 2024 disebabkan karena adanya anggaran tambahan belanja untuk kegiatan bantuan pangan.
2. Minimnya SDM atau petugas administrasi pelaksana kegiatan di daerah masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pelaporan secara periodik.
3. Adanya pergantian SDM pelaksana (operator beberapa Aplikasi) menyebabkan tertundanya pelaporan pelaksanaan kegiatan, karena harus menunggu pembaharuan SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan Kepala SKPD.

4.3 Rekomendasi

Pencapaian yang baik terkait pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada bulan Desember sebesar 98,44 % dari target bulan Desember sebesar 24,75% dari pagu total selama bulan Desember Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Pengisian Anggaran (DIPA) Tahun Nomor SP DIPA.125.01.1.690590/2023 Revisi 22 Tanggal 25 Desember 2024, realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 mencapai 99,56 dari pagu total 36.414.810.050.000,-. Perlu dilakukan strategi percepatan realisasi anggaran untuk mendukung target realisasi anggaran dengan penetapan rencana aksi dan pemantauan realisasi capaian serta kendala yang dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025.

Tindaklanjut atas permasalahan di atas antara lain:

- 1) Perlu pembinaan percepatan kegiatan pusat dan satker dekon di 38 provinsi
- 2) Petugas di Satker Dekon seharusnya menggunakan SDM yang kompeten.
- 3) Perlu diintegrasikan proses koordinasi dan konsultasi ke KPPN di Provinsi/Kab/Kota.
- 4) Perlunya mengoptimalkan SDM dengan bimtek yang bersifat teknis.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Lampiran III DIPA Revisi ke-22 : Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



08-9034-5051-0462-5481

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	690590	BADAN PANGAN NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.427.616	15.134.811	386.901.498	15.218.144	17.181.174	24.148.798	23.688.029	6.086.084.962	34.564.318	11.216.460.478	8.592.561.059	9.997.439.171	36.414.810.050
		BELANJA PEGAWAI	1.363.817	3.384.698	7.197.409	4.037.846	3.809.228	7.616.684	3.796.022	3.785.811	3.847.895	3.747.215	4.847.895	5.308.435	52.742.755
		BELANJA BARANG	3.990.849	10.887.768	379.249.938	10.890.607	12.954.430	15.952.670	19.359.471	6.081.627.987	15.605.739	11.206.892.304	8.582.373.384	9.988.912.192	36.328.697.338
		BELANJA MODAL	72.950	862.345	454.151	289.892	417.516	579.442	532.532	671.165	15.110.683	5.820.958	5.339.780	3.218.544	33.369.957
	125.01.HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.209.515	2.101.172	371.762.286	3.256.379	3.047.063	5.257.199	3.025.171	6.063.674.546	11.870.532	11.195.782.416	8.564.050.373	9.986.767.214	36.192.803.866
	125.01.HA.6876	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.183.883	2.065.573	371.598.468	3.198.004	2.997.374	5.036.978	2.945.577	6.063.548.607	3.212.171	11.190.630.831	8.561.009.310	9.985.489.831	36.173.914.606
		53 BELANJA MODAL	25.632	35.599	165.819	58.375	48.690	220.221	79.594	125.938	8.658.361	5.151.585	3.041.063	1.277.383	18.889.260
		Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	86.795	2.012.051	2.665.139	1.995.158	1.850.660	3.726.428	7.695.161	8.836.450	4.059.663	4.321.849	13.212.330	10.841.371	61.303.053
	125.01.HA.6877	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	79.923	1.879.060	2.499.678	1.938.837	1.772.012	3.651.811	7.570.547	8.564.623	3.827.119	3.978.811	11.455.816	9.565.906	56.783.936
		53 BELANJA MODAL	6.872	132.990	165.460	56.320	78.648	74.817	124.614	271.826	232.544	343.038	1.756.513	1.275.471	4.519.114
		Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	854.241	2.971.951	1.347.864	1.640.902	3.427.247	3.127.002	3.406.378	4.944.907	9.931.177	4.314.846	2.870.548	3.919.331	42.756.392
	125.01.WA.6874	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	832.224	2.887.938	1.314.166	1.598.144	3.316.575	3.028.487	3.279.427	4.812.229	3.863.601	4.203.469	2.759.171	3.835.113	35.750.542
		53 BELANJA MODAL	22.016	84.015	33.697	42.758	110.672	98.515	126.951	132.678	6.047.576	111.377	111.378	84.217	7.005.850
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.277.088	8.049.637	11.126.209	8.325.706	8.856.203	12.036.167	9.561.315	8.629.060	8.702.945	12.041.367	12.427.808	15.911.256	117.946.739
		51 BELANJA PEGAWAI	1.363.817	3.384.698	7.197.409	4.037.846	3.809.228	7.616.684	3.796.022	3.785.811	3.847.895	3.747.215	4.847.895	5.308.435	52.742.755

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	894.819	4.055.199	3.839.628	4.155.621	4.868.469	4.235.594	5.563.920	4.702.528	4.682.848	8.079.193	7.149.087	10.021.349	62.248.251
		53 BELANJA MODAL	18.430	609.741	89.174	132.439	178.506	185.889	201.373	140.722	172.202	214.958	430.826	581.473	2.955.733

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pangan Nasional

td.
Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c)
NIP. 197411272022211004

Lampiran 2.

Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi s.d Bulan Desember Tahun 2024 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 22	DESEMBER (27,45%)	DESEMBER	sd. DESEMBER	%	
JUMLAH SELURUHNYA		36.414.810.050.000	9.995.865.358.725	9.839.516.382.771	36.239.428.171.705	99,56%	161.921.617.295
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	36.296.863.311.000	9.963.488.978.870	9.823.589.362.071	36.125.600.133.551	99,56%	159.259.370.449
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	36.192.803.866.000	9.934.924.661.217	9.810.085.288.351	36.033.520.832.879	99,57%	153.855.720.121
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.388.938.000	1.204.763.481	105.262.890	3.981.076.451	96,82%	130.876.549
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.214.718.000	333.440.091	62.172.890	1.082.114.798	97,70%	25.489.202
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.184.220.000	325.068.390	2.200.000	1.032.031.287	91,41%	96.990.713
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	1.990.000.000	546.255.000	40.890.000	1.866.930.366	99,55%	8.396.634
AEA	Koordinasi	17.408.923.000	4.778.749.364	1.851.453.819	15.916.129.955	97,08%	478.658.045
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	786.750.000	215.962.875	290.741.806	725.819.076	97,39%	19.467.924
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi	7.817.323.000	2.145.855.164	899.703.121	7.193.183.990	97,29%	200.385.010

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 22	DESEMBER (27,45%)	DESEMBER	sd. DESEMBER	%	
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	8.804.850.000	2.416.931.325	661.008.892	7.997.126.889	96,87%	258.805.111
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.903.375.000	796.976.438	148.220.277	2.664.377.681	98,10%	51.467.319
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	501.375.000	137.627.438	0	490.145.813	99,31%	3.417.187
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.302.000.000	357.399.000	9.500.000	1.291.592.564	99,89%	1.407.436
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.100.000.000	301.950.000	138.720.277	882.639.304	94,98%	46.642.696
BEC	Bantuan Produk	36.123.470.353.000	9.915.892.611.899	9.803.511.313.650	35.970.430.229.677	99,58%	153.040.123.323
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pemerintah	36.123.470.353.000	9.915.892.611.899	9.803.511.313.650	35.970.430.229.677	99,58%	153.040.123.323
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.500.000.000	411.750.000	161.029.950	1.480.995.666	98,73%	19.004.334
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.500.000.000	411.750.000	161.029.950	1.480.995.666	98,73%	19.004.334
QMA	Data dan Informasi Publik dan Informasi Publik	24.682.277.000	6.775.285.037	2.175.488.608	20.863.862.899	99,66%	70.751.101

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 22	DESEMBER (27,45%)	DESEMBER	sd. DESEMBER	%	
QMA.00 1	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	7.199.647.000	1.976.303.102	728.823.098	6.464.117.962	99,57%	27.836.038
QMA.00 2	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.900.550.000	4.364.700.975	1.409.465.510	12.964.237.667	99,83%	21.692.333
QMA.00 3	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.582.080.000	2.221.912	37.200.000	1.435.507.270	98,54%	21.222.730
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.450.000.000	5.064.525.000	2.132.519.157	18.184.160.550	99,64%	64.839.450
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	16.450.000.000	4.515.525.000	147.019.157	16.198.660.550	99,69%	50.339.450
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.000.000.000	549.000.000	1.985.500.000	1.985.500.000	99,28%	14.500.000
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	61.303.053.000	16.827.688.049	10.952.791.698	51.647.236.175	92,48%	4.197.306.825
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	7.761.197.000	10.865.676	248.362.332	7.654.551.986	99,33%	51.717.014
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.123.000.000	4.372.200	162.648.144	3.102.304.576	99,34%	20.695.424
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4.638.197.000	6.493.476	85.714.188	4.552.247.410	99,32%	31.021.590
AEA	Koordinasi	32.808.181.000	9.005.845.685	9.933.450.708	23.566.794.875	85,20%	4.093.792.125

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 22	DESEMBER (27,45%)	DESEMBER	sd. DESEMBER	%	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	5.111.197.000	1.403.023.577	400.205.015	4.186.804.309	92,55%	336.820.691
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	27.696.984.000	7.602.822.108	9.533.245.693	19.379.990.566	83,76%	3.756.971.434
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	789.525.000	216.724.613	131.590.254	756.375.224	99,25%	5.690.776
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	109.800.000	32.547.754	372.708.809	99,22%	2.911.191
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	389.525.000	106.924.613	99.042.500	383.666.415	99,28%	2.779.585
QEA	Bantuan Masyarakat	17.653.550.000	4.845.899.475	355.420.170	17.575.369.099	99,85%	26.710.901
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	13.567.000.000	3.724.141.500	50.219.500	13.501.860.629	99,90%	13.669.371
QEA.002	Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	4.086.550.000	1.121.757.975	305.200.670	4.073.508.470	99,68%	13.041.530
QMA	Data dan Informasi Publik	2.290.600.000	628.769.700	283.968.234	2.094.144.991	99,08%	19.396.009
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.035.000.000	284.107.500	52.661.800	911.959.800	98,19%	16.840.200

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 22	DESEMBER (27,45%)	DESEMBER	sd. DESEMBER	%	
QMA.00 2	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.255.600.000	344.662.200	231.306.434	1.182.185.191	99,78%	2.555.809
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	42.756.392.000	11.736.629.604	2.551.282.022	40.432.064.497	97,10%	1.206.343.503
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.063.900.000	566.540.550	109.205.271	2.005.109.280	98,89%	22.501.720
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	115.500.000	31.704.750	0	114.720.000	99,32%	780.000
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.948.400.000	534.835.800	109.205.271	1.890.389.280	98,86%	21.721.720
AEA	Koordinasi	22.683.553.000	6.226.635.299	1.104.878.969	21.729.698.550	97,73%	504.133.450
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.853.109.000	2.155.678.421	331.801.582	7.378.678.174	95,77%	325.650.826
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	10.521.222.000	2.888.075.439	405.788.307	10.185.114.721	99,21%	81.522.279
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan	4.309.222.000	1.182.881.439	367.289.080	4.165.905.655	97,73%	96.960.345

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 22	DESEMBER (27,45%)	DESEMBER	sd. DESEMBER	%	
	Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan						
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	1.506.900.000	413.644.050	83.435.341	1.429.795.289	99,22%	11.242.711
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	158.000.000	43.371.000	0	156.756.770	99,21%	1.243.230
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.200.000.000	329.400.000	81.435.341	1.132.477.621	99,85%	1.660.379
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	148.900.000	40.873.050	2.000.000	140.560.898	94,40%	8.339.102
PCA	Perizinan Produk	1.492.865.000	409.791.443	216.113.675	1.424.973.027	98,75%	18.048.973
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	1.492.865.000	409.791.443	216.113.675	1.424.973.027	98,75%	18.048.973
PEH	Promosi	4.037.257.000	1.108.227.047	475.952.100	3.799.174.558	94,24%	232.382.442
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	4.037.257.000	1.108.227.047	475.952.100	3.799.174.558	94,24%	232.382.442
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.795.427.000	492.844.712	279.276.742	1.516.334.357	93,37%	107.592.643
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	1.795.427.000	492.844.712	279.276.742	1.516.334.357	93,37%	107.592.643

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 22	DESEMBER (27,45%)	DESEMBER	sd. DESEMBER	%	
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.472.805.000	678.784.973	135.994.828	2.150.294.285	92,42%	176.300.715
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.472.805.000	678.784.973	135.994.828	2.150.294.285	92,42%	176.300.715
QMA	Data dan Informasi Publik	643.185.000	176.554.283	146.425.096	366.003.239	77,90%	103.821.761
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	643.185.000	176.554.283	146.425.096	366.003.239	77,90%	103.821.761
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.060.500.000	1.663.607.250	0	6.010.681.912	99,50%	30.319.088
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	6.060.500.000	1.663.607.250	0	6.010.681.912	99,50%	30.319.088
125.01. WA	Program Dukungan Manajemen	117.946.739.000	32.376.379.856	15.927.020.700	113.828.038.154	97,71%	2.662.246.846
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	117.946.739.000	30.080.610.360	15.927.020.700	113.828.038.154	97,71%	2.662.246.846
AEC	Kerjasama	2.392.119.000	656.636.666	274.747.235	2.172.310.061	99,74%	5.693.939

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 22	DESEMBER (27,45%)	DESEMBER	sd. DESEMBER	%	
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	2.392.119.000	656.636.666	274.747.235	2.172.310.061	99,74%	5.693.939
.BMA	Data dan Informasi	6.187.277.000	1.698.407.537	2.027.643.446	6.000.392.626	98,51%	90.984.374
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	6.187.277.000	1.698.407.537	2.027.643.446	6.000.392.626	98,51%	90.984.374
.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	88.881.955.000	24.398.096.648	9.905.802.431	86.164.683.637	97,71%	2.016.662.363
EBA.956	Layanan BMN	722.000.000	198.189.000	11.151.716	616.514.882	97,67%	14.735.118
EBA.957	Layanan Hukum	1.591.900.000	436.976.550	155.079.122	1.459.443.618	97,57%	36.279.382
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.822.000.000	1.049.139.000	690.421.706	3.670.061.581	97,30%	101.938.419
EBA.959	Layanan Protokoler	921.000.000	252.814.500	73.068.258	902.359.921	99,96%	360.079
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	950.000.000	260.775.000	91.342.714	878.108.417	97,71%	20.591.583
EBA.962	Layanan Umum	12.956.853.000	3.556.656.149	1.096.343.593	12.129.486.107	96,55%	433.264.893
EBA.994	Layanan Perkantoran	67.918.202.000	18.643.546.449	7.788.395.322	66.508.709.111	97,92%	1.409.492.889
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	871.700.000	239.281.650	188.279.408	832.679.408	95,52%	39.020.592
EBB.951	Layanan Sarana Internal	871.700.000	239.281.650	188.279.408	832.679.408	95,52%	39.020.592
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.816.005.000	1.047.493.373	530.813.671	3.568.037.180	97,01%	109.791.820

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 22	DESEMBER (27,45%)	DESEMBER	sd. DESEMBER	%	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.816.005.000	1.047.493.373	530.813.671	3.568.037.180	97,01%	109.791.820
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15.797.683.000	4.336.463.984	2.999.734.509	15.089.935.242	97,42%	400.093.758
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.328.583.000	1.737.196.034	1.561.523.949	6.063.605.300	96,79%	200.924.700
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.100.000.000	301.950.000	204.811.114	1.071.531.046	99,53%	5.009.954
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2.066.000.000	567.117.000	99.069.206	1.740.285.634	92,76%	135.922.366
EBD.965	Layanan Audit Internal	6.303.100.000	1.730.200.950	1.134.330.240	6.214.513.262	99,07%	58.236.738